

DINAMIKA
DI KANDANG
BANTENG

KUKAR BANGKIT
DARI BLANK SPOT

PERINGATI HARI JADI
KE 75, PRESTASI
SUMSEL SEMAKIN
MENTERENG

TOTAL BEBASKAN
TANGSEL DARI
CORONA

WOW! WORK
FROM BALI
MULAI JULI

RUKUN RAHARJA
BERUPAYA BANGKIT DI
TENGAH PANDEMI

PON XX DI PAPUA KALI
INI SOAL KENDALA

MIMPI 7% MENKO PEREKONOMIAN

LAKNAT PERIODE KEDUA

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN 1 HALAMAN

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL

RP 50.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

PINTAR

Waktu berjalan terus. Teknologi informasi dan komunikasi semakin memainkan perannya dalam keseharian kita. Bayangkan saja, data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikemukakan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M Ramli pada awal Maret 2021 menyebutkan, jumlah pengguna telepon seluler pintar, yang menggunakan jaringan internet, sudah mencapai 167 juta dari 270 juta warga Indonesia, atau sekitar 61,8 persen dari total populasi.

Peningkatan pesat pengguna internet sudah tentu merupakan salah satu dampak mewabahnya penyakit akibat infeksi virus corona. Penyakit yang biasa disebut sebagai Covid-19. Beriringan dengan itu, sisi ekonomi dan bisnis yang memanfaatkan ponsel pintar juga menunjukkan dinamikanya sendiri. Kita melihat misalnya merger antara Gojek dan Tokopedia beserta implikasi positif maupun negatifnya yang masih memerlukan pendalaman lebih jauh.

Sebelum Covid-19 menjadi pandemi, pertumbuhan pengguna ponsel pintar belum begitu pesat. Pada 2015, misalnya, saat sistem operasi android yang mendominasi ponsel pintar baru masuk ke Indonesia, hanya terdapat 28,6 persen populasi di Indonesia yang menggunakan gawai tersebut. Seiring berlalunya waktu, ponsel pintar semakin terjangkau, sehingga meningkatkan penggunaannya.

Pada 2018, lebih dari setengah populasi di Indonesia, tepatnya 56,2 persen warga telah menggunakan ponsel pintar. Setahun berikutnya, angkanya naik menjadi 63,3 persen. Hingga 2025, diperkirakan setidaknya 89,2 persen populasi di Indonesia telah memanfaatkan ponsel pintar. Dalam kurun waktu enam tahun sejak 2019, penetrasi ponsel pintar di tanah air tumbuh 25,9 persen.

Wabah Covid-19 menyebabkan sekolah dan kampus terpaksa menyelenggarakan proses belajar jarak jauh alih-alih tatap muka di kelas atau lapangan yang rawan penularan pandemi. Alhasil, jumlah pengguna ponsel pintar pun terpacu lebih pesat.

Lebih dari itu, pandemi Covid-19 ternyata menyebabkan anak-anak sekolah dasar pun menggunakan ponsel pintar.

Tapi, siapa bisa menjamin bahwa anak-anak kita hanya menggunakan ponsel pintar untuk belajar daring? Bukankah akses materi pelajaran juga dapat dijangkau melalui jaringan internet di ponsel pintar? Bagaimana dengan akses internet di luar pelajaran, media sosial misalnya?

Terlebih lagi, laporan "Digital Civility Index" hasil analisis Microsoft yang keluar pada akhir Februari 2021 lalu menyatakan Indonesia merupakan negara dengan kesopanan berinternet terendah di Asia Tenggara. Teknologi informasi dan komunikasi tetap netral, namun penggunaannya yang membuatnya positif atau negatif. Waktu berjalan terus dan akan bercerita bagaimana perkembangan selanjutnya. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jalan MPR III No. 5B, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (12430)
Telp / Fax : 021-278 123 97

Twitter

: @1nfoindonesia

Facebook

: infoindonesia.id

Instagram

: @infoindonesia.idn

Email

: redaksi@infoindonesia.id

DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
MEI
2021



6 INFO UTAMA

Sementara sejumlah ekonom mengkhawatirkan target pertumbuhan tujuh persen pada kuartal II (triwulan 2) April-Juni 2021, Presiden Jokowi tetap optimistik. Memang faktor keberhasilan menekan pandemi Covid-19 menjadi penentunya.



22 INFO SUMSEL

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kini telah menginjak usia 75 tahun. Di usianya yang semakin matang dan di bawah kepemimpinan H.Herman Deru dan Mawardi Yahya, pembangunan Sumsel pun semakin mentereng.



40 INFO LINGKUNGAN

Orangutan, Siti dan Sudin bernasib baik selamat dari perdagangan ilegal. Kini keduanya harus menjalani tahap rehabilitasi pada sekolah Orangutan yang ada Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi.

86

INFO SELEBRITI

Pandemi Covid setahun terakhir jelas berdampak pada banyak sektor ekonomi, termasuk pariwisata dan hiburan. Maka banyak pesohor yang berkurang malah sepi undangan tampil. Alhasil, mereka beralih usaha.





44 INFO PROFIL

Perempuan adalah makhluk Allah yang berpotensi untuk menapaki jalan sufisme. Musababnya menurut Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid adalah karena perempuan pada dasarnya merupakan makhluk yang penuh dengan pengabdian.



52 INFO EKONOMI

Derap langkah bisnis PT Rukun Raharja Tbk (Raja) tampaknya akan menarik lebih banyak perhatian pada tahun ini. Bagaimana kinerja mendatang dengan masuknya nama baru di jajaran direksi dan penyesuaian diri terhadap perubahan kondisi lingkungan nasional maupun global?



68 INFO ISTANA

PPKM Mikro berlanjut pada 1-14 Juni 2021. Kali ini di seluruh provinsi tanpa kecuali. Jalur-jalur penyeberangan seperti di Bakauheni wajib pemeriksaan dengan uji usap.

- 3 DARI REDAKSI
- 18 INFO TANGSEL
- 30 INFO KUKAR
- 34 INFO BALI
- 38 INFO JATENG
- 48 INFO HUKUM
- 72 INFO TEKNOLOGI
- 76 INFO SPORT
- 80 INFO WISATA
- 98 KAJI



PERTARUHAN MENCAPAI PERTUMBUHAN 7 PERSEN

Sementara sejumlah ekonom mengkhawatirkan target pertumbuhan tujuh persen pada kuartal II (triwulan 2) April-Juni 2021, Presiden Jokowi tetap optimistik. Memang faktor keberhasilan menekan pandemi Covid-19 menjadi penentunya.

Mencapai target pertumbuhan tujuh persen pada kuartal kedua tahun ini bagaikan pertarungan. Sebagai Kepala Negara, sudah sewajarnya Presiden Joko Widodo menyebarkan optimisme untuk membangkitkan harapan menuju perbaikan.

Maka ketika berbicara dalam Pengarahan Presiden RI kepada Forkopimda se-Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Kamis, 20 Mei 2021 membangkitkan semangat itulah yang ia lakukan. "Coba bayangkan, ekonom banyak yang menyam-paikan, 'minus 0,74 koq melompat jadi tujuh?' Ya kita punya data, kita punya hitung-hitungan dan kita juga

memang harus berusaha. Karena begitu kuartal kedua bisa mencapai itu, kuartal ketiga (dan) kuartal keempat akan lebih mudah," ungkap Jokowi di depan para kepala daerah di Kepri, mulai dari Gubernur H Ansar Ahmad hingga bupati dan wali kota di salah satu provinsi terluar itu.

Menurut Jokowi, persoalan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 ini menyangkut soal psikologis. Jadi, ada kaitannya dengan semangat, daya juang, motivasi, dan dorongan untuk bertindak sesuai dengan situasi serta kondisi.

Kondisi faktualnya, pandemi Covid-19 masih merepotkan segenap lapisan masyarakat. Itu pula yang men-

jadi syarat dan ketentuan yang diumumkan Presiden Jokowi jika ingin target tujuh persen itu tercapai.

"Tapi begitu Covid-19 masih menanjak, waduh jangan berharap angka-angka itu, jangan berharap. Ini tugas kita bersama dan sekali (lagi) perlu saya ingatkan," ujarnya.

Toh optimisme Jokowi memang bersandar pada data maupun masukan dari jajaran pemerintah. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I (Januari-Maret) 2021 masih minus 0,74 persen, jajaran pemerintah melihat pertumbuhan itu lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, seluruh indikator ekonomi domestik sudah menunjukkan pemulihan. "Kita lihat dibanding negara lain, memang rata-rata negara lain sudah relatif meningkat. Indonesia termasuk yang lebih baik dibanding negara lain," kata Kunta dalam Dialog Produktif Kabar Kamis Penyerapan Dana PEN 2021, Kamis, 6 Mei 2021.

Tercatat, konsumsi rumah tangga sudah pulih meski masih berkontraksi -2,23 persen pada kuartal I 2021. Investasi maupun PMTB (pembentukan modal tetap bruto) terus mengalami perbaikan menjadi -0,23 persen dari sebelumnya -6,15 persen.

PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi.

P M T B

mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Kunta juga mengungkapkan kinerja perdagangan internasional seperti ekspor impor meningkat berkat pertumbu-

“
Kita lihat dibanding negara lain, memang rata-rata negara lain sudah relatif meningkat

han ekonomi China yang tumbuh 18,3 persen di kuartal I. "Ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi kita sudah solid dan konsisten. Kita mulai sejak tahun 2020 kemarin di kuartal II -5,32 persen, kemudian trennya meningkat di kuartal I mendekati 0 persen (-0,74 persen)," ujarnya.

Kunta menyebutkan, pemulihan ekonomi di dalam negeri tak lepas dari pemulihan negara-negara di dunia. Beberapa

lembaga internasional juga merevisi proyeksi ekonomi ke arah yang lebih baik karena ada optimisme pertumbuhan. IMF, misalnya, memproyeksi pertumbuhan ekonomi global sekitar enam persen, OECD 5,6 persen, dan World Bank sekitar empat persen.

"Perkembangan positif ekonomi global dilihat dari PMI (purchasing managers' index) sudah mencapai 55, pasar keuangan stabil, volatilitas menurun, harga komoditas meningkat, dan pertumbuhan ekonomi China yang sekarang 18,3 persen. Dampaknya di ekspor Indonesia sangat bagus dan vaksinasi global sangat progresif," ungkapnya.

Purchasing Managers' Index atau PMI adalah indikator ekonomi yang dibuat dengan melakukan survei terhadap sejumlah Purchasing Manager (manajer pembelian) di berbagai sektor bisnis. Angka indeks PMI tinggi menunjukkan optimisme pelaku sektor bisnis tersebut terhadap prospek perekonomian ke depan. Indeks yang paling diperhatikan investor dan analis adalah untuk sektor manufaktur yang disebut indeks PMI Manufaktur (Manufacturing PMI); dan sektor jasa yang disebut indeks PMI sektor Jasa (Services PMI).

Hampir semua negara industri maju merilis indikator ini dari berbagai lembaga survei termasuk negara-negara mata uang utama. Di Inggris, kawasan Euro, dan Jepang, indikator ini dirilis oleh Markit Group. Di Amerika Serikat oleh Institute for Supply Management (ISM) dan Markit Group; sedangkan di China terdapat indeks PMI versi resmi (official PMI) dan PMI Caixin.

Indeks PMI dianggap investor di sektor ini sebagai leading indicator bagi keadaan perekonomian secara keseluruhan, agar bisa memperoleh gambaran mengenai hasil penjualan, upah tenaga kerja, persediaan barang, dan tingkat harga. Sebagai acuan bagi pembacaan indeks PMI, digunakan angka 50.0. Apabila angka indeks di atas 50.0, berarti sektor

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Wibawa Dasa Nugraha

yang disurvei tengah mengalami ekspansi (pertumbuhan); sedangkan jika angka indeks di bawah 50,0, berarti sektor yang disurvei sedang mengalami kontraksi (perlambatan).

Namun, Kunta mengakui, di luar indikator ekonomi, masih ada risiko yang membayangi, seperti meningkatnya kasus harian Covid-19 secara global hingga akses vaksinasi yang terbatas. Begitu juga adanya kemungkinan normalisasi kebijakan moneter di AS yang lebih cepat serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

"Kami tetap optimis Indonesia sudah konsisten dan menunjukkan pemulihan yang sangat solid. Tapi kita perlu untuk menghadapi risiko yang masih ada, kita harus terus mengendalikan pandemi," tandas Kunta.

Sehari sebelum Kunta berbicara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto malah lebih optimistik pertumbuhan ekonomidikuartal II 2021 tem-

bus 7,8 persen dengan kisaran 6,9 persen sampai 7,8 persen. Melompat jauh dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal I 2021 yang masih terkontraksi -0,74 persen.

“
Kami tetap optimis Indonesia sudah konsisten dan menunjukkan pemulihan yang sangat solid.

"Ini diperkirakan pada kuartal II adalah 6,9 persen sampai 7,8 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Rabu, 5 Mei 2021. Ia menjelaskan, pertumbuhan tinggi di kuartal II 2021 bisa terwujud karena adanya faktor base effect dari kuartal II ta-

hun 2020: ekonomi Indonesia terkontraksi cukup dalam mencapai minus 5,32 persen.

Dia mengatakan, kontraksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I terjadi karena PDB berdasarkan harga dasar konstan tak jauh berbeda. Di kuartal I tahun 2020, PDB berdasarkan harga dasar konstan Rp 2.703,1 triliun. Sementara di kuartal I tahun ini, harga dasar konstan adalah Rp 2.683 triliun.

Kemudian di kuartal II 2020, harga dasar konstan menurun hanya Rp 2.589,8 triliun. "Dan apabila PDB kita harga konstan-nya sama saja (nominalnya) dengan di kuartal I, maka (ekonomi) sudah melompat 5,62 persen. Oleh karena itu pemerintah confident bahwa angka 6,9 persen atau 7 persen itu bisa tercapai di kuartal II 2021," jelas Airlangga.

Nantinya pada kuartal II 2021, dia memproyeksi seluruh komponen pembentuk PDB sudah kembali positif. Konsumsi rumah tangga yang masih terkontraksi -2,23 persen di kuartal I akan melompat jadi 6,9 persen hingga 7,8 persen.

Begitu pula untuk konsumsi LNPR (lembaga non-profit pelayanan rumah tangga) di kisaran 5-5,5 persen, konsumsi pemerintah 7,6-7,9 persen, PMTB 6,4 persen - 8,3 persen, ekspor 10,5-12 persen, dan impor 9,5 persen-14 persen. "Baik dari konsumsi rumah tangga dan semuanya itu akan ada perbaikan sehingga secara tahunan (yoy) diperkirakan (ekonomi) tahun 2021 forecast adalah 4,5-5,3 persen," tandas Airlangga.

Jadi, apa yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi memang berasal dari masukan jajaran pemerintahan berdasarkan analisis yang memiliki landasan ilmiah. Toh masih terlalu banyak yang kurang hirau dengan angka-angka.

Itulah sebabnya Presiden mengaitkannya dengan faktor psikologi: Persepsi dan perasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Masih perlu waktu hingga awal Juli 2021 untuk melihatnya. Ini memang pertarungan. ●



JOKOWI DAN HATI-HATI ITU

Bukan kebetulan jika belakangan ini Presiden Joko Widodo kerap mengucapkan kata "hati-hati" dalam pidato lisannya. Mungkin juga untuk menghindari slip of tongue atau salah ucap semisal Provinsi Padang atau Bipang Ambawang.

Namun, jika ditelusuri, pilihan hati-hati itu sudah tampak sebelum salah ucap Provinsi Padang dan Bipang Ambawang. Dalam pidato sambutan di acara Pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021, Jumat 26 Maret 2021, misalnya, Presiden mengucapkan sekurangnya tujuh kata hati-hati.

Salah satunya, "... Tapi --ini yang juga perlu saya ingatkan-- tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada. Dan juga (ada) aktivitas ekonomi yang harus kita gerakkan. Hati-hati (terhadap) risiko penyebaran Covid-19."

Sedangkan dalam pengarahannya kepada Forkopimda se-Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Kamis, 20 Mei 2021, tak kurang dari 17 kali Presiden mengucapkan kata hati-hati. "... Kita tahu ancaman Covid-19 sampai saat ini belum berakhir. Bahkan, di beberapa negara kembali naik secara eksponensial. Hati-hati sekali lagi, kita harus waspada. Ini hati-hati, saya ingatkan hati-hati, jangan lengah. Hati-hati, harus waspada terus. Jangan lengah, jangan menunggu chaos baru kita bertindak. Sudah terlambat, hati-hati," ungkap Jokowi.

Dari beberapa pidatonya, kata hati-hati ini kerap menjadi pilihan mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini saat berhadapan dengan kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota. Juga kerap berkaitan dengan tarik-menarik antara pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19.

Jelas terlihat bahwa Presiden ingin kehati-hatian itu mencakup segenap

warga masyarakat hingga pelosok. Boleh jadi, itu sebabnya hati-hati kerap terucap di depan kepala daerah di semua tingkatan. Agar hati-hati itu sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Namun, untuk soal lain, Presiden Jokowi kerap menganjurkan peningkatan belanja. Dalam konteks daerah, provinsi hingga kabupaten, Presiden menekankan serapan anggaran.

"Yang perlu saya ingatkan ini juga sudah mungkin yang ketiga atau yang keempat, mengenai serapan APBD, ini masih 10,08 persen. Tolong provinsi, kabupaten dan kota percepat belanja untuk menggerakkan ekonomi. Karena kemarin sudah saya sampaikan secara nasional seluruh provinsi, kabupaten dan kota, itu yang gede baru belanja aparatur, 65 persen. Tetapi, belanja modal, belanja pembangunan itu baru lima persen," ujarnya.

Jadi, berbelanjalah di tempat masing-masing dan tetap menjaga kesehatan dengan menghindari Covid-19. "Kuncinya ada di situ," tandas Jokowi. ●



FAKTOR PENDUKUNG YANG JADI HARAPAN

Faktor dalam negeri maupun perkembangan global akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Beberapa indikator ekonomi domestik maupun global memang sedang memihak bagi pertumbuhan ekonomi nasional meskipun masih pandemi.

Geliat industri manufaktur menjadi harapan pula untuk mencapai pertumbuhan tujuh persen pada kuartal II 2021. Malah Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan, target pertumbuhan ekonomi nasional tujuh persen pada kuartal II/2021 bisa dicapai dengan kerja keras dan didukung salah satunya oleh program vaksinasi Gotong Royong.

Vaksinasi Gotong Royong adalah program yang dibiayai secara mandiri oleh masing-masing perusahaan untuk para karyawannya. Sejauh ini, tercatat 18 perusahaan mengikuti program vaksinasi Gotong Royong yang dimulai serentak pada Selasa, 18 Mei 2021. "Dengan vaksinasi karyawan pabrik, terutama yang swasta, sektor industri ini bisa bergulir kembali lebih nyaman lebih aman lebih baik supaya

produksinya lebih maksimal," kata Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi.

Sedangkan Presiden Jokowi berharap vaksin Gotong Royong ini bisa membantu mempercepat target vaksinasi terhadap 181.500.000 penduduk demi menciptakan herd immunity. "Meskipun kita juga harus tahu bahwa mencari vaksin dan membeli vaksin itu bukan barang yang mudah karena menjadi rebutan dari 215 negara yang ada di dunia ini," kata Jokowi.

Pengadaan vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong ini dibebankan kepada perusahaan swasta, kemudian diberikan secara gratis kepada karyawan atau buruh serta keluarganya. Saat ini, kurang lebih 22.736 perusahaan sudah mendaftar dengan lebih dari 10 juta orang karyawan terdaftar.

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong

Royong akan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan vaksin. Untuk tahap awal ini, telah tersedia 420.000 dosis vaksin produksi Sinopharm, China.

"Kita harapkan nanti akan mendapatkan suplai vaksin lebih banyak. Kita berharap nantinya di bulan Agustus atau maksimal di bulan September sudah mencapai jumlah kurang lebih 70 juta yang divaksin, sehingga kita harapkan pada bulan-bulan itu kurvanya berada di bawah," ujar Jokowi.

Jokowi juga berharap ekonomi akan pulih seiring dengan gencarnya vaksinasi. "Kita tahu di Kuartal I 2021, pertumbuhan ekonomi kita di angka -0,74 persen dan kita semua berharap dengan kerja keras kita di Kuartal II, sesuai dengan target, yaitu kurang lebih tujuh persen bisa kita capai," ujarnya.

Salah satu perusahaan yang melakukan vaksinasi mandiri adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Sebanyak 6 ribu karyawan TMMIN beserta keluarga dijadwalkan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 secara bertahap dengan 3 ribu peserta di tahap pertama.

Menurut Presiden Direktur TMMIN Warih Andang Tjahjono, pemberian vaksin ini merupakan bagian dukungan TMMIN kepada pemerintah dalam upaya pemerataan vaksin COVID-19.

"Kami berterima-kasih kepada pemerintah dan Kadin yang telah mengkoordinasikan Program Vaksinasi Gotong Royong ini. Bagi Toyota Indonesia, keselamatan dan kesehatan karyawan dan keluarga merupakan hal yang utama, karenanya kami berkomitmen melaksanakan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh karyawan beserta keluarganya," kata dia.

Dalam skala makro, kesediaan kalangan industri dan swasta umumnya dalam membiayai secara mandiri vaksinasi bagi karyawan dan keluarganya adalah dukungan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tak mengherankan sejumlah ekonom juga kalangan swasta tampak optimistik dengan target pertumbuhan tujuh persen pada kuartal II 2021.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi, misalnya, memandang target pertumbuhan

ekonomi tujuh persen pada kuartal II/2021 bukanlah hal yang sulit dicapai. Menurut dia, penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini masih dari sektor konsumsi dan beberapa faktor penopang lainnya, seperti perdagangan internasional yang berarti geliat sektor industri dan jasa.

Misalnya, pada perdagangan internasional, ekspor dan impor pada Maret 2021 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, dengan masing-masingnya tercatat tumbuh 30,47 persen dan 25,73 persen secara tahunan. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh faktor low based effect.

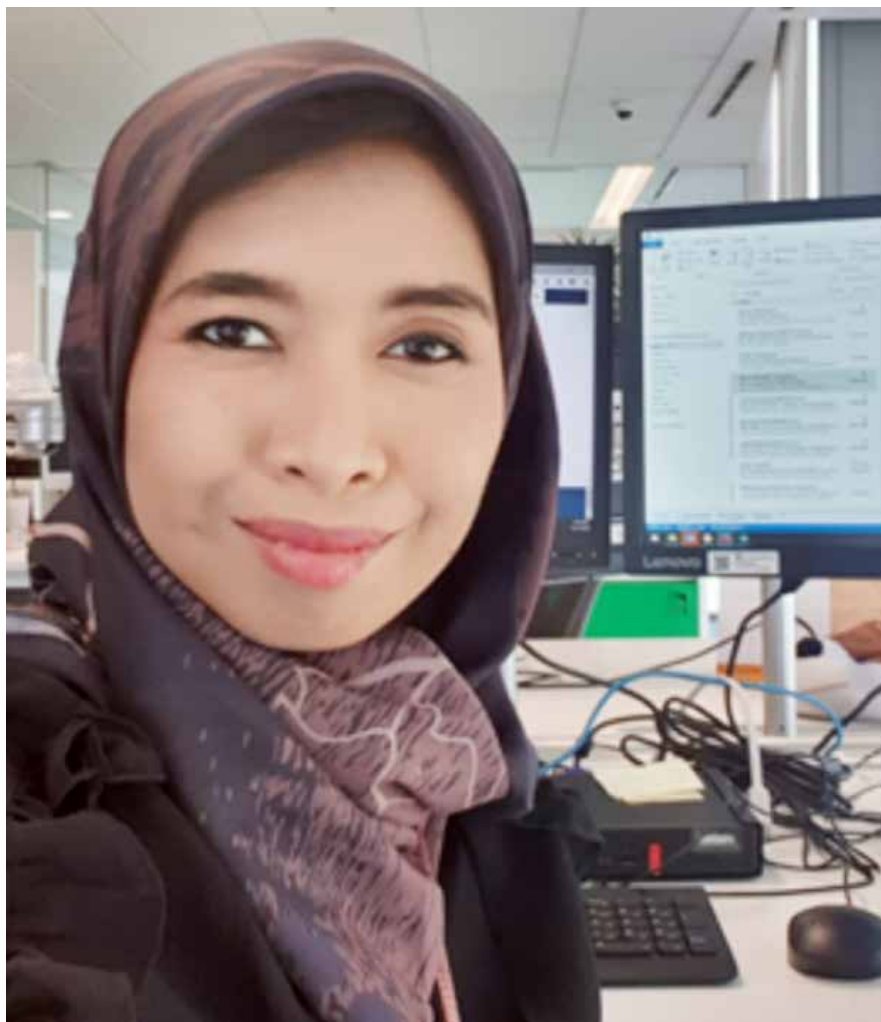
"Kalau dibandingkan kuartal I/2020 dengan kuartal I/2021, maka itu bukan hal sulit tercapai. Tapi harus tetap dijaga variabelnya, yang paling signifikan adalah konsumsi," katanya, Rabu, 19 Mei 2021.

Di bidang perdagangan internasional, Kepala Ekonom Bank Dana-

mon Wisnu Wardhana memproyeksi kinerja ekspor pada April 2021 akan meningkat sebesar 40,7 persen secara tahunan (yoy). Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh basis yang rendah pada 2020 lalu. Nilai ekspor saat itu tercatat sebesar US\$12,19 miliar atau turun 7,02 persen secara tahunan.

Selain itu, peningkatan nilai ekspor juga dipengaruhi oleh harga komoditas yang meningkat tinggi dalam beberapa bulan terakhir. "Kami perkirakan ekspor tumbuh 40,7 persen pada April 2021 dikarenakan tingginya harga komoditas dalam beberapa bulan terakhir dibandingkan dengan tahun lalu, juga efek dari basis yang juga rendah pada tahun lalu," katanya Jumat, 14 Mei 2021.

Meski demikian, Wisnu mengatakan jika dibandingkan dengan Maret 2021, kinerja ekspor pada April 2021 diperkirakan akan mengalami pe-



Head of Macroeconomic & Market Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina.

• INFO UTAMA

nurunan sebesar 6,7 persen (month-to-month/mtm). Hal ini dipengaruhi oleh PMI manufaktur di negara mitra dagang utama Indonesia melambat pada periode April, terutama di China dan Amerika Serikat. "Penurunan juga memperhitungkan kemungkinan permintaan yang lebih rendah dari India," jelas Wisnu.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik

yang signifikan tersebut didorong oleh peningkatan permintaan di berbagai negara dan naiknya harga komoditas. Kenaikan pun terjadi baik pada ekspor migas maupun nonmigas.

Sedangkan sektor konsumsi yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia juga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tercermin dari peningkatan indeks

didorong oleh belanja masyarakat kelas menengah atas.

IKK hingga April 2021 juga cenderung stabil di atas 100 sehingga menambah optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia (BI) melalui Survei Konsumen menilai keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi melanjutkan tren perbaikan. Malah IKK kembali masuk ke zona optimistik.

Hasil survei BI menyebutkan, IKK April 2021 sebesar 101,5 yang masuk ke zona optimis, karena sudah berada di atas 100, meningkat dibandingkan 93,4 pada Maret 2021. "IKK April 2021 juga merupakan angka optimisme pertama kali sejak IKK masuk zona pesimis pada April 2020," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Senin 10 Mei 2021.

Toh, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini terpancang masih berada di zona pesimistis meski terus membaik, dimana pada April 2021 indeks kondisi ekonomi (IKE) tercatat sebesar 80,3 dari sebelumnya 72,6. Namun Erwin menjelaskan, keyakinan konsumen terpantau membaik pada seluruh kategori tingkat pengeluaran responden, tingkat pendidikan, dan kelompok usia responden.

Secara spasial, keyakinan konsumen membaik di seluruh kota yang disurvei khususnya di kota Padang, diikuti oleh Bandung dan Pangkal Pinang. Berdasarkan hasil survei BI, peningkatan optimisme konsumen pada April 2021 didorong oleh membaiknya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yaitu terhadap aspek ketersediaan lapangan kerja, ekspansi kegiatan usaha yang meningkat, dan penghasilan yang meningkat pada enam bulan yang akan datang.

"Sementara itu, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini terpancang membaik, didorong oleh perbaikan persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja, penghasilan, dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama," ucap Erwin.

Sedangkan ekonom Fithra Faisal menjelaskan, sepanjang 2020 kelas menengah atas menahan uangnya, membeli emas, atau masuk ke pasar



Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David E Sumual.



Presiden Direktur TMMIN Warih Andang Tjahjono.

(BPS) mencatat ekspor pada Maret 2021 mencapai US\$18,35 miliar, meningkat tinggi baik secara tahunan sebesar 30,47 persen maupun secara bulanan 20,31 persen. Pertumbuhan

keyakinan konsumen. IKK pada Februari 2021 tercatat telah kembali ke jalur optimis, yaitu sebesar 101,5. Tren tersebut membaik jika dibandingkan dengan 2020 lalu. Hal ini tentunya juga

saham, tapi tidak belanja di sektor riil. "Ini tercermin dari DPK (dana pihak ketiga) di perbankan yang naik hingga dua digit," ungkapnya.

Namun memasuki 2021, sejumlah faktor mendorong angka belanja konsumsi. Antara lain perbaikan kinerja di sektor ritel, peningkatan penjualan mobil sebagai dampak dari relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM), serta belanja yang meningkat saat periode Ramadan dan Idul Fitri.

Optimisme serupa datang dari Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David E Sumual. Dia bilang, kontraksi ekonomi pada kuartal kedua tahun lalu sangat dalam, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi yang moderat pada kuartal ini akan terasa signifikan.

"Dengan tren pertumbuhan ekonomi awal tahun yang bagus, pertumbuhan ekonomi lima persen pada kuartal kedua sudah di tangan. Dengan sedikit dorongan kinerja ekonomi pada periode puasa lebaran dan sisa kuartal ini, target tujuh persen masih sangat relevan," ujarnya Senin, 17 Mei 2021.

Menurut David, IKK memang menjadi faktor utama kinerja ekonomi. Meski pemerintah memberlakukan larangan mudik dan pembatasan sosial, masyarakat masih menemukan cara untuk meningkatkan mobilitasnya. "Bahkan tren belanja online saat ini juga mendorong masyarakat tetap berbelanja meski mobilitas terbatas. Ini justru menjadi modal tren kinerja ekonomi ke depan," sambungnya.

Sedangkan Head of Macroeconomic & Market Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan, beberapa faktor pendukung pertumbuhan berasal dari belanja pemerintah yang memang sudah menjadi salah satu pendorong utama yang positif pada PDB kuartal I/2021. Perinciannya, belanja modal pemerintah cukup meningkat signifikan untuk proyek infrastruktur yang sempat tertunda di 2020.

Selain itu, belanja untuk anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang satunya membiayai pembelian vaksin, juga ikut berpotensi mendorong pertumbuhan positif di kuartal II/2021. Menurut Dian, program vaksinasi yang relatif on-track dapat men-

dukung prospek pemulihan ekonomi ke depan.

Dengan faktor-faktor pendukung itu, Bank Mandiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II/2021 dapat tembus di atas 6 persen. Perkiraan tersebut tidak jauh dari target pemerintah yang menargetkan pertumbuhan pada periode April-Juni 2021 ini akan mencapai tujuh persen.

kat baik dari kalangan swasta maupun pemerintah. Dampak belanja yang meningkat adalah bergeraknya kembali rentetan kegiatan ekonomi dari sektor hulu dan hilir hingga ke tingkat rumah tangga.

Sedangkan faktor luar negeri dan global yang mendukung adalah kenaikan sejumlah harga komoditas ekspor yang mendorong penjualan produk



Kepala Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardhana.



Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi.

Jadi, faktor dalam negeri yang mendukung bagi upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi periode April-Juni atau triwulan 2021 adalah kecenderungan belanja yang mening-

ke luar negeri. Sebenarnya sama saja, kecenderungan belanja produk Indonesia di lingkungan pasar global juga menguat. Kita akan lihat kenyataannya bersama-sama pada awal Juli 2021. •



CELAH RAWAN KENDALA PERTUMBUHAN

Sejumlah celah rawan teridentifikasi dapat menjadi kendala upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi periode April Juni atau triwulan II 2021. Jika celah itu dapat teratasi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil hingga akhir 2021 dapat menjadi optimisme berikutnya.

Tanda-tanda perekonomian memang sebenarnya sudah terlihat usai terpuruknya ekonomi triwulan II atau April-Juni 2020. Pada masa awal pandemi itu, pertumbuhan merosot tajam hingga minus 5,32 persen dibandingkan dengan angka pada periode yang sama tahun 2019. Namun, pada Triwulan III dan IV 2021, perbaikan mulai terlihat dengan pertumbuhan tinggal minus 3,49 persen dan minus 2,19 persen.

Dalam hal ini, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan ekonomi sebenarnya punya modal untuk tumbuh positif pada kuartal II 2021. Hal ini bisa dihitung secara teknis berdasarkan produk domestik

bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK).

Tauhid menjelaskan PDB ADHK kuartal I 2021 sudah lebih tinggi dari posisi PDB ADHK kuartal II 2020. Tercatat, PDB ADHK kuartal II 2020 sebesar Rp2.589 triliun, sedangkan PDB ADHK kuartal I 2021 sebesar Rp2.683,1 triliun.

"Jika dibandingkan, antara kuartal II 2020 dengan kuartal I 2021 itu 3,6 persen. Jadi ekonomi punya modal 3,6 persen. Begitu hitung-hitungannya," ungkap Tauhid, Rabu, 5 Mei 2021.

Dengan modal 3,6 persen, lanjutnya, maka perlu tambahan 3,4 persen lagi agar ekonomi Indonesia bisa tembus tujuh persen sesuai dengan target pemerintah Jokowi pada kuartal II 2021 nanti. Syarat untuk menam-

bah 3,4 persen itu, kata dia, PDB ADHK kuartal II 2021 harus naik signifikan dari posisi kuartal I 2021.

"Situasi ini akan bergantung dengan dinamika kasus Covid-19. Perkembangan penularan covid-19 akan berpengaruh pada pola belanja. Semakin turun jumlah penularannya, maka masyarakat khususnya kelas menengah atas tak ragu lagi untuk membelanjakan uangnya," kata dia.

Kendalanya, kata Tauhid, sejauh ini rata-rata kenaikan PDB ADHK per kuartal hanya dua persen. "Sementara, kalau dilihat secara fundamental, daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya," kata dia.

Senada dengan itu, kolega Tauhid di Indef, ekonom Bhima Yudhistira, menilai rangsangan atau stimulus agar masyarakat berbelanja masih kurang. Salah satunya belanja pemerintah yang menggerakkan ekonomi masyarakat terutama di daerah juga masih minim.

"Belanja pemerintah sebagai komponen penting dalam pemulihan ekonomi belum menunjukkan performa yang sesuai ekspektasi di kuartal ke II. Hingga April 2021, serapan anggaran PEN baru mencapai 19,2 persen dari total Rp 699 triliun," ungkapnya, Rabu, 19 Mei 2021

Di daerah, sambungnya, pemerintah lokal masih lambat menyerap anggaran dan cenderung jor-joran di akhir tahun. Ia mengingatkan bahwa ada Rp 182 triliun dana pemda yang mengendap di perbankan. Padahal, selama larangan mudik, pemulihan ekonomi cenderung timpang antara kota besar dan desa.

Sebagai perbandingan, kawasan metro yang meliputi Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), mendapat stimulus berupa pembayaran tunjangan hari raya bagi kalangan swasta. Namun, kali ini dananya tak mengalir ke daerah lantaran kendala larangan mudik, "padahal, biasanya uang banyak mengalir ke daerah dalam bentuk belanja selama perjalanan mudik, akomodasi dan sektor makanan minuman," kata Bhima.

Jadi, sambungnya, agar pertumbuhan di daerah juga relatif merata, maka peran percepatan serapan anggaran

menjadi penting. "Jangan ditumpuk di akhir tahun karena situasi sekarang masih butuh stimulus pasca lebaran," kata Bhima.

Selain mempercepat serapan anggaran, Bhima menyarankan penerapan sanksi berat kepada pemerintah daerah yang menahan dana di bank. Tambahannya, naikan alokasi per-

ganan covid19 tetap penting sebab kunci kepercayaan konsumen adalah penurunan kasus harian disertai dengan pulihnya mobilitas penduduk," tandasnya.

Sedangkan ekonom yang menjadi profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Carunia Mulya Firdausy, menekankan perlu-



lindungan sosial seperti perluasan subsidi upah ke pekerja sektor informal.

Namun, faktor Covid-19 tetap harus menjadi perhatian. "Untuk penan-

nya realisasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang benar-benar mampu meningkatkan konsumsi masyarakat, menarik investasi dan meningkatkan ekspor di tengah-tengah pandemi

Covid-19. "Tantangannya memang penerapan kebijakan untuk meningkatkan sumber pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan," ujarnya, Jumat, 21 Mei 2021.

Untuk kebijakan dan program peningkatan konsumsi, ungkapnya, pemerintah antara lain harus mampu meyakinkan stimulus dana PEN dalam menangani kemiskinan, pengangguran dan UMKM benar-benar efektif sampai ke targetnya. Terlebih peran UMKM khususnya sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Setidaknya, kata dia, Indonesia memiliki 64,2 juta unit UMKM yang perlu pemberdayaan optimal. "Bisnis UMKM



Carunia Firdausy

ini melibatkan 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi terhadap PDB sekitar 61 persen, juga sumbangan ekspornya yang mencapai 14 persen," ujar Carunia.

Pada sisi lain, ia mengingatkan dampak Covid-19 telah membuat persentase penduduk miskin kembali mencapai dua digit (10,19 persen). Sedangkan pengangguran membengkak di atas 5,0 persen, dan ketimpangan makin melebar dengan Gini ratio 0,382.

Untuk kebijakan dan program menarik investasi, pemerintah harus meyakinkan kemampuan mengatasi berbagai tantangan masuknya investasi baik PMA dan PMDN. Alasannya, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif signifikan pada investasi asing yang masuk ke Indonesia sebesar 9,2

persen secara tahunan. Adapun realisasi PMDN hanya naik 29,3 persen dari periode sama tahun lalu.

Pada 2021, Carunia yang juga guru besar ekonomi dan bisnis di Universitas Tarumanegara ini melihat geliat pertumbuhan investasi menghadapi tantangan berat berikut ini. Pertama terkait terbatasnya modal investasi pemerintah.

Indikatornya, Badan Koordinasi Penanaman Modal memperkirakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2021 dibutuhkan dana investasi sebesar Rp 5.817,3 triliun sampai Rp 5.912,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 84,7 persen sampai



Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara

90,1 persen diharapkan dapat dipenuhi dari sumber sektor swasta, sementara sisanya sebesar 5,0 persen sampai 7,1 persen diharapkan dari sumber dana pemerintah dan sebesar 4,9 persen sampai 8,1 persen dari sumber BUMN.

Tantangan kedua, masih tingginya indeks restriksi masuknya PMA (FDI Restrictiveness Index). Mengutip data OECD per 2019, Carunia menyebut indeks restriksi masuknya PMA Indonesia sebesar 0,32. Indeks ini hanya lebih baik dibandingkan dengan Filipina (0,37), namun lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand (0,27), Malaysia (0,25), Laos (0,19), Brunei Darussalam (0,15), Vietnam (0,13), Myanmar (0,11), Singapura (0,06) dan Kamboja (0,05).

Kemudian tantangan ketiga, ting-

ginya ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia. ICOR Indonesia tahun 2020 menurut BKPM tercatat sebesar 6,8. ICOR tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam (3,7), Filipina (4,1), dan Malaysia (5,4). Artinya, dengan modal yang sama, keuntungan yang diperoleh di Indonesia masih kalah oleh negara-negara tetangga tadi. Belum lagi soal kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business-EODB). EODB score Indonesia pada tahun 2020 berada di urutan 73 dari 190 negara.

EODB skor Indonesia ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan Singapura (2), Malaysia (12), Thailand (21), Brunei Darussalam (66), and Vietnam (70). EODB ranking Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Filipina (95), Kamboja (144), Laos (154), and Myanmar (165). Dari 10 aspek skor EODB, Indonesia hanya memiliki skor kemudahan berbisnis yang relatif baik yaitu dalam melakukan kontrak bisnis (enforcing contracts) dan registrasi properti.

Sedangkan di sektor perdagangan, kebijakan dan program pemerintah harus mampu mengatasi berbagai tantangan perdagangan domestik dan internasional. "Tantangan perdagangan domestik, misalnya, menyangkut biaya logistik yang masih cukup tinggi yakni mencapai 24 persen dari PDB, padahal idealnya pada kisaran 10-14 persen," ujarnya.

Hal ini menyebabkan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat 46 dari 160 negara. Posisi Indonesia masih tertinggal dari Singapura (7), Thailand (32), Vietnam (39) dan Malaysia (41).

Tantangan perdagangan domestik lain yakni informasi, promosi dan branding. Produk unggulan Indonesia banyak yang masih belum memiliki branding yang kuat di pasar domestik dan internasional. Sehingga brand and quality oriented consumers belum tercapai. "Sebagai contoh, Indonesia yang dulu dikenal sebagai produsen kopi nomor dua di dunia, saat ini turun peringkat lima dan posisinya digantikan oleh Vietnam yang berhasil mem-branding produk kopi menjadi salah satu produk unggulan globalnya," kata dia. ●

INVESTASI ASING SULIT, MENOLEH DALAM NEGERI

Di acara Festival Joglosemar: Artisan of Java yang berpusat di Candi Borobudur, Yogyakarta, Kamis, 20 Mei 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui betapa sulitnya menarik investasi asing, sementara potensi belanja modal pemerintah di dalam negeri saja mencapai US\$ 22 miliar, hasil konversi dari Rp 300 triliun.

"Saya pakai angka dolar karena betapa susahny kita cari investasi US\$ 1 miliar saja dari luar, tetapi dari APBN kita bisa kita ambil US\$ 22 miliar setahun yang kita investasikan dalam negeri, untuk membangun produk-produk dalam negeri, dan itu juga oleh anak negeri anak-anak muda yang membuat Indonesia akan maju ke depan," katanya.

Dengan 22 miliar dolar AS setahun, lima tahun akan melampaui 100 miliar dolar. "Anda boleh cek betapa sulitnya mendapatkan US\$ 100 miliar investasi dalam lima tahun. Tetapi kita di depan mata kita sendiri ada. Jadi apa? Efisiensi dan kita harus kerja secara terintegrasi," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Luhut pun meminta setiap kementerian/lembaga bisa melakukan efisiensi dan bekerja secara terintegrasi untuk mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang digaungkan pemerintah sejak tahun lalu. Ia menegaskan, BBI jangan hanya menjadi sekedar slogan tapi harus dijalankan secara masif oleh setiap kementerian/lembaga untuk membangun Indonesia.

"Jadi efisiensi dan kita harus kerja secara terintegrasi. Saya titip untuk semua kementerian/lembaga, ayo kita

sukseskan mengenai BBI ini dengan konkret yaitu dengan membeli barang-barang buatan dalam negeri," ujarnya.

Luhut mencontohkan, saat berkunjung ke PT YPTI di Yogyakarta, banyak inovasi produk di bidang industri manufaktur seperti turbin listrik, tempat duduk mobil untuk disabilitas, ICU

Menko Luhut menyebut ada Rp 470 triliun yang bisa dibuat di dalam negeri. "Saya sampaikan pada tim coba lihat lagi sisir lagi paling rendah itu ada Rp 300 triliun satu tahun yang bisa dibuat dalam negeri yang menciptakan produk dalam negeri yang dibuat anak bangsa yang dibuat UMKM dan



ventilator, GeNose, dan lain-lain. "Ini buatan anak bangsa. Tapi masih banyak yang belum bisa masuk ke dalam e-catalog," ujar Luhut.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pro kepada produk dalam negeri. "Saya titip juga teman-teman di LKPP untuk membuat lebih terbuka. LKPP masih lebih banyak barang-barang impor yang masuk di dalam list-nya. Memang jumlah pembelian lebih besar dalam negeri, tapi angkanya itu lebih dari 5x lebih besar dari impor," kata Luhut.

yang akan kita gunakan di semua K/L," ujarnya.

Belum lagi, rentetan dampaknya dalam penyerapan tenaga kerja. "Ini akan menciptakan jutaan lapangan kerja dan juga menciptakan teknologi anak-anak bangsa yang saya ceritakan tadi. Tetapi masih banyak teman-teman yang belum melaksanakan ini. Oleh karena itu, saya lapor kepada Bapak Presiden beberapa waktu lalu perlu diaudit oleh BPKP setiap K/L berapa banyak yang menggunakan produk dalam negeri, di mana bottle-necking-nya. Sehingga kita bisa melaksanakan ini," tandasnya. •



TOTAL BEBASKAN TANGSEL DARI CORONA

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan resmi dilantik menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada 26 April 2021. Seratus hari pertama menjabat, keduanya memiliki tugas berat agar dapat membebaskan Kota Benteng dari wabah virus Corona.



Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dan
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan

Tangerang Selatan memiliki peran vital sebagai kota penyangga DKI Jakarta. Pasalnya, banyak warga Tangsel yang bekerja di Ibu Kota. Maka sudah seyogyanya, kolaborasi dan sinergitas patut dibangun Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dengan seluruh pemangku kebijakan di wilayah Jabodetabek, dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

Pada persiapan Lebaran Idulfitri 1442 Hijriah, Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan

diterima Info Indonesia pada 13 Mei 2021.

Rapat koordinasi tersebut dipaparkannya, mengenai maklumat tentang beberapa poin kebijakan di DKI Jakarta, yang dapat diselaraskan dengan kebijakan daerah penyangga seperti Tangsel.

"Prinsipnya kami dari Pemkot Tangsel, mewakili Bapak Wali Kota Benyamin Davnie, akan mengawal kebijakan yang diterapkan di wilayah Jabodetabek. Agar tidak terjadi lonjakan kasus pandemi saat Lebaran, yang bisa merugikan

urgent ya. Kayak masalah pelarangan ziarah, kalau di Tangerang Selatan itu enggak ada. Dalam kebijakan kami tidak ada. Tapi untuk pengelola makam diminta tetap membatasi dan menerapkan prokes," terang dia.

Pilar menerangkan, pada pembahasan rapat koordinasi, tidak semua daerah itu sama pemahamannya. Salah satunya adalah Kabupaten Bogor. Karena Pemkab Bogor yang dipimpin oleh Bupati Ade Yasin itu melarang Salat Id di lapangan, tapi menyarankan untuk di



Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam persiapan jelang libur Lebaran pada Senin 10 Mei 2021. (Instagram @pilarsaga_official)

bahkan mengikuti langsung rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kebijakan di Jabodetabek.

"Mewakili Pemkot Tangsel, saya mengikuti press conference yang diadakan usai Rapat Koordinasi tentang larangan mudik dan kebijakan perayaan Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah, bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," kata Pilar dalam keterangan resmi yang

masyarakat," ujar dia.

Meski demikian, pada praktiknya tidak semua kebijakan di DKI Jakarta dapat diimplementasikan juga di Tangsel. Seperti larangan ziarah kubur, Pemkot Tangsel memilih untuk tidak melarang. Sementara Anies Baswedan menutup seluruh tempat pemakaman umum pada saat momen Lebaran.

"Tapi kan itu bukan sesuatu yang

masjid.

Sebaliknya Pemprov DKI Jakarta melarang salat di masjid, tapi menyarankan Salat Id di lapangan.

"Tapi pada prinsipnya kami kabupaten atau kota sekitar DKI Jakarta ya mendukung langkah yang dilakukan Pemprov DKI," tuturnya.

Namun, sejumlah kebijakan lain seperti larangan berwisata, dan berkumpul

• INFO TANGSEL

tetap didukung oleh Pemkot Tangsel. Agar kebijakan ini optimal dijalankan Benyamin dan Davnie bahkan langsung melakukan pengawasan di lapangan.

Hal itu dilakukan agar masyarakat lebih paham, dan taat dari kebijakan yang telah dibuat bersama, demi membebaskan Tangsel dari virus Sars-CoV-2.

Pilar misalnya mengunjungi Taman Kota 1 dan Taman Kesehatan, pada Senin (17/5/2021). Hal ini dilakukan untuk memonitor aktivitas warga guna menjalankan instruksi Gubernur Banten dan Wali Kota Tangsel terkait pelarang-

di taman ini, Pilar juga memanfaatkan momentum ini melihat sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan.

Seperti bangku taman, kolam air mancur, dan sebagainya untuk didata dan segera dilakukan renovasi.

Selain itu Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie di saat bersamaan Taman Kota 2 yang terletak di Jalan Letnan Sutopo, Ciater, Kecamatan Serpong. Saat tiba di lokasi, terlihat sejumlah warga berkumpul. Dengan sigap Benyamin membubarkan pengunjung yang membludak, dan menciptakan kerumunan

pandemi ini dan taman tersebut pun masih ditutup.

"Kami juga harus mengikuti Instruksi Gubernur No. 556/901-DISPAR/2021 tentang Penutupan Sementara Destinasi Wisata Dampak Libur Hari Raya Idulfitri Tahun 2021," terangnya.

Hasilnya terlihat, selama Lebaran Idulfitri 1442 Hijriah, berdasarkan data dari Satgas COVID-19, tidak terjadi lonjakan penularan yang signifikan. Bahkan pada data 17 Mei 2021, tidak ada penambahan kasus positif di Tangerang Selatan.

Tidak hanya melakukan pembatasan,



Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Icshan mengobrol bersama pedagang di sekitar Taman Perdamaian untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan warga. (Instagram @pilarsaga_official)

an kegiatan rekreasi di destinasi wisata kota.

"Pada kesempatan ini saya memantau Taman Kota 1 dan Taman Kesehatan. Taman Kota 1 masih tetap kondisi ditutup selama pandemi COVID-19. Tidak ada satupun aktivitas di area ini," ujar Pilar.

"Jadi kegiatan kunjungan ke taman ini belum diperbolehkan hingga masa pelarangan selesai," sambung dia.

Selain memperhatikan aktivitas warga

massa.

"Maaf ya bapak, ibu, anak-anakku, yang tadi sore sedang bermain di Taman Kota 2, lalu kami bubarkan bersama Bapak Kapolres Tangsel," pinta Benyamin.

Benyamin meminta agar masyarakat dapat memahami maksudnya tersebut. Sebab, langkah pembubaran yang diambilnya itu bukan maksud mengganggu liburan, melainkan lebih karena kerumunan sudah membludak di masa

Pemkot Tangsel juga melakukan antisipasi demi mendapatkan kepastian agar penularan COVID-19 di kota yang menjadi rumah bersama itu terus menurun.

Salah satunya adalah memfasilitasi swab antigen kepada masyarakat yang melakukan mudik, sebelum masuk kembali ke Tangsel. "Itu adalah kewajiban, apalagi kalau yang bekerja di pemerintahan dengan dinas terkait harus koordinasi," ujar Pilar.

Tidak hanya untuk warga, dan apara-

tur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan pemerintah kota, seluruh anggota DPRD Tangsel juga wajib menjalankan test swab antigen sebelum kembali bekerja meski tidak melakukan mudik.

Totalitas Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dalam mengatasi pandemi ini, tidak sekadar mengikuti urgensi saja. Tapi juga menjalankan amanah untuk terus melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan Airin Rachmi Diany, selama menjabat sebagai Wali Kota Tangsel dalam kurun satu dekade terakhir.

Airin berpesan agar Benyamin dan Pilar untuk fokus mengatasi pandemi dalam masa kerja 100 hari pertama. Sebab, di masa pandemi ini dibutuhkan sosok yang mampu memahami kondisi wilayahnya.

"Tugas mengatasi pandemi ini tidak hanya di sektor kesehatan, tapi juga ekonomi," kata Airin dalam kesempatan wawancara dengan awak media.

Dapat mengatasi pandemi ucap Airin, juga secara tidak langsung membangkitkan kembali semangat masyarakat sehingga pembangunan dan penataan kota dapat terus dilakukan dengan maksimal.

"Penataan Kota Tangerang Selatan yang telah dilaksanakan selama 10 tahun ini tak boleh berhenti dan harus terus dilakukan," pesan dia.

Memang 100 hari pertama di masa kepemimpinan, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan fokus untuk menangani COVID-19. Untuk menunjang skala prioritasnya itu, Benyamin juga akan melakukan konsolidasi guna mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 tersebut.

"Saya akan konsolidasi dalam kerangka mengoperasikan APBD Kota Tangsel. Mana yang harus segera dilakukan, mana yang skala prioritas dan lain sebagainya. Semua harus dikaitkan oleh penanganan COVID-19," ucap Benyamin.

Selain penanganan, ia beserta jajarannya juga akan memfokuskan prioritasnya untuk pemulihan ekonomi, yang sebelumnya sempat drop akibat pandemi COVID-19.

"Satu hal lainnya, yaitu pemulihan ekonomi. Ini yang akan kita kerjakan bersama dengan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan," ujar Benyamin.

Di sektor pendidikan, Benyamin yang juga selama 10 tahun mendampingi Airin sebagai Wakil Wali Kota, mengaku akan lebih fokus pada tahap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan proses pembelajaran tatap muka

kan langsung oleh masyarakat.

Khusus sektor infrastruktur, pria yang akrab disapa Bang Ben ini akan menerapkan sistem padat karya.

Dimana, para tenaga kerja yang sebelumnya kehilangan pekerjaan akibat



Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie membubarkan masyarakat yang berkerumun di Taman Kota 2 di Jalan Letnan Sutopo, Ciater, Kecamatan Serpong, Tangsel, 18 Mei 2021.



Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan melakukan sidak protokol kesehatan di pusat perbelanjaan, Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangsel pada 13 Mei 2021.

yang akan dikerjakan setelah Lebaran.

Sementara itu, di sektor kesehatan, pihaknya mengaku akan meningkatkan pelayanan kesehatan agar dapat dirasa-

dampak COVID-19 akan diberdayakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk memperbanyak kegiatan padat karya di daerah. ●



PERINGATI HARI JADI KE 75, PRESTASI SUMSEL SEMAKIN MENTERENG

► HD Lindungi Warisan Adat, Budaya dan Kearifan Lokal Sumsel

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kini telah menginjak usia 75 tahun. Di usianya yang semakin matang dan di bawah kepemimpinan H.Herman Deru dan Mawardi Yahya, pembangunan Sumsel pun semakin mentereng.



Salah satunya yang sangat membanggakan adalah Provinsi Sumsel segera memiliki pelabuhan samudra yang sudah lama diimpikan. Pelabuhan Tanjung Carat ini rencananya akan dilakukan groundbreaking akhir tahun mendatang. Pelabuhan yang dihadirkan HDMY ini tak ubahnya menjadi kado istimewa bagi Sumsel di usianya yang ke-75.

Bukan hanya mampu merealisasikan pelabuhan laut dalam, sederet prestasi membangga-



kan juga ditorehkan Herman Deru dan Mawardi Yahya. Seperti di sektor pertanian, Sumsel sukses menduduki posisi lima besar sebagai daerah penghasil beras nasional sehingga dianugrahi Pin Emas oleh Kementerian Pertanian RI. Kemudian, Sumsel juga dinobatkan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik di tahun 2020 Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahkan yang terbaru, Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya juga terpilih sebagai Kepala Daerah Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik di Indonesia Tahun 2021 oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI

dan ratusan penghargaan yang diterima Sumsel dimasa kepemimpinan HDMY.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan hari jadi provinsi Sumsel tersebut ditandai dengan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumsel yang digelar di Gedung DPRD Sumsel, Selasa (18/5).

Selain rapat paripurna, ada hal berbeda yang dilakukan pada momen berharga tersebut. Dimana, pada kegiatan yang berbalut nuansa kental budaya Sumsel itu, Gubernur Sumsel H Herman Deu dan Wakil Gubernur H Mwardi Yahya juga melaunching Peraturan Daerah (Perda) tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Budaya Sumsel.

Herman Deru mengatakan, dibentuknya Perda tersebut agar budaya

Sumsel terus lestari sehingga dapat bermanfaat untuk generasi penerus.

"Ini upaya kita untuk mempertahankan dan mengembangkan kearifal lokal di Sumsel. Sejarah dan budaya tidak boleh kita lupakan, karena adanya sejarah dan budaya tersebut Sumsel bisa berkembang seperti sekarang ini," kata Herman Deru.

Dia menuturkan, salah satu yang saat ini mulai dilaksanakan adalah pembangunan ornament tanjak di setiap gerbang, gedung dan tempat lainnya yang ada di Sumsel. Hal itu dilakukan untuk memperkenalkan identitas Sumsel.

"Perda ini dibuat agar jati diri Sumsel semakin dikenal luas, sekaligus juga semakin menghidupkan dan meningkat-

kan daya tarik destinasi wisata di Sumsel ini. Salah satunya logo tanjak sudah kita laksanakan. Baik gedung baru ataupun yang telah lama berdiri kita buat ada ornament tanjaknya," terangnya.

Momen peringatan hari jadi Sumsel tersebut juga dijadikan Herman Deru sebagai langkah untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan selama ini. Termasuk melihat perkembangan Sumsel setiap tahunnya.

"Momen ini kita jadikan ajang koreksi mengenai apa saja yang sudah kita lakukan, yang sedang dilakukan dan yang belum dilakukan. Kita ingin semua program bukan hanya terencana dan terlaksana dengan baik, tapi juga berhasil guna. Artinya setiap program baik fisik maupun non fisik yang telah



diselesaikan dapat berdampak positif bagi masyarakat,” tuturnya.

Dia juga mengajak, agar semua pihak untuk terlibat dalam membangun Sumsel agar lebih baik lagi.

“Usia 75 Tahun ini bukan usia yang muda lagi. Sumsel saat ini terus berkembang. Namun perkembangan ini merupakan tugas bersama. Kemitraan harus terus dijaga untuk meneruskan cita-cita para pendahulu kita. Kita juga harus siap menerima kritik dan masukan demi Sumsel Maju Untuk Semua,” paparnya.

Untuk diketahui, rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan dan forkompinda yang ada di Sumsel. ●





► Herman Deru Launching SONGKET

APLIKASI CANGGIH DETEKSI DINI KARHUTLA PERTAMA DI INDONESIA



Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru melaunching Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu (SONGKET) Sumatera Selatan dan sekaligus Pengukuhan Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Prov Sumsel periode 2021-2026. Bertempat di Griya Agung Palembang, Jumat (7/5).

Dalam sambutannya Gubernur Herman Deru mengaku bangga Sumsel sudah mampu membuat inovasi baru untuk melakukan deteksi dini akan potensi terjadinya kebakaran hu-

tan dan lahan (Karhutla).

Dimana SONGKET merupakan aplikasi pertama yang mengaplikasikan jarak dan rute terdekat menuju titik panas atau titik api berikut dukungan sumber daya air dan Posko terdekat

di Indonesia. Aplikasi SONGKET ini digagas oleh Pemprov Sumsel, Polda Sumsel, WRI Indonesia dan Forum DAS Sumsel.

"Nama aplikasi SONGKET sengaja dibuat dengan menggunakan kearifan



lokal Sumsel, untuk pencegahan sejak dini potensi karhutla. Masyarakat juga bisa menjadi pelapor yang langsung dapat diterima oleh petugas yang ada di command center lengkap dengan live titik koordinat dan titik akses menuju lokasi. Dan lebih canggih, karena

ada 11 menu unggulan yang menjadi perbedaan dari aplikasi yang pernah ada," ujarnya.

Herman Deru juga mengatakan aplikasi SONGKET didukung oleh Server yang diberikan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia kepada Pem-

prov Sumsel, dan Aplikasi SONGKET ini sudah integrasikan dengan kamera pengintai (asap digital) bekerjasama dengan Telkom untuk dipasang pada tower BTS Telkom di Sumsel.

Dia juga berharap ke depan aplikasi SONGKET ini akan menjadi trend center bagi daerah lain yang daerahnya rawan terjadi karhutla, Sumsel menjadi penggagas aplikasi pertama yang di Indonesia.

"Mudah-mudahan aplikasi ini menjadi trend center untuk provinsi lain, ini aplikasi baru satu-satunya di Indonesia. bahkan ketika ada report dari masyarakat di lapangan si operator langsung mengetahui jarak dan rute terdekat untuk akses ini, berikut lokasi sumber air dan posko terdekat" katanya.

Sementara itu Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri melalui Direskrimsus Polda Sumsel, Kombes





Pol Anton Setiyawan dalam paparannya mengungkapkan, setidaknya ada 11 menu unggulan pada Aplikasi SONGKET. Antara lain informasi jarak terdekat ketika ada terdeteksi titik api, termasuk data eksternal berupa peta data perkebunan milik perusahaan maupun perorangan, kamera pengintai (asap digital), batas kawasan.

“Termasuk masyarakat bisa memberikan informasi kepada kita, ini kita menggunakan satelit, menggunakan juga kamera pengintai (asap digital) yang bisa zoom sampai dengan jarak 4 Kilometer. Keakurannya bisa 95 persen, ditambah lagi masyarakat yang melaporkan cakupannya lebih luas,” tambahnya.

Dilain pihak WRI Indonesia melalui Project Manager Restorasi Gambut WRI Indonesia, Almo Pradana memberikan bantuan berupa satu unit server DELL Poweredge R740, 1 unit

sistem data & informasi ekosistem gambut dan 1 unit sistem data dan informasi kehutanan kepada Pemprov Sumsel sebagai dukungan untuk program tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Herman Deru juga melantik kepengurusan Forum Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) sekaligus menyertakan Forum DAS sebagai mitra kepala daerah dalam mengawasi perusahaan-perusahaan dan oknum masyarakat yang tidak taat aturan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Turut hadir Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Eko Indra Heri, Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Danrem 044/GAPO Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji S.I.P., S.Sos, Para Bupati Walikota, FKPD Kab/Kota Se-Sumsel secara virtual, dan Para Kepala OPD Prov Sumsel. ●



KUKAR BANGKIT DARI BLANK SPOT

► Kemenkominfo Tunjuk Sebagai Percontohan Kota Cerdas

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan 47 daerah lainnya.



Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.

Daerah-daerah tersebut merupakan Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) dan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Baru dalam rangka percepatan implementasi Smart City atau Kota Cerdas.

Penandatanganan MoU antara Kemenkominfo yang diwakili Dirjen Aplikasi Informatika dengan 48 kabupaten/kota tersebut, dilakukan secara virtual, Kamis (20/5/2021), yang disaksikan langsung oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate.

Dari Pemkab Kukar sendiri, acara pen-

“Sebagai respons, pemerintah telah mencanangkan program akselerasi transformasi digital yang menasar empat sektor utama, yakni infrastruktur digital, ekonomi digital, pemerintahan digital, dan juga masyarakat digital,” kata Menkominfo.

Inisiasi tersebut, lanjutnya, dilakukan untuk meningkatkan akses dan optimalisasi penggunaan teknologi bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bagi daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), wilayah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), dan juga pengemban-

ini meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan konten dan diseminasi informasi, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan aplikasi informatika, penelitian dan pengembangan, dan pertukaran data dan informasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono mengatakan, masih ada kendala yang jadi perhatian Pemkab Kukar, yakni masih ada sekitar 23 desa di Kukar yang masuk dalam daerah blank spot. Ini tentu menjadi



(kanan-kiri) Sekda Kukar Sunggono, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, dan Kepala Diskominfo Kukar Bahteramsyah saat mengikuti penandatanganan MoU percepatan smart city, Kamis (20/5/2021).

andatanganan MoU secara virtual itu dihadiri Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono, Kepala Diskominfo Kukar Bahteramsyah, dan Kasubag Kerjasama Setkab Kukar Joni Ringgo.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan, Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan solusi berbasis digital, untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mulai dari bekerja, belajar, hingga mengakses layanan publik.

gan daerah baru seperti Ibu Kota Negara (IKN).

Tujuan besar dari seluruh upaya transformatif ini adalah, agar seluruh masyarakat Indonesia, di manapun mereka berada, mendapatkan manfaat maksimal dari perkembangan teknologi digital. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital juga akan meningkatkan relevansi untuk mengembangkan Kota Cerdas berbasis digital di Indonesia.

“Ruang Lingkup Nota Kesepahaman

pekerjaan rumah pemkab untuk segera menyelesaikannya.

Bahkan ujar Sunggono, Pemkab Kukar sudah berupaya penuh. Salah satunya berkomunikasi dengan pemerintah pusat, untuk turut membantu sehingga upaya tidak hanya dari Kukar saja, terlebih ini bisa dikatakan sebagai agenda nasional.

Pasalnya, ucap Sunggono, Program Smart City bukan hanya berkenaan dengan penanganan blank spot saja, me-



Lansekap Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

lainkan juga program terkait penataan wilayah dan penataan lingkungan.

Program smart city diharapkan terealisasi pada 2021 ini. Sehingga jaringan komunikasi memadai dapat menyentuh masyarakat sampai ke pedalaman Kukar. Kondisi saat ini tentu menjadi ironi, mengingat era digitalisasi mestinya diikuti pembangunan jaringan telekomunikasi yang memadai.

Dengan program smart city yang merupakan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat Kukar di sini dapat menikmati manfaat seluas-luasnya. "Tadi juga sudah disampaikan Menkominfo supaya masyarakat tidak

gaptek terhadap teknologi, pemerintahan, kemudian dunia usaha juga semuanya punya pemahaman yang sama tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kemajuan suatu wilayah," jelasnya.

Bahkan, ucap dia, Bupati Kukar Edi Damansyah juga sudah berkomitmen untuk menghilangkan blank spot di wilayah Kukar dengan beberapa program yang berbasis teknologi informasi ke depannya.

Sementara 23 desa yang masih mengalami blank spot sedang diupayakan komunikasinya dengan Kementerian Kominfo untuk dibantu percepatan.

Bahkan, ucap Sunggono, kementerian diminta untuk meninjau langsung wilayah-wilayah tersebut.

"Bukan hanya dana dari kita juga tapi percepatannya bisa juga dana dari kementerian. Semoga pusat bisa merespons itu," ucapnya.

Senada dengan Sekda Kukar, Kepala Diskominfo Kukar Bahteramsyah menambahkan masalah mengenai blank spot bukan berarti tidak dapat diatasi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, terutama bagi pihak penyedia layanan komunikasi dan pemerintah. Cara tersebut di antaranya bisa dilakukan dengan memperkuat sinyal atau dengan meng-



gunakan layanan VSAT.

“Memperkuat sinyal adalah pilihan yang paling banyak digunakan oleh penyedia layanan komunikasi untuk memperkuat sinyal yang ada. Cara yang dilakukan biasanya masih konvensional, yakni dengan membangun menara-menara BTS untuk mendistribusikan sinyal. Kemudian cara lainnya adalah dengan membangun kabel fiber optik. Kabel optik dinilai mampu lebih baik ketika mendistribusikan sinyal kepada pengguna,” katanya.

Desakan percepatan program smart city tak lepas dari keberadaan Kukar yang masuk sebagai kawasan IKN.

Kabupaten ini pun mesti bersiap sejak sekarang demi kelancaran program skala nasional tersebut.

Pemkab Kukar juga mempersiapkan data-data terkait infrastruktur dan sebaran wilayah tanpa jaringan telekomunikasi. Nantinya, pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet yang direncanakan juga termasuk program di kabupaten lainnya seperti Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Barat. Program itu juga disebut untuk melengkapi kebutuhan jaringan telekomunikasi dan internet bagi masyarakat IKN baru dan sekitarnya.

“Karena itu Kukar juga masuk wilayah

percontohan smart city,” ucapnya.

Rencana itupun begitu disambut baik. Mengingat Kukar yang memiliki luas 27.263 ribu meter persegi, sampai saat ini belum memiliki infrastruktur tower pemancar jaringan ideal.

Soal itu, Pemkab Kukar berusaha membenahi dalam program smart city sejak 2017. Dengan program serupa dari Kemenkominfo, diharapkan persoalan jaringan komunikasi dan internet di Kukar semakin cepat teratasi.

“Kerja sama juga dilakukan dengan pihak provider atau perusahaan telekomunikasi agar memenuhi target pembangunan jaringan,” terangnya. ●



WOW! WORK FROM BALI MULAI JULI

Bali masih mengalami kontraksi ekonomi. Kemudian muncul gagasan Work From Bali untuk mendongkrak sektor pariwisata yang menjadi urat nadi di pulau dewa-dewi mulai Juli 2021 ini.

Bukan hanya gagasan sebenarnya. Lebih dari itu, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sudah menandatangani Nota Kesepahaman

(MoU) Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali dengan Badan Usaha Milik Negara Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) pada Se-

lasa, 18 Mei 2021 lalu.

Penandatanganan MoU tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung peningkatan pariwisata Bali, melibatkan Kemenko Marves dan tujuh



Tidak hanya itu, Bali juga rencananya akan menjadi tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun ke depan. Di samping itu, implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 tahun 2021 terus digalakkan guna menindak tegas setiap bentuk pelanggaran protokol kesehatan di era pandemi.

Bali menjadi salah satu provinsi yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi Covid-19 karena Pulau Dewata selama ini bertumpu pada sektor pariwisata. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bali anjlok hingga minus 9 persen pada triwulan I 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020. "Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Odo menuturkan kebijakan WFB juga pernah dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun 2000 pasca peristiwa bom Bali. Menurut dia, kebijakan itu juga tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain.

Pemerintah pun, katanya, telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp 100 triliun. "Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum," tegas Odo.

Sedangkan Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa ada beberapa poin yang disiapkan oleh pemerintah sebelum pemberlakuan kebijakan Work From Bali. Pertama, yaitu menggenjot program vaksinasi Covid 19 di Bali. "Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) pada bulan Maret lalu meminta agar program vaksinasi di Bali diintensifkan dari 1,8 juta hingga 3 juta orang per bulan Mei untuk membentuk kekebalan imunitas sehingga provinsi ini dapat menjadi zona hijau," katanya.

Jodi mengatakan, untuk melindungi masyarakat di kawasan Bali dari penyebaran Covid-19, seluruh pengunjung baik untuk kebutuhan pekerjaan.

kementerian/lembaga di bawah koordinasinya yang akan melaksanakan program Work From Bali (Kerja dari Bali). Sedangkan tujuh kementerian itu yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Perhubungan. Tercakup pula Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Investasi/BKPM.

Sebanyak 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua telah berkoordinasi dengan ITDC. BUMN ini adalah pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves.

Kemenko Marves jelas sudah mempertimbangkan di balik kebijakan Work

From Bali (WFB) bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, di Kemenko Marves dan tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasinya. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu, mengatakan penancangan program WFB diterapkan untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal.

Peningkatan rasa percaya publik domestik ini diharapkan dapat menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yang membantu memulihkan perekonomian lokal. "Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect (dampak langsung, tidak langsung maupun induksi) bagi perekonomian lokal," ungkapnya, Jumat, 21 Mei 2021.

• INFO BALI

Keperluan lain pun wajib mengikuti persyaratan perjalanan ke Bali yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu melakukan tes swab PCR maupun rapid antigen.

nyelamatkan Bali dari keterpurukan yang panjang. WFB ini harapan industri pariwisata Bali sehingga kita bisa memenangkan situasi," jelasnya dalam Konferensi Pers, Sabtu, 22 Mei



Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Ida Bagus Agung mengatakan asosiasinya terdiri dari 10 stakeholder pelaku industri pariwisata di Bali. WFB dapat menyelamatkan pelaku bisnis di Bali dari keterpurukan.

"Inisiasi dari Kemenko Marves sangat baik, dimana berupaya me-

2021.

Saat ini banyak pelaku usaha di Bali hanya bisa pasrah menunggu keadaan membaik. Dari catatan Bank Indonesia tingkat kunjungan wisatawan dalam maupun luar negeri turun drastis sepanjang pandemi. Padahal ekonomi Bali sangat tergantung pada industri

pariwisata.

Ida mengatakan adanya WFB ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan Bali dibanding provinsi lainnya. Melihat pertumbuhan ekonomi di Bali menjadi yang paling rendah minus sembilan persen

Dari presentasi Bank Indonesia pada kesempatan yang sama, pertumbuhan ekonomi di Q1 2021 Bali, Nusa Tenggara (BALINUSRA) juga masih - 5,15 persen, Jawa - 0,83 persen, Sumatera - 0,86 persen, dan Sulawesi Maluku Papua (SULAMPUPA) tumbuh 3,26 persen.

Jumlah kunjungan wisatawan pun turun drastis. Hingga triwulan I tahun ini turun 99 persen hanya 348 dibandingkan periode triwulan I 2021 yang tercatat 1,21 juta orang.

Sementara wisatawan domestik juga hanya 417 orang di paruh pertama 2021, turun 57,97 persen dari tahun lalu. Tingkat keterisian hotel juga hanya 11,15 persen. Kondisi pandemi saat ini membuat Bali tergantung dengan wisatawan domestik.

Pada titik ini Work From Bali menjadi alternatif. Toh ada juga yang pesimistik program bekerja dari Bali atau Work From Bali (WFB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mencapai tujuannya. Selain hanya terfokus di Bali saja, juga soal multiplier effect terhadap kebijakan tersebut belum tentu efektif.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, mengatakan dari program WFB hanya memberi manfaat kepada hotel yang bekerja sama. Sementara banyak hotel-hotel lain yang tidak menerima manfaatnya, termasuk di Bali.

Saat ini baru 16 hotel yang berada di kawasan The Nusa Dua di bawah koordinasi ITDC selaku pengelola, yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai penyedia akomodasi untuk program WFB. Rencananya program ini akan mulai pada Juli 2021 mendatang.

"Kalau ditanya program itu ada manfaatnya, tapi apa efektif? Belum tentu. Kita bicara saat ini demand hotel itu hanya segelintir hotel yang digunakan dibandingkan dengan total kamar hotel," katanya, Senin, 24 Mei 2021.

"Apa ASN yang menginap di Bali itu

akan melakukan pergerakan? Sementara demand sektor pariwisata ada jika ada pergerakan, ini juga yang akan menggerakkan sektor turunannya," katanya.

Yusran menjelaskan saat ini yang menjadi masalah pergerakan masyarakat yang masih ditekan. Sehingga demand dari kamar hotel di Bali masih sangat minim. Dari total 170 ribu kamar yang tersedia di Bali hanya terisi 10 persen atau sekitar 17 ribu kamar.

Menurut dia pelanggaran aturan lebih efektif untuk menumbuhkan demand ketimbang membiayai ASN bekerja dari Bali. Ia menilai biaya akomodasi untuk ASN yang bekerja di Bali akan besar, sehingga lebih baik anggaran itu untuk menciptakan program lain yang

“
Pemerintah juga sedang fokus mendorong pemberian permodalan dari sektor perbankan.

bisa dirasakan untuk perhotelan yang lebih luas, seperti subsidi okupansi.

“Lebih baik subsidi okupansi, sehingga semua industri bisa mendapatkan manfaat. Sekarang yang dapat hanya hotel di Nusa Dua itu. Yang lain gimana? Hotel industry sudah hampir mati semua, setengah mati juga ada. Tapi gimana bisa membantu mereka dari stimulus bukan program (WFB) itu,” jelasnya.

“Misalnya kalau memang ada anggarannya bisa alokasi ke subsidi okupansi misal potong dari anggaran DIPA masing-masing kementerian/lembaga membantu subsidi pelaku usaha di sana,” katanya.

Pendampingan dari pemerintah untuk menggerakkan sektor ekonomi di masa pandemi ini masih dibutuhkan pelaku usaha untuk bertahan. Banyak hotel yang tutup hingga dijual dari berbagai kelas. Tidak hanya hotel kecil, hotel besar juga banyak yang tutup.

“Kami belum ada data hotel yang tutup berapa, tapi rata-rata yang dijual saat ini itu sudah tutup semua. Sampai banyak di jual pada market place. (...) justru yang berat itu hotel besar, cost operational mereka sangat mahal,” jelasnya.

Dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dicanangkan pemerintah pada tahun ini juga belum terasa bagi pelaku usaha. Saat ini menurut Maulana kemungkinan masih dalam pengajuan pada program PEN 2021.



Pemerintah juga sedang fokus mendorong pemberian permodalan dari sektor perbankan. Maulana berpendirian ini juga tidak efektif melihat sektor perhotelan sangat beresiko prospeknya. Sehingga sulit dari hotel mendapat pinjaman baru dari Bank untuk membiayai operasinya.

Toh Kementerian Kelautan dan Perikanan, apalagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mulai bersiap-siap menerapkan program work from Bali. Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Smanto mengatakan saat ini pihaknya sedang mengkoordinasikan secara internal terkait penerapan work from Bali.

KKP akan memilah pegawai bagian mana saja yang bisa menerapkan kebijakan tersebut. “Koordinasi internal itu maksudnya untuk melihat mana

yang potensi bisa melakukan itu sesuai dengan asas GCG (Good Corporate Governance),” ujar Doni, Kamis, 20 Mei 2021.

Sedangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tampak lebih siap. Kementerian di bawah kendali Sandiaga Salahuddin Uno ini mengusulkan program itu digelar sampai akhir tahun dan akan diikuti oleh 25 persen PNS secara bergantian.

“Kami usulkan karena yang work from office (bekerja dari kantor) 50 persen, kalau bisa dibagi, 25 persen

WFO dan 25 persen work from Bali. Dengan memaksimalkan bujet yang ada, setidaknya ini membantu meningkatkan occupancy rate hotel di Bali,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Vinsensus Jemadu dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Sabtu, 22 Mei 2021.

Vinsensus menyebut Kementerian akan menyusun ketentuan bagi PNS yang mengikuti program bekerja dari Bali. Misalnya, keluarga tidak dapat diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas. Ia menjamin Kementerian dapat melakukan pengawasan dengan baik.

Rasa-rasanya koq seperti digital nomaden tourism tingkat lokal ini. Kita lihat bagaimana pelaksanaannya pada Juli 2021 ini. ●



DINAMIKA DI KANDANG BANTENG

Dalam jagat politik Indonesia, Jawa Tengah (Jateng) adalah kandang banteng. Di kandang itu belakangan menyeruak dinamika yang layak menjadi perhatian.

Pada susunan acara saat Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengunjungi Semarang, Jawa Tengah itu, tertulis jelas Kepala Daerah & Wakil Kader Se-Jateng (Kecuali Gubernur). Jelas sudah kehadiran Gubernur Ganjar Pranowo yang merupakan kader lama PDIP memang tak diharapkan ketika Puan berkunjung ke ibu kota provinsi yang dikenal sebagai kandang banteng ini.

Ganjar sendiri mengaku tak diundang pada acara Pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jateng atau Panti Marhaen, Kota Semarang, Sabtu, 22 Mei 2021 itu. Sementara para bu-

pati/wali kota di Jateng dari PDIP diundang pada acara yang dihadiri Ketua DPP PDIP Puan Maharani itu.

"Iya (tidak diundang)," kata Ganjar melalui pesan singkat, Minggu, 23 Mei 2021. Maka berlangsunglah acara Pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di Panti Marhaen dengan kehadiran sejumlah kepala daerah di Jateng. Termasuk Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan pada malam harinya, berlangsung Malam Penghargaan Karya Pemuda Indonesia Berkepribadian dalam Kebudayaan serta pergelaran wayang kulit.

Tapi, ya itu tadi, rangkaian acara itu

tentu tanpa kehadiran Gubernur Ganjar. "Kecuali Gubernur" itu jelas terkait dengan Ganjar yang absen di acara dengan kehadiran Puan Maharani.

Dalam susunan acara itu tertulis acara antara lain berisi laporan Ketua Panitia Agustina Wilujeng. Selanjutnya sambutan Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto kemudian acara inti ketiga yakni arahan dari Puan Maharani.

Sedangkan saat menyampaikan pengarahan kepada para kader di Panti Marhaen itu, Puan Maharani mengatakan DPD PDIP Jateng berkali-kali menjadi penentu kemenangan di pemilihan legislatif (pileg) ataupun Pemilihan Presiden (Pilpres). Dengan kata lain, Puan mengakui Jateng seba-



gai kandang banteng.

Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini kemudian mengemukakan pandangannya terkait sosok seperti apa yang dibutuhkan ke depan. "Pemimpin itu, menurut saya, ke depan (yakni) yang memang ada di lapangan, bukan hanya di sosmed (media sosial).

Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya, yang mendukungnya di lapangan. Medsos dan media perlu, tetapi bukan itu saja, memang nyata kerjanya di lapangan," ujar Puan.

Puan menambahkan, kendati pihaknya terlihat diam-diam saja, tetapi sebenarnya siap. Toh menurut dia, partai harus tegak lurus pada aturan dan apa yang diperintahkan jika sudah waktunya. "... Dan, saya yakin bahwa Bapak-bapak Ibu-ibu semua ini sebagai satu keluarga PDI Perjuangan pasti akan ikut dengan arahan yang akan diputuskan pada saatnya," kata Puan di hadapan para kader.

Bambang Wuryanto juga menyam-

paikan sambutan di acara itu. Nah, usai acara, ia mengkonfirmasi Gubernur Ganjar memang sengaja tak diundang.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, aja keminter (kalau kamu pintar, jangan bersikap sok pintar)," tegas Bambang Wuryanto yang dikenal pula sebagai Bambang Pacul.

Pernyataan Bambang ditegaskan dalam siaran pers yang dibagikan PDIP. Bunyinya antara lain, DPD PDI Perjuangan sudah memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik. Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait Pilpres 2024.

Saat ditanya apakah Ganjar sudah menyatakan terang-terangan akan mencalonkan diri sebagai presiden atau nyapres, Bambang menuturkan, "Kalau dia menjawab, 'saya kan tidak mengatakan mau nyapres', ya, kalau bicaranya pada tingkat ranting partai, ya, silakan. Tapi kalau dengan orang politik, ya, pasti sudah paham arahnya

ke mana," sambungnya.

Tapi, rupanya Ganjar malah menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta. Mengaku berangkat dari Semarang pada Jumat, 21 Mei 2021, ia menegaskan menemui Megawati dalam rangka silaturahmi Lebaran.

"Silaturahmi, halal bihalal. Sama nganterin lukisan tentang keceriaan anak-anak," jelas Ganjar. Selain silaturahmi, Ganjar secara khusus juga memberikan lukisan karya seniman Djoko Susilo.

"Bu Mega bilang 'saya ingin melihat masa depan anak-anak khususnya perempuan yang menatap Indonesia dengan mata berbinar-binar dengan senyum lebar' jadilah lukisan itu. Dan saya antar sekaligus halal bihalal," ujarnya.

Hmmm. perempuan yang menatap Indonesia dengan mata berbinar-binar dan senyum lebar. Sebagaimana kata Bambang Pacul, kalau dengan orang politik, apakah kalimat Bu Mega yang dikutip Ganjar itu jelas arahnya? •



► Selamatkan Siti dan Sudin Dari Perdagangan Ilegal

JAGA SATWA LANGKA, KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

Orangutan, Siti dan Sudin bernasib baik selamat dari perdagangan ilegal. Kini keduanya harus menjalani tahap rehabilitasi pada sekolah Orangutan yang ada Kabupaten Tanjungabung Barat, Jambi.

Nantinya sepasang Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) ini akan dilepasliarkan ke habitatnya di Taman Nasional Bukit Tigapuluh, di Provinsi Jambi beberapa tahun ke depan.

Siti dan Sudin berhasil diselamatkan dari aksi penyelundupan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung oleh kepolisian dan tim satwa setempat dari salah satu bus yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa pada 24 April 2021 lalu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi pada Kamis 20 Mei 2021, telah menerima dua ekor satwa

Rahmad Saleh.

BKSDA Jambi bersama Frankfurt Zoological Society (FZS) sebagai pengelola sekolah Orangutan di Jambi tersebut bekerja sama dalam proses rehabilitasi Siti dan Sudin. Sebab dibutuhkan waktu dua bulan untuk sekadar melakukan cek kesehatan, sebelum masuk ke sekolah Orangutan sebagai wadah dalam menempa diri mereka agar bisa belajar hidup di habitat yang sebenarnya.

Rahmad mengatakan, untuk sementara ini BKSDA Jambi dan FZS akan merawat mereka melalui tahapan pemerik-

tatnya pada Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Jambi,” kata Rahmad Saleh.

Perlu waktu yang cukup panjang dalam perjalanan hidup Siti dan Sudin agar bisa mandiri hidup di alam liar aslinya. Maka untuk itu perlu dukungan semua pihak agar kedua satwa dilindungi ini bisa cepat belajar mandiri hidup di alam aslinya.

Dukungan pemerintah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah menyetujui untuk melakukan pemind-



Menteri LHK, Siti Nurbaya, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong saat mengunjungi Kota Dumai, Provinsi Riau, 10 April 2021.

langkah itu untuk direhabilitasi.

“Kami baru saja menerima dua ekor atau sepasang Orangutan dari Lampung dan akan disekolahkan lebih dahulu sebelum dilepasliarkan di alamnya di Provinsi Jambi. Selama beberapa tahun ini kedua Orangutan yang dinamai Siti dan Sudin akan menjalani rehabilitasi dan sekolah Orangutan di Danau Alo,” kata Kepala BKSDA Jambi,

saan kesehatannya. Sebelum keduanya dibawa ke sekolah Orangutan dan belajar tentang alam liar di sana yang akan didampingi oleh penjaga di sana.

“Butuh waktu sekitar lima tahun lagi, sesuai dengan usianya saat ini baru satu tahun lebih, untuk harus tetap belajar di sekolah Orangutan hingga mereka bisa mandiri sebelum mereka berdua dilepasliarkan ke hidup di habi-

lahan dua ekor Siti dan Sudin dari Lampung ke Jambi.

Bertempat di Kantor Balai KSDA Jambi, penyerahan dilakukan Kepala Balai KSDA Bengkulu kepada Kepala BKSDA Jambi yang disaksikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Polres Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Balai Karan-

• INFO LINGKUNGAN

tina Kelas I Bandar Lampung, FZS, dan Jakarta Animal Aid Network (JAAN).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya didampingi Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno, beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan kerja ke Lampung. Hal ini dimaksudkan Menteri Siti

DPR, Sudin yang datang langsung ke SWC JAAN dan memberikan dukungan dan memantau penyelamatan dan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

"Orangutan merupakan salah satu mamalia besar di dunia selain gajah, badak dan harimau yang hidup di Indonesia, ditambah komodo dan anoa.

ukuran keberhasilan pembangunan di Indonesia, ini yang kita jaga," jelas Menteri Siti.

Dirjen KSDAE, Wiratno menambahkan, Orangutan sebenarnya adalah satwa yang dapat merehabilitasi hutan. Jangkauan jelajah Orangutan adalah seluas 5 km persegi. Sepanjang jelajahnya tersebut, Orangutan memakan



Menteri LHK Siti Nurbaya dan Direktur Eksekutif UN-Environment Erik Solheim saat mendapat cenderamata dari pengelola BOSF Nyaru Menteng.

untuk meninjau langsung upaya proses penegakan hukum, serta memberikan penghargaan kepada para pihak yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan orangutan tersebut.

Oleh Menteri Siti, kedua Orangutan ini diberikan nama Siti untuk betina, dan Sudin untuk yang jantan. Nama Siti sebagai penghargaan kepada Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya, sedangkan nama Sudin diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Ketua Komisi IV

Kita menyebutnya sebagai Flagship Species. Pada dasarnya terdapat 25 spesies prioritas yang kita perhatikan, termasuk bagaimana caranya agar populasinya di alam dapat kita tingkatkan," ungkap Menteri Siti.

Dia kemudian menjelaskan bahwa keberadaan satwa seperti Orangutan dan sebagainya, sangat penting sebagai indikator keberhasilan pembangunan di Indonesia. "Terjaganya satwa-satwa dalam habitatnya menjadi

buah-buahan dan biji yang dibuangnya dapat menumbuhkan pohon baru.

"Orangutan itu satwa kebanggaan kita. Kejahatan perdagangan satwa liar sangat memprihatinkan. Kita akan terus menguatkan kerja sama dengan kepolisian dan pihak-pihak lain untuk memberantas kejahatan luar biasa ini," terang Wiratno.

Menurut data dari Ditjen KSDAE, selama periode Maret-April 2021, telah terdapat setidaknya 4 (empat) kasus

terkait perdagangan dan kepemilikan ilegal satwa orngutan. Dalam kurun waktu 2 bulan tersebut, telah dilakukan penyelamatan terhadap 6 individu orngutan yang usianya berkisar 1-4 tahun (anakan).

Penghargaan ini merupakan tanda bahwa Kementerian LHK memberikan perhatian bagi pihak-pihak yang turut

atas dukungan dan kerja sama yang baik kepada seluruh pihak atau institusi serta seluruh masyarakat yang telah berhasil menyelamatkan salah satu satwa langka Indonesia ini. Dan sangat mendukung untuk rehabilitasinya dilakukan di kandang Orngutan FZS yang ada di Jambi dengan sarana dan prasarana atau fasilitas yang lebih me-

seperti apa yang dapat dimakan, dan terkadang bagaimana cara membuka buah dengan kulit yang keras," kata Donal.

Orngutan Sumatera (*Pongo abelli*) adalah spesies terlangka. Mereka hidup dan endemik di Sumatera. Badan konservasi dunia The International Union for Conservation of Natzre



Sepasang Orngutan bernama Siti dan Sudin yang akan direhabilitasi sebelum dilepasliarkan di Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Jambi.

bekerja secara nyata untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Menteri Siti berharap, penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi para pihak penegak hukum serta para penggiat lingkungan di Indonesia, khususnya di wilayah Lampung, untuk semakin waspada dengan penyelundupan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

Kepala Balai KSDA Bengkulu Donal Hutasoit, mengucapkan terima kasih

madai.

Dua individu Orngutan ini masih belia sehingga perlu dilatih secara intensif untuk beradaptasi dan bersosialisasi hingga dinyatakan layak secara medis dan perilaku untuk dilepasliarkan di habitat alamnya.

"Mereka harus mampu belajar mencari makan sendiri di hutan, termasuk mencari sarang rayap, hingga membuat sarang di pohon, serta belajar menemukan pohon berbuah, buah

(IUCN), memasukan Orngutan dalam status kritis.

Sedangkan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) memasukan satwa ini ke dalam appendix I.

Semoga Siti dan Sudin bisa 'sekolah' dengan baik agar nantinya kembali ke alam liar habitatnya untuk bisa berkembangbiak agar tetap lestari sehingga kita semua masih bisa melihat mereka hidup di alamnya. •



► Jalan Sufisme Yenny Wahid

BIKIN TENANG DI MASA PANDEMI

Perempuan adalah makhluk Allah yang berpotensi untuk menapaki jalan sufisme. Musababnya menurut Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid adalah karena perempuan pada dasarnya merupakan makhluk yang penuh dengan pengabdian.





Di dalam Islam, terang dia pengembaraan manusia untuk menuju Tuhannya tidak dibatasi oleh gender. Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan punya kesempatan yang sama untuk menghamba kepada Tuhan.

Bahkan Yenny menyebut bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang sangat emansipatoris. Di dalamnya kerap disebutkan, laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk menuju Allah tanpa pembeda sedikit pun. Sebab yang membedakan hanya kadar ketakwaannya saja.

"Jadi, Islam sungguh mengajarkan soal kesetaraan gender, dan itu banyak di dalam Al-Quran. Misalnya Al-Ahzab ayat 35. Ini adalah ayat yang jelas-jelas menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu setara," tegas putri ketiga KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

"Orang-orang yang mau puasa, yang gemar bersedekah, orang yang suka berdzikir, itu semua punya hak sama di mata Allah yaitu akan diberikan ampunan, kepada mereka semua. Dari sini jelas bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci emansipatif. Tidak ada pembedaan kalau semua orang ingin melaksana-

kan segala hal yang bisa membawanya menuju Allah," sambung Yenny.

Dari pemaknaannya terhadap ayat tersebut, Yenny menyimpulkan bahwa, tasawuf sebenarnya memberikan jalan kepada perempuan untuk bisa mendapatkan sebuah momentum aktualisasi diri. Namun aktualisasi diri itu dilakukan dalam semangat ketuhanan.

"(Tasawuf) ini yang saya lihat terutama dari kalangan bu nyai, yang sebetulnya punya karimah dan masyarakat m e n - gakuinya.

Masyarakat datang kepada beliau-beliau ini, sowan untuk mendapatkan petunjuk agar bisa tetap berada dalam jalan yang benar," tutur Yenny.

Jalan sufisme juga sangat dibutuhkan di masa-masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Sebab prinsip utama tasawuf adalah sebuah perjalanan menuju Allah.

"Kita kemudian mencari cara dengan mengikuti thariqah, mencari jalan dengan mengikuti riyadhah atau tirakat tertentu sebagai upaya menuju Allah. Nah dalam masa pandemi ini, sufisme menjadi jalan yang justru sangat kita butuhkan," ungkapnya.

Jalan sufisme menghendaki agar seorang salik (pejalan) memiliki kehidupan yang lebih asketik atau zuhud, sehingga memiliki ketenangan batin. Menurut Yenny, ketenangan batin itu memiliki pengaruh terhadap meningkatnya daya tahan tubuh seseorang.

"B a n - y a k orang





Yenny Wahid beribadah di Ka'bah di masa pandemi.

yang tidak pernah pergi ke mana-mana, tidak menerima tamu, dan tidak bergaul selama pandemi, tapi tetap bisa juga kena COVID-19. Itu karena stres (tekanan batin)," ungkap dia.

Tekanan batin, lanjutnya, telah diakui bisa menurunkan daya tahan tubuh. Sebaliknya, seseorang yang gemar berdzikir dan bertafakur dengan mengingat Allah, akan mengalami peningkatan kekebalan tubuh.

"Ini salah satu hal lain yang menjadi hikmah dari pandemi. Kita menjadi lebih teliti dengan hal-hal yang lebih penting, yang semula tidak pernah dibicarakan, yaitu soal ketenangan batin," jelas perempuan bernama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh ini.

Di masa pandemi, orang-orang pada hakikatnya sedang diingatkan bahwa kehidupan di dunia sangat fana. Allah berikan virus yang sangat kecil, manusia sudah tunggang-langgang, repot, dan menjadi takut melakukan banyak hal. Padahal, kata Yenny, virus itu tak kasat mata.

"Jadi momen pandemi ini adalah momentum mendekat kepada Allah, untuk

mengasihi sesama manusia, dan mengakrabi kembali keluarga kita. Tasawuf bisa diwujudkan dalam sehari-hari," katanya.

Menurut Yenny, dalam menempuh jalan sufisme, tidak semua orang bisa ikut thariqah atau memiliki kesabaran untuk melakukan dzikir di malam hari, dan riyadhah atau tirakat selama sehari-hari.

"Tapi mungkin lewat jalan seperti pandemi ini, kita bisa lebih mendekat kepada Allah dan lebih menguatkan diri kita, baik secara fisik maupun batin, agar kita semua bisa keluar dari pandemi ini dengan lebih kuat," harapnya.

Sementara itu, Pakar Tasawuf KH M Luqman Hakim menjelaskan bahwa puncak dari menjadi makrifat (mengetahui Allah) adalah ketika seseorang kembali menjadi salik. Namun jalan yang ditempuhnya tentu saja beda. Orang-orang makrifat akan menempuh jalan dengan cahaya, ampunan, dan ridha Allah.

Oleh karena itu menurut Kiai Luqman, sesuatu paling mendasar dalam dunia tasawuf adalah sebuah kerelaan. Di

benak dan hati seorang salik, harus ada kerelaan hati karena telah diciptakan Allah dengan berbagai fungsi yang memersamai. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa di dalam dunia tasawuf, Allah tidak pernah melihat atau menilai kehebatan seseorang. Tingkat kemakrifatan seseorang tidak diukur dari maqamat (kedudukan) atau keramat (kemuliaan).

"Tapi yang dinilai adalah kerelaan. Ridha atau tidak seseorang itu diposisikan Allah di posisi yang rendah. Kalau dia ridha, itu sebenarnya dia sedang melejit. Sebaliknya, jika berada di posisi tinggi tapi tidak ridha, dia hina," jelas Pengasuh Pesantren Raudhatul Muhibbin Caringin, Bogor, Jawa Barat ini.

"Ketika ada keinginan, saya ingin jadi wali misalnya, itu malah turun dia (dalam penilaian Allah). Karena ada nafsu kesenangan tersembunyi. Belum menjadi abid (hamba) yang sesungguhnya," sambung dia.

Sebab menurut Kiai Luqman, di dalam dunia tasawuf tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Karena yang ditekankan adalah soal bagaimana menjalankan kehambaan dan menegakkan hak-hak Allah secara benar.

"Jadi ada dua hal yang diburu para sufi, yakni menjadi hamba Allah yang benar dan menegakkan hak-hak ketuhanan. Jadi Allah itu punya sejumlah predikat yang tak terbatas. Nah kehambaan kita yang menegakkan ketuhanannya," papar Kiai Luqman.

Cendekiawan Muslim Haidar Bagir menyebutkan, di dalam Islam tidak ada sama sekali perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecuali kodrat biologis. Karena itu, keduanya punya kesempatan yang sama untuk mencapai ketinggian derajat di mata Allah.

"Jadi kalau ada perbedaan (antara laki-laki dan perempuan), itu hanya semata perbedaan yang bersifat biologis dan memiliki konsekuensi yang juga bersifat biologis. Tapi dalam hal-hal lain, tidak ada halangan sama sekali bagi siapa pun untuk mencapai derajat tinggi," kata Haidar.

"Kita semua punya kesempatan sama untuk mencapai ketinggian derajat dalam hal apa pun. Baik itu profesional, keilmuan, bahkan bisnis. Termasuk di dalam persoalan mencapai maqam kesufian," pungkasnya. ●

Gubernur Untuk Negeri



untuk memilih klik www.infoindonesia.id

Polling Gubernur Untuk Negeri memasuki tahap final
Mulai sekarang, kami menampilkan nama-nama yang berhasil
menduduki 10 besar pada hasil polling kedua.



Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta



Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan



Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat



Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah



Wahidin Halim
Gubernur Banten



Zulkieflimansyah
Gubernur Nusa Tenggara Barat



Isran Noor
Gubernur Kalimantan Timur



Sri Sultan Hamengkubuwana X
Gubernur D.I. Yogyakarta



Erzaldi Rosman Djohan
Gubernur Kepulauan Babel



Sutarmidji
Gubernur Kalimantan Barat



DITJEN PAS DAN PENTINGNYA BERSINERGI DENGAN MEDIA MASSA

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang penting kolaborasi Pemasyarakatan, media dan masyarakat.

Perhatian itu diwujudkan dengan menyelenggarakan Pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan, bertajuk “SABerPAS untuk Sinergi Pemasyarakatan, Media dan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Citra Positif Pemasyarakatan”. Acara ini digelar selama dua hari yakni 18-19 Mei 2021 di Hotel Grand Mercure, Kemay-

oran, Jakarta Pusat.

Dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, Ditjen PAS mengundang perwakilan dari sejumlah media massa serta Unit Pelaksana Tugas (UPT) dari kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dari sejumlah wilayah.

Selain di hari pertama meluncurkan aplikasi Sistem Analisa Berita dan Publikasi Pemasyarakatan atau yang disebut sebagai SABerPAS, Ditjen PAS juga menyelenggarakan diskusi menarik dengan mengundang narasumber Jurnalis Senior Latief Siregar dan Kriminolog Leopold Sudaryono. Hadir juga Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pemasyarakatan Heni Yu-

wono, yang dimoderatori oleh Bahrul Wijaksana.

Sejumlah media maupun UPT Ditjen PAS saling bertukar pikiran dan memberikan masing-masing perspektif, berbagai hal dibahas mulai dari segi kendala komunikasi media massa dengan UPT Ditjen PAS, maupun sebaliknya, adapun dari segi pandangan kriminolog.

Hal itu tidak lain untuk memperkuat sinergi media massa dengan seluruh UPT Ditjen PAS, sesuai dengan tema diskusi tersebut yakni "Sinergi Pemasyarakatan, Media, dan Masyarakat untuk Meningkatkan Citra Positif Pemasyarakatan".

Membuka diskusi, Sesditjen PAS Heni Yuwono pun membagikan pengalamannya bahwa betapa pentingnya bersinergi dengan media massa, seperti halnya saat ia masih menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh pada 2020 lalu. Ketika itu ia bersinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Aceh. Pengalaman itu disampaikannya lantaran menurutnya seluruh UPT Ditjen PAS harus terbuka dan bersinergi dengan media massa.

"Saya bersinergi dengan PWI Aceh karena ditemukan di lapangan beberapa UPT masih tertutup memberikan informasi kepada media," paparnya.

Ada pun pada tahun 2011 ia juga pernah bersinergi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang. Di mana ia menggelar pelatihan jurnalistik untuk penghuni lapas anak yang dike- mas khusus dalam waktu tiga bulan, hingga terwujud dalam sebuah buku.

"Pembentukan agen informasi dan publikasi pemasyarakatan, langkah Ditjen Pemasyarakatan terbuka menerima masukan kritikan. Juga supaya masyarakat mengetahui banyak hal positif sudah dilakukan UPT pusat maupun wilayah pemasyarakatan," tutur Sesditjen PAS Heni Yuwono.

Perlu Kolaborasi Positif Ditjen PAS dan Media Massa

Sementara itu, Jurnalis Senior Latief Siregar mengatakan harus ada kolaborasi positif antara Ditjen PAS sebagai institusi dengan media, yang di sisi lain munculnya berita-berita negatif dari

Ditjen PAS juga merupakan bagian dari koreksi. Sekaligus sebagai kontrol sosial media massa terhadap Ditjen PAS.

Baginya, perspektif media adalah perspektif publik sehingga apa yang menarik untuk publik maka akan menarik juga untuk media. Selain itu media juga tidak akan menyia-nyia-kan hal yang tidak menarik untuk publik khususnya dari lingkungan Ditjen PAS.

"Maka di media itu ada yang namanya layak berita, yaitu seimbang, lengkap dan ada nilai beritanya. Nilai berita ini adalah hal pertama yang terjadi atau jarang terjadi, kemudian magnitude

massa sebagai punggawa tersebarnya informasi yang layak untuk publik.

Latief juga menyoroti betapa berharga dan menariknya informasi yang bersifat human interest dari lingkungan UPT Ditjen PAS, hal ini juga dapat dimanfaatkan para humas Ditjen PAS untuk mengangkat potensi kreatifitas dan sisi kehidupan para warga binaan untuk menginspirasi masyarakat.

"Bukan kami tidak menyukai ceremony, tapi ketika kemudian yang diberikan adalah human interest saya yakin di dalam balik jeruji itu, itu semua penuh dengan unsur informasi yang



Jurnalis Senior Latief Siregar (paling kiri), Kriminolog Leopold Sudaryono, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pemasyarakatan Heni Yuwono, dan moderator Bahrul Wijaksana dalam diskusi bertajuk "Sinergi Pemasyarakatan, Media, dan Masyarakat untuk Meningkatkan Citra Positif Pemasyarakatan" di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/5/2021). (Aprilia Rahapit/Info Indonesia).

yaitu kebesaran dalam berita itu, lalu kemudian ketokohan," paparnya.

Adapun Latief juga menekankan bahwa kolaborasi positif Ditjen PAS dengan media massa sendiri yaitu dengan tidak memaksakan para pekerja media massa untuk selalu menayangkan hal-hal positif. Di sisi lain Latief juga menyarankan kepada para UPT untuk menyelenggarakan kegiatan kreatif dan layak sesuai dengan perspektif media massa, mulai dari adanya unsur keunikan, pertama kali, magnitude atau aspek besar atas informasi yang diberikan, dan lainnya.

Seiring dengan arus deras informasi melalui media sosial, Latief juga menilai bahwa tidak ada salahnya para UPT Ditjen PAS dapat memanfaatkannya, asalkan tetap menjadikan media

human interest. Artinya ada kesadaran dari kita bahwa ada sebuah gambar dan berita kehidupan manusia, maka itu akan menarik manusia pada umumnya," sambung Latief.

Punitive Sentiment Sebagai Persoalan

Ada pun Kriminolog Leopold Sudaryono menambahkan, bahwa media massa sendiri merupakan amplifier atas keresahan masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya, media massa juga merupakan amplifier kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

Di sisi lain ia menyoroti bahwa kita memiliki ada persoalan besar yaitu Punitive Sentiment, yakni kondisi alamiah masyarakat yang menghendaki hukuman dijatuhkan kepada pelaku keja-

hatan, yang disebabkan karena sistem keadilan kriminal tidak berjalan dengan semestinya.

"Punitive sentiment merupakan salah satu kondisi ekstrim dari rasa keadilan, di mana masyarakat menuntut hukuman yang seberat mungkin yang bisa dijatuhkan," papar Leopold.

"Jadi ada semangat menghukum di masyarakat, semangat menghukum ini sebenarnya dalam konteks alamiah wajar, tapi kemudian berkembang secara ekstrem di mana semangat menghukum ini luar biasa di hukum seberat-

masyarakat di Indonesia dan global yang kemudian muncul aspek humanis yang menguat.

Selanjutnya pada era Orde Baru (Orba) menurutnya sistem hukum mulai dijadikan sebagai alat politik, menjadikan masyarakat kemudian merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan, dan over kompensasi pada penghukuman.

Kemudian pada era reformasi kondisi semakin memburuk, bisa dibilang menurutnya hingga terjadi darurat narkoba, over kriminalisasi, dan pemenjaraan sebagai *primum remedium*.

tan bersama politisi berserta dengan media, untuk membentuk opini dan pandangan terkait pendengnya alternatif lain dalam pemidanaan.

Selain itu menurutnya, kelompok epistemik seperti akademisi, Civil Society Organization Officer (CSO), think tang dan lainnya yang selama ini terbuka terhadap penerapan alternatif pemidanaan dapat mengembangkan narasi pada publik melalui media, bahwa terjadi ketidakefektifan penerapan pemenjaraan dalam menghadapi semua jenis kejahatan.



Dirjen Pemasyarakatan Reynhard Silitonga beserta jajaran meresmikan aplikasi SABerPAS di Grand Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Selasa (18/5/2021). (Aprilia Rahapit/Info Indonesia).

beratnya, syukur-syukur mati di dalam (sel)," sambungnya.

Sentimen tersebut khususnya mendorong hukuman mati sangat kuat di tengah-tengah masyarakat Indonesia, Ia pun menyayangkan dengan terjadinya kondisi itu. Ia pun mengidentifikasi adanya persoalan dengan sistem peradilan pidana yang timbul dari era ke era, misalnya saja pada era hukum kolonial, sistem hukum sebagai instrumen kolonial, era pasca perang dunia II kemudian muncul konsep pe-

"Jadi semangat pemerintah reformasi kita ini sebenarnya bagus, mau menegakkan tertib hukum tetapi caranya dengan memperbanyak tindak pidana dengan menggunakan istilah kebijakan pemidanaan, padahal banyak negara tidak seperti itu ada banyak cara lain," papar Leopold, yang menambahkan bahwa kondisi itu memperkuat punitive sentiment.

Leopold menuturkan, ada pun cara menghadapi punitive sentiment adalah dengan melakukan dialog berkelanju-

la juga menyarankan untuk memperluas penelitian terkait dengan dampak pemenjaraan kepada keluarga, anak dan penularan kejahatan antar generasi. Selain itu juga diperlukan perluasan penelitian untuk menemukan potensi keadilan restoratif di tengah masyarakat di Indonesia. Menurutnya juga model keadilan restorative sangat tergantung konsepsi masyarakat tentang keadilan dan keseimbangan antara hak korban, pelaku dan masyarakat.

Kegiatan diskusi tersebut kemudian

dilanjutkan dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang terbagi ke dalam tiga kelompok, di mana perkelompoknya terdiri dari unsur pekerja media massa dan juga perwakilan dari beberapa UPT Ditjen PAS.

Adapun untuk kelompok 1 membahas terkait perspektif media dan masyarakat terhadap Pemasarakatan, kelompok 2 membahas pola hubungan dan kolaborasi antara Pemasarakatan, media dan masyarakat, dan kelompok 3 yaitu membahas pemanfaatan media digital untuk membangun citra positif Pemasarakatan.

FGD ini

menjadi wadah mengidentifikasi persoalan, dampak hingga terwujud Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disepakati antara UPT Ditjen PAS dan pihak media massa. Kegiatan itu juga menjadi moment menyenangkan di mana unsur media massa mengenal satu sama lain dengan para perwakilan UPT Ditjen PAS.

Di akhir kegiatan, Sesditjen PAS Heni Yuwono mengatakan sinergitas antara Ditjen PAS, media massa dan masyarakat semakin menguat. Terlebih kata dia, media massa juga menurutnya alat kontrol pihaknya agar tetap menjalankan tugas dengan aturan yang semestinya dilakukan.

"Mereka mengontrol kita, memberi masukan, mengkritisi itu semua adalah kewajiban masyarakat untuk mendapatkan demokrasi. Oleh karenanya kita mendukung bersama-sama dengan media massa yang mampu berkolaborasi dengan kita untuk menyuarakan informasi-informasi yang positif dan adil," tutupnya.

S e b e -
l u m n y a
d a l a m
k e g i a -

tan pertama pada Selasa (18/5/2021) dilaksanakan peluncuran aplikasi SA-BerPAS, di mana aplikasi ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan berita serta publikasi terkait Pemasarakatan.

Seluruh UPT Ditjen PAS dapat mengakses aplikasi tersebut sebagai bank informasi, bahkan mereka juga dapat mengunggah informasi yang terjadi di lingkungannya dengan mengakses <http://saberpas.ditjenpas.go.id/>. Terdapat banyak fitur dalam aplikasi tersebut mulai dari menu analisa berita, menu siaran pers, hingga menu aplikasi.

Hadirnya aplikasi ini sekaligus membantu masyarakat memantau kegiatan di masing-masing UPT/wilayah, di mana secara terbuka dan transparan mereka menjalankan fungsi untuk mewujudkan para warga binaan pemasarakatan dapat berkontribusi untuk masa bangsa dan negara yang lebih baik.

"Tak dapat dipungkiri bahwa humas Pemasarakatan adalah bagian penting dari organisasi. Bukan sekadar menyampaikan visi, misi, dan tujuan dan representasi kinerja pemasarakatan, tetapi juga memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, membentuk kesadaran publik dan sarana partisipasi publik sebagai wujud good governance di ranah Pemasarakatan," ujar Direktur Jenderal Pemasarakatan Reynhard Saut Poltak Silitonga saat meluncurkan secara resmi aplikasi SABerPAS.

Reynhar juga menekankan bahwa kesadaran akan hal tersebut memberikan motivasi bagi humas Pemasarakatan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Di mana berbagai hal dilakukan seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan media komunikasi hingga monitoring berita yang berlangsung setiap hari.

"Perlu ketahui bahwa setiap hari ratusan berita seputar pemasarakatan hadir di kolom public, positif dan negatif, yang harus dianalisa sebagai bahan pertimbangan kami dalam pengambilan kebijakan untuk pemasarakatan yang lebih baik," tegas Reynhard. ●



RUKUN RAHARJA BERUPAYA BANGKIT DI TENGAH PANDEMI

Derap langkah bisnis PT Rukun Raharja Tbk (Raja) tampaknya akan menarik lebih banyak perhatian pada tahun ini. Bagaimana kinerja mendatang dengan masuknya nama baru di jajaran direksi dan penyesuaian diri terhadap perubahan kondisi lingkungan nasional maupun global?

Bahwa Raja merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya berada dalam genggamannya Hapsoro (Happy) Sukmonohadi yang juga suami Puan Maharani, Ketua DPR RI, sudah banyak yang memaklumi. Namun, perkembangan terakhir Raja yang tercermin dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada Selasa, 27 April 2021 menunjukkan jangkauan dan skala bisnisnya akan meluas dan membesar.

Sebut saja misalnya masuknya Sumantri Suwarno di jajaran direksi pada 2021 menyusul pengusaha Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat di jajaran komisaris pada tahun sebelumnya. Memang akan lebih jelas bagaimana kinerja dan pengaruh dua figur ini dalam perjalanan bisnis di tengah suasana pandemi Covid-19 dan selanjutnya untuk Raja

secara keseluruhan.

Namun, dari perencanaan bisnis yang terungkap dalam hasil RUPS, tampak jelas bahwa Raja semakin lincah berbisnis terutama di bidang energi khususnya integrasi hulu dan hilir gas hingga pengguna akhir di tingkat ritel. Jejak-jejak Raja memasuki bisnis air baku juga tampaknya akan menarik perhatian.

Perencanaan bisnis itu sepertinya ingin meninggalkan kinerja pahit pada 2020 yang menunjukkan dampak Covid-19 yang juga berpengaruh terhadap kinerja Raja dan karena itu juga laba bersih perusahaan. Memang, sepanjang 2020, Raja menuai hasil kurang memuaskan, tercermin dari laba bersih yang mencapai 1,38 juta dolar AS atau turun hingga 76,43 persen dari hasil yang diperoleh sepanjang 2019.

Berdasarkan laporan keuangan yang

dirilis pada keterbukaan informasi sejak pertengahan April 2020, tercatat pendapatan Raja pada 2020 mencapai 98,76 juta dolar atau turun 19,13 persen dari tahun sebelumnya senilai 122,13 juta dolar.

Seiring penurunan pendapatan dan laba, beban pokok pendapatan Raja turun menjadi 82,67 juta dolar. Dengan begitu, laba kotor perusahaan tercatat sebesar 16,09 juta atau turun 5,85 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 17,09 juta dolar.

Pendapatan lainnya pun turun menjadi 2,32 juta dolar dari tahun sebelumnya yang tercatat senilai 8,47 juta dolar. Tambahan pula rugi selisih kurs sebesar 457.544 dolar AS sepanjang 2020. Sementara pada tahun sebelumnya selisih kurs masih menghasilkan laba hingga 1,03 juta dolar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT RUKUN RAHARJA TBK.

"ENERGI DAN INFRASTRUKTUR TERINTEGRASI UNTUK HARI INI DAN MASA DEPAN IBU PERTIWI"

27 APRIL 2021
HOTEL INDONESIA KEMPINSKI



Secara keseluruhan, muncul tekanan pada bottom line perusahaan. Alhasil, Raja mencatatkan laba bersih sebesar 1,38 juta dolar atau turun 76,43 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,7 juta dolar. Sepanjang 2020, total aset Raja tercatat sebesar 166,64 juta dolar atau turun 7,64 persen dari tahun sebelumnya sebesar 180,44 juta dolar. Sementara, kas dan setara kas Raja tercatat sebesar 38,8 juta dolar.

Sedangkan liabilitas Raja tercatat turun menjadi 43,39 juta dari tahun sebelumnya sebesar 57,73 juta. Toh ekuitas perusahaan mengalami kenaikan menjadi 123,24 juta dari tahun sebelumnya sebesar 122,7 juta dolar AS.

Direktur Keuangan Raja, M Oka Lesmana Firdausi mengakui pandemi covid-19 memang berpengaruh langsung pada kinerja perusahaan. Toh ia menegaskan, Raja tetap berupaya meningkatkan kinerja di tengah kendala wabah hingga mulai menunjukkan perbaikan sejak akhir 2020. "Antara lain peningkatan penjualan gas pada kuartal IV 2020, dan meningkatkan efisiensi," ungkapnya akhir April 2021 lalu.

Menurut dia, untuk tahun ini Raja masih akan bertumpu pada lini usaha infrastruktur gas dan perdagangan gas yang disebut masih menjadi lini bisnis paling potensial. Selain itu, Raja juga mengembangkan beberapa proyek baru yang telah diproyeksikan mem-

berikan kontribusi kepada perusahaan, antara lain penyewaan kompresor, pembangunan terminal LPG di Rembang, Jawa Tengah, yang rencananya akan beroperasi pada semester 2 tahun 2021 dengan kapasitas sampai dengan 1000 ton/hari.

Nah, dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dan menurunnya kasus penularan Covid-19, konsumsi gas dari sektor industri dinilai sudah mengalami perbaikan dan diharapkan dan segera kembali seperti sebelumnya. "Rencana lainnya adalah mengakuisisi perusahaan-perusahaan pipa gas yang

berada di pulau Jawa. Saat yang sudah terealisasi adalah jalur pipa gas di wilayah Banten, dan selain itu masih ada beberapa potensi di tahap peninjauan," kata Oka.

Selain sejumlah lini bisnis tersebut, Raja rupanya mulai memasuki bisnis air bersih. Perusahaan yang berdiri pada 1993 ini memulai debutnya di bidang pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Cijanggel, Bandung Barat. SPAM ini memiliki kapasitas 50 LPD (liter per detik). Selain di Cijanggel, saat ini Raja tengah mencari peluang dan menjajaki untuk pemban-



gunan SPAM di beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera.

Langkah awalnya adalah mengakui PT Bravo Delta Persada yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat, PT Perdana Multiguna Sarana (PMGS). "Pertimbangan dalam mengakuisisi perusahaan SPAM yaitu perusahaan mulai menjajaki bisnis dalam menyediakan utilitas terintegrasi, dimana di dalamnya termasuk gas dan air bersih," ungkap Oka.

Bisnis penyediaan utilitas terintegrasi

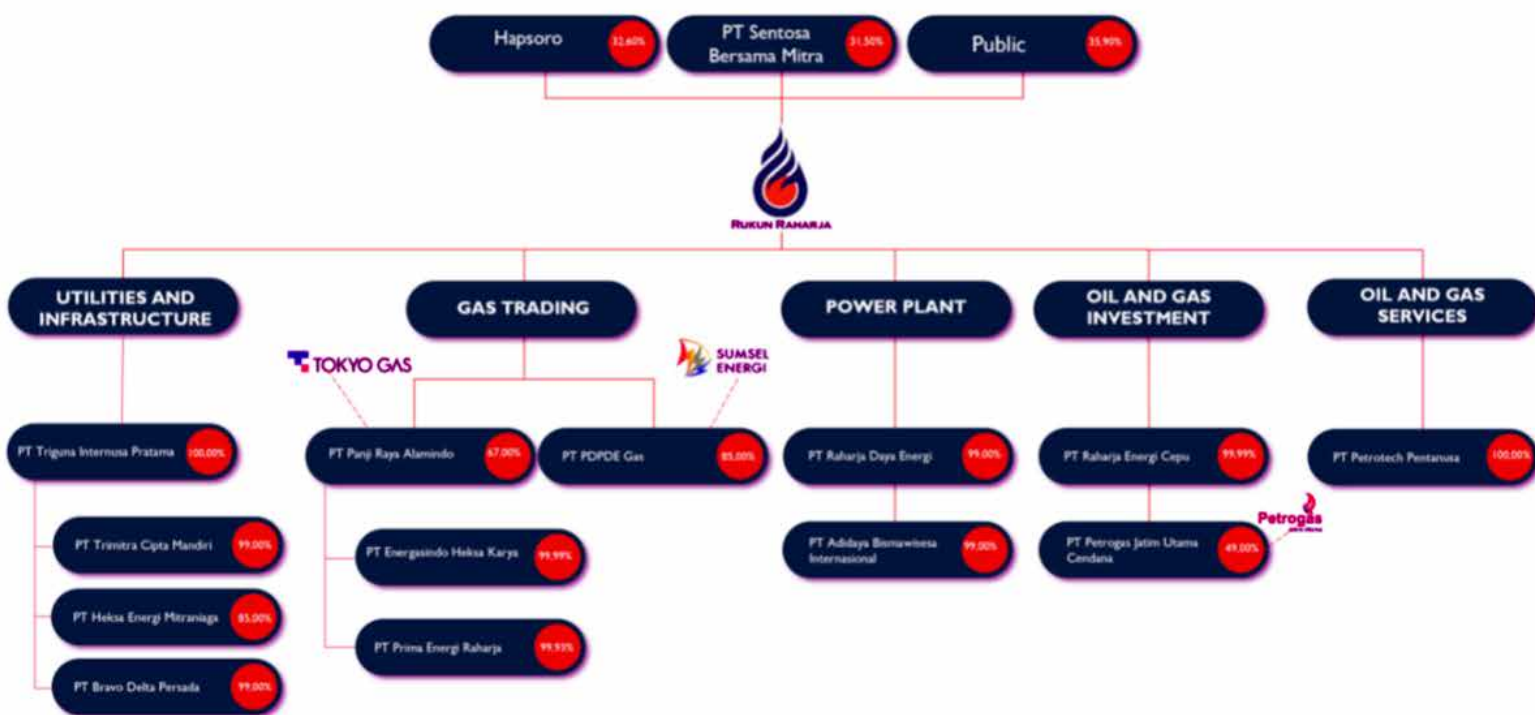
10,42 persen, dan 25,45 persen lainnya merupakan milik publik.

Investasi proyek Rokan itu mencapai sekitar 63 persen dari total ekuitas perseroan yang berada di posisi 121 juta dolar AS per 30 September 2020. Dengan begitu, rencana investasi itu termasuk transaksi material dan memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

Direktur Utama Rukun Raharja Djauhar Maulidi mengatakan dalam proyek pipa Rokan ini Raja akan bekerja sama dengan PT Pertamina Gas atau Pertagas

ini sejalan dengan visi perseroan untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah terhadap stabilitas produksi minyak nasional. Terlebih mengingat Blok Rokan berkontribusi sekitar 24 persen terhadap produksi minyak nasional.

Secara total, proyek tersebut membutuhkan pendanaan sebesar 300 juta dolar, atau Rp4,34 triliun (dengan kurs Rp14.485 per dolar AS). Dari jumlah tersebut, Rukun Raharja akan berkontribusi sebesar 25 persen atau sekitar 75 juta dolar AS. Sedangkan, sumbangan



tersebut dilakukan dengan membuka jalur pipa gas bersamaan dengan membuka jalur pipa untuk penyaluran air bersih. Sedangkan untuk perluasannya, Raja terus menjajaki peluang kerjasama untuk bisnis SPAM di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera.

Namun, yang tampak lebih signifikan skala bisnisnya adalah investasi senilai 75 juta dolar AS untuk proyek pipa Rokan. Para pemegang saham Raja sepakat mengucurkan investasi yang setara dengan sekitar Rp 1 triliun itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Selasa, 27 April 2021 di Pelataran Ramayana, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Sejauh ini, para pemegang saham Raja antara lain Happy Hapsoro 35,29 persen, Sentosa Bersama Mitra 31,54 persen, Johan Lensa

“Perusahaan yang berdiri pada 1993 ini memulai debutnya di bidang pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Cijanggel, Bandung Barat, SPAM ini memiliki kapasitas 50 LPD (liter per detik)

modal mayoritas atau 75 persen berasal dari Pertagas.

Untuk membiayai proyek tersebut, perseroan memanfaatkan sumber dana pinjaman perbankan. Dalam hal ini, Rukun Raharja telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai 108 juta dolar pada 26 Maret 2021.

Selanjutnya, dalam RUPSLB itu manajemen juga meminta persetujuan pemegang saham atas pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar kekayaan bersih perseroan, dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga tersebut. Meliputi jaminan yang akan diberikan oleh perseroan dan/atau entitas anak, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari perseroan dan/atau entitas anak.

Pasalnya, pendanaan itu bernilai lebih dari 50 persen dari total ekuitas perseroan. Direktur Rukun Raharja Oka Lesmana mengatakan tiga perempat pemegang saham yang hadir pada RUPSLB tersebut, mayoritas telah menyetujui pinjaman itu. Selain untuk proyek dengan Pertamina, perusahaan dengan kode saham Raja itu akan memanfaatkan pinjaman untuk proyek yang sedang berjalan. "Salah satunya adalah pembangunan LPG Discharge Terminal di Rembang dan lainnya adalah untuk

Dalam konteks ini pula, para pemegang saham Raja menyepakati bergabungnya Sumantri Suwarno sebagai salah satu direktur terhitung sejak pengesahan RUPS. "Dengan pengalaman di bidang migas yang cukup mumpuni bergabungnya Bapak Sumantri diharapkan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan kinerja Perseroan," ungkap pernyataan resmi Raja. Sumantri Suwarno, alumni FEB UI 2002 masih tercatat sebagai Preskom di PT Petrotech Penta Nusa

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Independen: Muhammad Senang Sembiring
- Komisaris: Mohammad Arsjad Rasjid P Mangkuningrat
- Komisaris Independen: Rachmat Gobel
- Komisaris: Rudiantara

Yang pasti, Raja terus berdinamika sebagai perusahaan penyedia energi terintegrasi dari hulu ke hilir. Berdiri pada 24 Desember 1993, perjalanannya bermula dengan bisnis properti (real estate). Seiring perkembangan usaha, pada 22 Januari 2003,



melunasi pinjaman yang dimiliki perseroan di bank lain," ucapnya.

Rencananya, pembangunan proyek pipa Rokan tahap pertama akan selesai pada kuartal ketiga 2021. Selanjutnya, proyek pipa Rokan ini diproyeksikan bisa memberikan kontribusi pendapatan kepada perseroan pada laporan keuangan tahun buku 2022 mendatang.

Pipa yang dibangun menuju pelabuhan Dumai, Riau itu berasal dari blok Rokan. Proyek ini adalah penugasan dari Pertamina kepada Pertamina. Pipa minyak itu terdiri dari koridor lapangan minyak Balam-Bangka-Dumai dan Minas-Duri-Dumai sepanjang 352,43. Ruas ini akan dibagi menjadi 12 segmen dan station 3 segmen termasuk fasilitas pendukungnya.

dan komisaris PT Sirius Surya Sentosa, juga Komisaris Independen PT BRI Multifinance.

Tahun lalu, masuknya Arsjad Rasjid yang lama menangani Indika Energy dan Group tentu bukan sekadar menambah daftar di jajaran Dewan Komisaris Raja. Yang lebih penting kelak adalah bagaimana peran Sumantri dan Arsjad terhadap kinerja Raja di masa mendatang.

Dengan masuknya Sumantri, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Raja sampai dengan tahun buku 2022 menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

- Direktur Utama: Djauhar Maulidi
- Direktur: M Oka Lesmana Firdausi
- Direktur: Sumantri Suwarno

Rukun Raharja resmi terdaftar sebagai Perusahaan Terbuka melalui pencatatan saham di Bursa Efek Surabaya (kini menjadi Bursa Efek Indonesia) dengan kode saham Raja. Sejak saat itu, Perseroan aktif melakukan Penawaran Umum Terbatas sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan.

Pada 2004, Raja berekspansi bisnis ke bidang jasa logistik dan pengelolaan pelabuhan di Sulawesi Utara. Enam tahun kemudian, pada 2010, Raja mulai beralih menjadi penyedia energi terintegrasi dari hulu ke hilir yang berfokus menjalankan empat pilar bisnis utama: infrastruktur gas, perdagangan gas, pembangkit, dan bisnis hulu energi. Selain energi, air baku mulai menjadi pilihan kombinasi. Kita tunggu perkembangannya. ●

PERJUANGAN DEMI KEBERLANJUTAN GARUDA

Chairul Tanjung menambah kepemilikan sahamnya di Badan Usaha Milik Negara sektor penerbangan, Garuda Indonesia. Boleh jadi untuk mengantisipasi lonjakan angkutan penumpang dan kargo pasca pandemi.

Banyak penerbangan tertunda. Tentu saja pandemi alasannya. Maskapai penerbangan kemudian menjadi salah satu sektor bisnis yang terdampak pandemi paling parah.

Namun, dalam situasi itu, Chairul Tanjung justru menambah kepemilikan saham di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., BUMN penerbangan. Dalam laporannya ke otoritas bursa pada Senin, 10 Mei 2021, Finegold Resources Ltd menyatakan telah mengalihkan seluruh saham miliknya dalam PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) kepada PT Trans Airways. Jumlah saham yang dialihkan tersebut sebanyak 635.739.990 saham atau 635,73 juta saham. Pemberitahuan serupa juga ditujukan ke Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra.

Transaksi berlangsung dengan harga senilai Rp499 per saham. Dengan demikian, total nilai transaksi pada 6 Mei 2021 lalu itu mencapai Rp317,23 miliar.

Dari transaksi itu, maka total kepemilikan saham Trans Airways atas GIAA bertambah menjadi sekitar 7,31 miliar saham GIAA atau setara dengan 28,26 persen dari seluruh modal ditempatkan perseroan. Sebelumnya, Trans Airways memiliki sekitar 6,68 miliar saham atau setara dengan 25,81 persen.

"Tujuan dari transaksi pembelian saham tersebut untuk investasi dengan status kepemilikan langsung," demikian mengutip keterbukaan informasi BEI yang diteken Direktur Utama PT

Trans Airways Warnedy.

Setelah transaksi pembelian saham itu, PT Trans Airways memiliki 7.316.798.262 saham atau setara dengan 28,26 persen dari seluruh modal ditempatkan dan disetor perseroan dari sebelumnya 6.681.058.272 saham atau setara dengan 25,81 persen.

Berdasarkan data RTI, pemegang saham GIAA per 31 Maret 2021 antara lain Pemerintah Indonesia sebesar 60,54 persen, PT Trans Airways sebesar 25,80 persen, dan masyarakat dengan kepemilikan di bawah lima persen sebesar 13,66 persen.

Trans Airways merupakan perusahaan milik konglomerat Chairul Tanjung. Awalnya Trans Airways memborong saham GIAA dari tiga sekuritas yang berperan menjadi underwriter di initial public offering (IPO) yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, serta PT Danareksa Sekuritas. Pada 2012 silam, Trans Airways membeli sebanyak 10,88 persen saham GIAA dijual dengan harga Rp620 per saham. Harga tersebut lebih rendah daripada harga jual saat IPO, yaitu Rp750 per saham.

Sedangkan merujuk laporan kepemilikan efek lima persen atau lebih yang dirilis PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) perubahan kepemilikan Trans Airways tercatat per 11 Februari 2020. Yang jelas, pada hari itu harga rata-rata GIAA di pasar reguler sekitar Rp 376 per saham.

Porsi kepemilikan Trans Airways di GIAA memang terus bertambah sejak masuk sebagai investor di maskapai penerbangan pelat merah itu. Setelah pertama kali membeli saham GIAA pada 2012 silam, pada April 2014 kepemilikan Trans Airways di GIAA bertambah menjadi sekitar 24,6 persen. Ini seiring penerbitan saham baru lewat skema rights issue dengan harga Rp460 per saham yang digelar oleh Garuda saat itu.

Hingga pada 2018 lalu Garuda Indonesia menjadi salah satu BUMN yang menghadapi ragam masalah. Mulai dari harga tiket pesawat mahal hingga manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misalnya, me-

mutuskan adanya pelanggaran pada Laporan Keuangan Tahunan Garuda Indonesia 2018. Pelanggaran ini membuat perusahaan terkena denda hingga Rp1 miliar.

Temuan kejanggalkan laporan keuangan tahunan Garuda Indonesia ini bermula ketika dua komisaris Garuda, yakni Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai

PT Trans Airways. Penolakan tersebut terkait dari pengakuan pendapatan dari kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia.

Pengakuan kerja sama itu sebagai pendapatan membuat GIAA akhirnya berhasil membukukan laba sekitar USD5 juta. Belakangan, setelah melakukan penyajian kembali (re-



dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Maka keduanya menolak menandatangani laporan keuangan tersebut.

Chairul Tanjung adalah adik dari Chairul Tanjung dan perwakilan dari

statement) laporan keuangan 2018, GIAA mencatatkan kerugian hingga USD175 juta.

Menurut mereka, seharusnya Garuda Indonesia mencatatkan rugi senilai USD244,95 juta pada 2018. Namun

dalam laporan keuangan malah tercatat sepanjang tahun 2018 perusahaan mencetak laba bersih USD809,84 ribu, meningkat tajam dari 2017 yang rugi USD216,58 juta.

Pasca manipulasi laporan keuangan tahunan 2018, perusahaan justru mencatatkan keuntungan sebesar USD122,424 juta atau sekitar Rp1,713 triliun (kurs Rp 14.000) di periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019. Di periode yang sama tahun sebelumnya, maskapai pelat merah tersebut masih mencatatkan rugi

yang menembus angka 1,043 juta, meningkat cukup signifikan dari masa awal pandemi saat maskapai penerbangan pelat merah ini hanya dapat mengangkut 30 ribuan penumpang. Kemudian dari bisnis angkutan kargo, pada November 2020 Garuda Indonesia juga berhasil mencatatkan pertumbuhan kargo sebesar 12,20 persen dari awal kuartal IV - 2020, menjadi 24,6 ribu ton angkutan kargo.

Dari aspek pengelolaan biaya produksi perusahaan, Garuda Indonesia juga secara konsisten menerapkan

menyelesaikan proses pencairan dana hasil penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebesar Rp1 triliun. Pencairan dana hasil penerbitan OWK tersebut mengacu pada perjanjian penerbitan OWK pada akhir 2020 lalu yang telah disepakati antara Garuda Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku pelaksana investasi dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) dalam rangka implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Hasil penerbitan OWK sebesar Rp1 triliun yang telah kami selesaikan



USD114,080 juta atau sekitar Rp1,597 triliun.

Mengutip laporan keuangan yang disampaikan perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis, 31 Oktober 2019, perolehan laba perseroan ditopang angka pendapatan yang naik di kuartal III 2019 sebesar USD 3,540 miliar atau sekitar Rp 49,560 triliun. Angka tersebut naik 9,97 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD3,219 miliar atau sekitar Rp45,066 triliun.

Sedangkan hingga awal kuartal IV-2020 lalu, Garuda Indonesia mencatatkan jumlah penumpang tertinggi selama pandemi. Pada November 2020 lalu, Garuda Indonesia Group berhasil membukukan jumlah penumpang

kan upaya upaya strategis yang salah satunya melalui negosiasi biaya sewa pesawat, negosiasi dengan pihak ketiga lainnya, serta berbagai optimalisasi biaya penunjang lainnya di mana penghematan per bulannya yang dapat diperoleh mencapai sebesar USD 15 juta. "Dengan kinerja perusahaan yang terus menunjukkan pertumbuhan positif di tengah masa pandemi ini serta kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh terhadap layanan penerbangan Garuda Indonesia, kami optimistis dana dari hasil penerbitan OWK akan dapat menunjang fokus akselerasi kinerja perseroan secara konsisten" kata Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiawan.

Pada Februari 2021 lalu Garuda

proses pencairannya pada pertengahan kuartal 1 tahun ini, tentunya menjadi momentum tersendiri bagi Garuda Indonesia untuk terus memperkuat upaya pemulihan kinerja sejalan dengan kinerja fundamental operasional perusahaan yang secara konsisten terus menunjukkan pertumbuhan positif," kata Irfan.

Langkah Trans Airways dengan menambah porsi kepemilikan saham merupakan pertimbangan suntikan dana juga. Para pemegang saham tampak berjuang mengupayakan keberlanjutan Garuda di tengah situasi pandemi yang menekan angka pemasukan. Sekaligus mengantisipasi lonjakan penumpang maupun kargo saat pandemi mulai terkendali. •



DINAMIKA CT CORPORA

Di tengah situasi pandemi, PT CT Corpora, perusahaan induk CT Corp yang lekat dengan Chairul Tanjung menunjukkan dinamika luar biasa. Pada akhir April 2021 misalnya, Mitsui & Co (Mitsui) dari Jepang memutuskan berlangganan obligasi konversi yang diterbitkan oleh CT Corpora dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar 100 miliar yen atau setara Rp 13,2 triliun.

Penerbitan obligasi konversi terdiri dari dua tahap, masing-masing 67 miliar yen dan 33 miliar yen. "Dengan memperkuat aliansi kami dengan CT Corp melalui langganan ini, kami bermaksud berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan dan evolusi bisnis di berbagai industri yang berhubungan dengan konsumen dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup konsumen Indonesia," ujar CEO Mitsui & Co Kenichi Hori melalui keterangan tertulis, Jumat, 30 April 2021.

Lebih lanjut kata Kenichi, Mitsui telah menetapkan pangsa pasar di Asia sebagai area fokus strategi dalam rencana manajemen jangka menengah perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menangkap peluang permintaan

konsumen yang terus meningkat di Asia dengan membangun kemitraan strategis. Salah satunya memanfaatkan beragam portofolio dan jaringan global agar menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada konsumen Asia.

Setelah berlangganan obligasi konversi, Mitsui akan mendukung evolusi CT Corp menjadi perusahaan multinasional melalui pengiriman komisaris, direktur, dan karyawan lain untuk berbagi keahlian. Mitsui juga akan berkontribusi pada pertumbuhan CT Corp melalui bisnis bersama dengan memanfaatkan kemampuan pengembangan bisnisnya.

Jelas akan terjadi perubahan signifikan pada CT Corpora yang menjadi induk CT Corp. Sedangkan CT Corp terdiversifikasi dengan jangkauan bisnis luas di dalam negeri. Mulai dari keuangan, ritel, media, properti, perhotelan, hiburan, dan gaya hidup.

Sebelumnya, pada Maret 2021 lalu, CT mengambil alih Bank Harda lewat PT Mega Corpora. Menurut laporan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Mega Corpora memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 Maret 2021 untuk

membeli 73,71 persen saham Bank Harda.

Keputusan tersebut sekaligus membuat Mega Corpora menjadi pengendali perusahaan dengan kepemilikan 3,08 miliar saham. "Perubahan pengendalian dalam BBHI melalui pelaksanaan pengambilalihan tersebut dilaksanakan oleh PT Mega Corpora berdasarkan persetujuan dari OJK pengawas perbankan dengan surat keputusan anggota dewan komisiner OJK No. Kep-40/D.03/2021 tanggal 10 Maret 2021," ungkap pernyataan resmi perusahaan.

Selanjutnya PT Bank Harda Internasional Tbk resmi berganti nama menjadi PT Allo Bank Indonesia Tbk lewat Rapat Umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada 7 Mei 2021 lalu. "Menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Allo Bank Indonesia Tbk dengan demikian mengubah pasal 1 anggaran dasar perseroan," ungkap risalah RUPSLB yang berlangsung pada Selasa, 11 Mei 2021.

Dinamika perubahan dan kesinambungan CT dan ekosistem bisnisnya jelas akan berlanjut. Kita tunggu bersama-sama. ●

PT Kimia Farma Diagnostika

ERICK AMBIL BAGIAN PERBAIKAN PENANGANAN COVID-19

Tanpa perbaikan dalam penanganan pandemi Covid-19, upaya mengendalikannya akan sulit memenuhi harapan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengambil bagian dengan keputusan tegas untuk PT Kimia Farma Diagnostika.

Keselamatan sekian banyak warga sangat tergantung keandalan hasil uji usap (swab test) antigen. PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) kemudian mengemban amanat besar melaksanakan uji usap itu, namun tersandung penyimpangan memalukan: menggunakan perangkat tes bekas di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Alhasil, Menteri BUMN Erick Thohir bertindak tegas dengan memberhentikan seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika (KFD). Sebelumnya, para pelaksana di lapangan sudah menjadi tersangka dan mendekam di sel tahanan Polda Sumatera Utara.

Erick menegaskan, apa yang terjadi di Kualanamu adalah persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius. Setelah melakukan penilaian

secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance, langkah pemecatan seluruh direksi KFD harus diambil.

"Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat berwenang," kata Erick, Minggu, 16 Mei 2021.

Awalnya, lima pegawai BUMN farmasi, PT Kimia Farma, yang bertugas melakukan tes antigen kepada calon penumpang pesawat di Bandara Kualanamu itu rupanya kerap menggunakan alat tes bekas pakai yang mereka daur ulang sendiri. Modus para pelaku adalah mendaur ulang stik rapid test antigen yang telah digunakan dengan cara dicuci dengan al-



kohol di Laboratorium Kimia Farma, Jalan Kartini, Medan. Selanjutnya dibawa kembali ke Bandara Kualanamu.

Pengungkapan kasus alat tes antigen bekas ini bermula dari laporan masyarakat yang curiga atas hasil tes di Bandara Kualanamu karena kebanyakan positif. Tim Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara kemudian menurunkan tim menyelidiki pada Selasa, 27 April 2021.

Salah seorang polisi menyamar sebagai calon penumpang dan menjalani tes cepat antigen di tempat pemeriksaan milik Kimia Farma. Hasil tes positif, sehingga menambah kecurigaan ada yang tidak beres.

Polisi lalu memeriksa tempat itu dan mendapatkan sejumlah alat tes bekas yang dipakai lagi. Seharusnya stik yang sudah dipakai, dipatahkan. Namun oleh pegawai Kimia Farma itu, stik bekas pakai dicuci dan dimasukkan kem-

bali ke tabung untuk dipakai lagi.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak mengemukakan, lima karyawan Kimia Farma itu kini sudah menjadi tersangka. Menurut Kapolda Sumut, praktik curang penggunaan alat test bekas pakai ini telah dilakukan para pelaku sejak Desember 2020.

"Harusnya, stik itu dipatahkan setelah digunakan. Namun oleh pelaku bukan dipatahkan, melainkan dibersihkan dan dikemas kembali," kata Panca.

Picandi Maskojaya, karyawan dengan jabatan tertinggi dalam pelaksanaan uji usap di Bandara Kualanamu mengaku tak terlibat langsung praktik itu. Namun Plt Business Manager Laboratorium Kimia Farma Medan yang juga Kepala Layanan Kimia Farma Diagnostik Bandara Kualanamu ini tak bisa mengelak bahwa ia mengetahui semua perbuatan itu sejak awalnya

Tak kurang dari 9.000 orang diduga menjadi korban tes antigen yang menggunakan alat bekas pakai orang lain di Bandara terbesar di Sumatera ini. Selain kehilangan jabatan dan pekerjaan, kini Picandi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Bersama Picandi, empat tersangka lainnya, yaitu SR sebagai kurir, DJ customer service, M admin, dan R karyawan tidak tetap Kimia Farma terkena jerat hukum di bidang kesehatan. "Aturan yang dilanggar adalah Pasal 98 ayat (3) Jo pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan," ungkap Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi.

Dalam pasal tersebut diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan



atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, mereka juga dapat dikenakan Pasal 8 huruf (b), (d) dan (e) Jo pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda Rp2 miliar.

Dari hasil pengusutan lebih lanjut terhadap kasus Bandara Kualanamu, terungkap bahwa penggunaan alat rapid test antigen daur ulang berupa swab stick/cotton bud di laboratorium Kimia Farma Bandara Kualanamu sudah berlangsung sejak 17 Desember 2020. Sejak mulai beroperasi, diperkirakan KFD sudah menangani 37.500 rapid test antigen di laboratoriumnya.

Angka itu diperoleh dari temuan petugas bahwa setiap hari terdapat sekitar 250 orang calon penumpang pesawat yang memeriksakan diri di lab itu. Bila jumlah itu dikalikan dengan jumlah hari selama lima bulan, maka terdapat setidaknya 37.500 orang yang sudah menjalani rapid test antigen di lab tersebut.

Melihat praktik yang berlangsung selama kurun waktu lima bulan, jelas terjadi pelanggaran standard operating procedure (SOP) dalam pelayanan KDF hingga tingkat pengambilan keputusan eksekutif puncak. Nah, tak sampai sebulan setelah kasus Bandara Kualanamu

terungkap, Erick langsung bertindak memecat direksi KDF.

Lebih dari itu, seluruh lab yang berada di bawah BUMN Farmasi Kimia Farma menjalani pemeriksaan oleh auditor independen. Ini juga penting untuk memastikan operasional BUMN farmasi itu mematuhi standard yang patut, terlebih karena terkait dengan layanan kesehatan yang menyangkut nyawa manusia

Menurut Erick, seluruh BUMN terkait pada kesepakatan bersama untuk bertindak profesional sesuai dengan core value yang dicanangkan, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Namun, apa yang terjadi pada kasus Kualanamu dinilai bertentangan dengan core value tersebut.

"Karena memang sudah tak sejalan dengan core value tersebut, maka tidak memandang siapa dan apa jabatannya, maka kami persilakan untuk berkarier di tempat lain,"

kata Erick.

Ia menjelaskan, ada kelemahan secara sistem yang membuat kasus antigen bekas dapat terjadi, dan ini berdampak luas bagi kepercayaan masyarakat. Sebagai perusahaan layanan kesehatan, rasa kepercayaan yang diperoleh dari kualitas pelayanan menjadi hal yang tak bisa ditawar.

"Akumulasi dari seluruh hal tersebut membuat kami berkewajiban untuk mengambil langkah ini. Ini bukan langkah untuk menghukum, tapi langkah untuk menegakkan dan memastikan, seluruh BUMN punya komitmen untuk melayani, melindungi, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat," sambung Erick.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengecam tindakan penggunaan alat rapid test antigen bekas untuk kepentingan surveilans di Bandara Kualanamu itu. Satgas meminta pula agar pelaku ditindak tegas.

"Satgas mengecam pelaku pemalsuan alat antigen ini dan mendukung kepolisian untuk menindak secara tegas para pelakunya," kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito. Menurut dia, penggunaan rapid test antigen bekas untuk melakukan testing Covid-19 tidak bisa ditolerir karena berisiko kehilangan nyawa warga yang menjadi korban alat bekas itu.

Wiku lantas berharap, pemalsuan rapid test antigen ini merupakan kejadian terakhir. Jika kejadian serupa terulang, Wiku memastikan pemerintah akan mengambil langkah tegas dan cepat.

Harap maklum, dampak penggunaan alat tes antigen bekas adalah risiko kontaminasi (pencemaran) virus. Ada beberapa kejadian 'penggunaan' alat tes bekas yang pernah dilaporkan di dunia, namun



hampir semua karena faktor ketidak-sengajaan. Jadi, kasus Kualanamu yang merupakan kesengajaan ini adalah kejadian luar biasa.

Soal kontaminasi, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) sebelumnya juga pernah menarik alat tes deteksi Covid-19 yang dihasilkannya karena masalah pencemaran ini. Tes dengan alat yang tercemar sulit diandalkan karena menghasilkan kasus positif palsu.

"CDC tidak membuat alat tes sesuai protokolnya sendiri... Sangat penting agar alat tes berfungsi sebagaimana seharusnya, karena hasil yang keliru bisa turut berkontribusi terhadap penyebaran Covid-19," ungkap pernyataan resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) dalam

“
Satgas mengancam
pelaku pemalsuan
alat antigen ini dan
mendukung kepoli-
sian untuk menin-
dak secara tegas
para pelakunya

laman webnya.

Bayangkan saja jika rapid test antigen yang menyalahi prosedur itu berpeluang terjadi di 63 gerai layanan KFD yang menyebar dari Medan di barat hingga Makassar di timur. Maka direksinya pun harus ikut bertanggung jawab terhadap penyimpangan di Kualanamu.

Mereka adalah direktur utama yang dijabat Adil Fadilah Bulqini dan direktur keuangan, umum dan sumber daya manusia Ilham Sabariman. Keduanya ditunjuk sebagai direksi PT Kimia Farma Diagnostik sejak rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 12 Maret 2015.

Erick Thohir mengaku murka usai terungkapnya kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas yang sangat mencoreng wajah BUMN tersebut. Per-

ilaku oknum tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan negara. Apalagi, hal itu dilakukan demi mengeruk keuntungan pribadi di tengah masa pandemi Covid-19.

Melihat jaringan fasilitas lab-nya, sebenarnya KFD yang menjadi anak perusahaan Kimia Farma Apotek boleh dibilang paling luas layanannya, jika bukan yang terbaik di Indonesia. Dalam laporan yang ditulis di laman resminya, PT Kimia Farma Diagnostik telah melayani lebih dari 561 pelanggan peru-

dokter, para radiografer, ahli phleboto-mist, dan analis serta perawat yang kompeten dan tersertifikasi. "Quality for healthier life merupakan tagline PT Kimia Farma Diagnostik, yang terus menjaga dan memperbaiki kualitas mutu layanan, ketepatan hasil pemeriksaan dengan alat-alat laboratorium yang terkini, modern dan secara rutin terkalibrasi dengan harapan menjadi bagian dalam meningkatkan kesehatan hidup manusia di Indonesia," tulis pernyataan resmi perusahaan.



sahaan BUMN, swasta dan pemerintahan, 72.274 pelanggan dokter, 20.180 pelanggan atas rujukan klinik maupun mitra laboratorium, serta 29.598 pelanggan yang datang langsung ke Laboratorium Klinik Kimia Farma.

Perusahaan juga mengklaim bahwa layanannya didukung lebih dari 150

Namun, apa yang terjadi di Kualanamu memang sungguh keterlaluan untuk perusahaan yang menyandang nama besar di bidang farmasi. Toh, dari sini juga seharusnya berlangsung perbaikan. Baik untuk penanganan pandemi Covid-19 dan layanan laboratorium kesehatan secara keseluruhan. •

gojek x tokopedia

memperkenalkan

goto



SELAMAT DATANG GOTO DAN LIHAT-LIHAT DULU TENTU

GoTo telah datang. Platform pemasaran, transaksi, dan distribusi terbesar di Indonesia dalam satu genggaman.

Sekadar kilas balik, merger atau penggabungan usaha antara raksasa ojek online Gojek dengan raksasa warung digital Tokopedia sudah berembus sejak tahun lalu. Malah sebelum wabah Covid-19 tiba di awal 2020, sayup-sayup langkah merger itu sudah terdengar.

Nah, merger itu akhirnya terealisasi pada pertengahan Mei 2021. Gojek dan Tokopedia resmi melakukan penggabungan atau merger melahirkan perusahaan baru dengan bendera Grup GoTo.

Kesepakatan antarplatform berstatus decacorn dan unicorn itu

didukung oleh berbagai investor raksasa. "Pembentukan Grup GoTo ini merupakan kolaborasi usaha terbesar di Indonesia, sekaligus kolaborasi terbesar antara dua perusahaan internet dan layanan media di Asia hingga saat ini," ungkap keterangan resmi manajemen Grup GoTo, Senin, 17 Mei 2021.

Andre Soelistyo yang merupakan Co-CEO Gojek kini duduk sebagai CEO Grup GoTo, sementara Patrick Cao dari Tokopedia ditunjuk sebagai Presiden Grup GoTo. Sedangkan Kevin Aluvi dan William Tanuwijaya masing-masing akan tetap menjabat sebagai CEO Gojek dan Tokopedia.

"Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah dengan dibentuknya Grup GoTo serta menandai fase pertumbuhan selanjutnya bagi Gojek, Tokopedia dan GoTo Financial," ujar Andre.

Ia menyebutkan, langkah merger juga akan semakin memaksimalkan kemampuan perusahaan untuk menggarap potensi perekonomian Indonesia yang masih sangat besar. "Bagi konsumen, Grup GoTo akan hadir semakin dekat untuk memberikan lebih banyak solusi dan kemudahan dalam keseharian mereka," kata Andre.

Sementara itu, Patrick Cao mengatakan, dengan mengombinasikan model bisnis Gojek dan Tokopedia, Grup GoTo akan dapat memperluas jenis layanannya kepada masyarakat. "Ke depannya, Grup GoTo akan berkontri-

busi lebih dari dua persen kepada total PDB Indonesia dan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta peluang penghasilan seiring dengan berkembangnya bisnis kami dan pertumbuhannya ekonomi,” ucapnya.

Merunut ulang hingga merger tahun ini, Gojek dan Tokopedia telah mempertimbangkan potensi merger sejak 2018. Langkah itu semakin cepat terpicu oleh terkatung-katungnya rencana Gojek dan Grab Holdings Inc. yang juga berpotensi merger.

Gojek dan Tokopedia sebenarnya memiliki beberapa investor yang sama di belakangnya. Hal yang umum di dunia start up, bila mereka memiliki banyak pemegang saham institusi yang masuk melalui jalur pendanaan.

Salah satu investor di belakang keduanya adalah BUMN investasi Singapura, Temasek Holdings. Selain itu, ada juga raksasa teknologi Google di belakang keduanya. Tercatat, pada Oktober 2020 Temasek Holdings dan Google bersepakat menyuntikkan dana ke Tokopedia senilai US\$350 juta atau setara Rp 5,13 triliun.

Kabarnya suntikan dana ini akan digunakan untuk ekspansi usaha setelah Covid-19. Suntikan dana ini juga menunjukkan kepercayaan investor kepada e-commerce terbesar tanah air ini yang mengalami lonjakan belanja online selama pandemi.

Toh Temasek dan Google juga menjadi investor di Gojek, startup ride hailing berstatus decacorn yang memiliki valuasi US\$10 miliar. Temasek berkali-kali disebut sebagai pemegang saham terbesar di Gojek. Reuters pada Januari 2018 menyebut Temasek kembali menyuntikkan modal ke Gojek.

Temasek juga menggunakan beberapa sayap investasi yang tercatat sebagai pemegang saham Gojek, yakni Gamvest Pte Ltd dan Anderson Investment Pte Ltd. Sementara itu Google masuk ke Gojek melalui Google Asia Pacific Pte Ltd pada 2018 lalu melalui pendanaan seri E. Google kembali ikut pendanaan seri F bersama dengan sejumlah perusahaan lain, yakni Mitsubishi Corporation, Mitsubishi UFJ Lease & Finance, Visa, Tencent dan JD.com.

Yang mungkin luput dari perhatian, beberapa hari sebelum pengumuman

merger Gojek dan Tokopedia, PT Telkomsel kembali menyuntikkan dana ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Kali ini nilai suntikan dananya mencapai Rp 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,26 triliun (kurs R 14.200 per dollar AS)

Ini merupakan investasi lanjutan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tersebut pada Gojek, setelah pada November 2020 lalu sudah menyuntikkan dana sebesar 150 juta dollar AS atau setara Rp 2,17 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS). Namun, jangan

rusahaan punya kesamaan visi untuk berkembang menjawab masalah nyata di tengah masyarakat melalui inovasi digital dan teknologi, dengan semangat untuk melayani dan memajukan negeri.

“Maka dari itu, Telkomsel menatap optimis upaya penanaman modal terbaru ini akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk melihat dan menikmati lebih banyak inovasi berbasis teknologi terdepan karya anak bangsa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin, 10 Mei 2021. Sety-

Our Leadership



lupa Singtel (Singapore Telecom) yang berada di bawah kendali Temasek juga memiliki saham signifikan di Telkomsel.

Toh Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, investasi lanjutan ini jadi momentum kedua perusahaan untuk memperkuat dan memperdalam kolaborasi dalam meningkatkan layanan digital yang komprehensif. Menurut dia, kedua pe-

anto menjelaskan, aksi korporasi ini juga menjadi strategi Telkomsel dalam memperkuat trifecta bisnis digital perusahaan, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital services.

Ia bilang, kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang membutuhkan ekosistem yang holistik, dan hal tersebut dapat diwujudkan melalui sinergi antara kedua perusahaan. “Se-

bagai digital telco company, kami terus melakukan pengembangan berkelanjutan yang melampaui kemampuan konektivitas, dengan terus mengembangkan industri digital di Indonesia, melalui kontribusi keunggulan Telkomsel dan Gojek, baik dalam bidang keahlian maupun inovasi,” jelas dia.

Malah integrasi ekosistem antara Gojek dan Telkomsel telah berlangsung melalui berbagai kolaborasi inisiatif layanan customer-centric untuk mendorong penguatan ekosistem digital di sektor UMKM dan meningkatkan kemudahan bagi mitra pengemudi. Beberapa antaranya meliputi integrasi layanan Telkomsel MyAds dengan GoBiz yang dapat membuka peluang bagi mitra UMKM Gojek di seluruh Indonesia untuk memperluas akses usaha kepada ekosistem pelanggan Telkomsel. Lalu kemudahan bagi mitra UMKM Gojek untuk menjadi mitra reseller Telkomsel melalui aplikasi DigiPOS Aja! sehingga dapat membantu menambah penghasilan.

Selain itu, penyediaan paket data khusus bagi mitra pengemudi Gojek yang dapat diakses di aplikasi GoPartner dan MyTelkomsel. Serta menciptakan lebih dari 20.000 mitra outlet/reseller Telkomsel di layanan GoShop yang membantu menjangkau lebih banyak pelanggan.

Tak hanya mendapat suntikan dana, beberapa hari sebelum pengumuman merger Gojek juga berinvestasi di sektor ritel dengan masuk sebagai salah satu pemegang saham PT Multipolar Tbk (MLPL) yang membawahkan PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA).

Pada 6 April 2021 MLPL melepas 11,9 persen atau setara 896,33 juta saham ke tiga pihak. Ketiganya adalah, PT Panbridge Investment Ltd, Threadmore Capital Ltd, dan yang pal-

ing mencuri perhatian adalah, PT Pradipa Darpa Bangsa. Pradipa merupakan entitas usaha yang 99,996 persen sahamnya dimiliki oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Alias Gojek. Sedang 0,004 persen sisanya dikuasai oleh PT Dompot Karya Anak Bangsa.

Andre Soelistyo merupakan Komisaris Pradipa Darpa. Sedang Hans Patuwo menjabat sebagai Presiden Direktur dan Thomas Kristian Huster menjabat sebagai direktur. Sementara, Panbridge dan Threadmore merupakan entitas yang berdomisili di Cayman Island.

Setelah transaksi itu, Pradipa menguasai 4,76 persen saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA). Sedang Panbridge dan Threadmore masing-mas-

ing menguasai 3,33 persen dan 3,81 persen saham MPPA. “Latar belakang dan pertimbangan masuknya tiga pemegang saham tersebut karena MPPA merupakan investasi strategis yang memiliki tingkat pengembalian yang baik di masa depan,” terang Direktur MLPL Agus Arismunandar dalam keterangan resmi Selasa, 11 Mei 2021.

Jadi, penguatan jaringan sektor layanan ojek online dan warung digital berlangsung lebih dulu sebelum penggabungan Gojek dan Tokopedia. Sedangkan GoTo adalah perusahaan yang fokusnya pada pembiayaan atau transaksi online. Jelas sudah, sisi pemasaran produk dan jasa, transaksi, juga distribusi kini berada dalam satu genggaman.

Sedangkan Kevin Aluwi mengemukakan, kesepakatan yang lahir antara dua perusahaan besar dalam waktu yang relatif singkat dan lancar dapat tercapai karena Gojek dan Tokopedia memiliki tujuan yang sama. Tujuan itu yakni berupaya memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen yang didukung oleh jaringan mobilitas tercepat dan terbesar dari para mitra driver serta merchant. “Grup GoTo berada dalam posisi kuat untuk memenuhi lebih banyak lagi kebutuhan sehari-hari konsumen,” ujar Kevin.

Sementara William menambahkan, selain mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, Grup GoTo akan memberikan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap produk dan layanan berkualitas. Menurut dia, hal itu sejalan dengan misi perusahaan sedari awal yakni untuk selalu menciptakan dampak sosial dalam skala besar, termasuk memberikan kesempatan yang setara bagi pegiat UMKM lokal dalam mengembangkan bisnisnya.

Serta di saat yang sama,



memberikan pengguna akses yang sama terhadap barang dan jasa di seluruh Indonesia. "Berdirinya Grup GoTo membuktikan bahwa bangsa Indonesia dapat bermimpi dan mewujudkannya," kata dia.

Misi kami, sambungnya, sejak awal adalah untuk selalu menciptakan dampak sosial dalam skala besar. "Perjalanan untuk mencapai tujuan kami masih panjang, tetapi hari ini adalah

dan Warburg Pincus.

Belum lagi Goldman Sachs yang bertindak sebagai penasihat keuangan Gojek dengan Davis Polk & Wardwell LLP dan Assegaf Hamzah & Partners menjabat penasihat hukumnya. Sedangkan Citi bertindak sebagai penasihat keuangan Tokopedia dengan Allen & Overy LLP sebagai penasihat hukum.

Pada 2020, total Nilai Transaksi Bruto Grup (GTV) melampaui USD 22 miliar

sebagian besar pengeluaran rumah tangga konsumen. Penggabungan Gojek dan Tokopedia tak pelak menjadi merger dengan skala terbesar yang dilakukan di Indonesia dan di Asia.

"Pengemudi Gojek akan mengirimkan lebih banyak paket Tokopedia, mitra dagang dari semua ukuran akan mendapatkan keuntungan dari solusi bisnis yang diperkuat dan kami akan menggunakan skala gabungan kami



tentang dimulainya langkah bersama," lanjut William.

Dampak besar sudah pasti karena investor di belakang GoTo setidaknya kini mencapai 20 lembaga dengan skala bisnis nasional hingga global: Alibaba Group, Astra International, BlackRock, Capital Group, DST, Facebook, Google, JD.com, KKR, Northstar, Pacific Century Group, PayPal, Provident, Sequoia Capital, SoftBank Vision Fund, Telkomsel, Temasek, Tencent, Visa,

dari 1,8 miliar jumlah transaksi pada 2020 dengan sekitar 100 juta pengguna. Total armada pengemudi terdaftar lebih dari dua juta dan sekitar 11 juta mitra pedagang per Desember 2020.

Nah, wujud GoTo merupakan merupakan perusahaan yang menggabungkan layanan on-demand (sesuai dengan kebutuhan), sistem pembayaran digital dan marketplace. GoTo lahir sebagai platform konsumen digital terbesar di Indonesia, yang mencakup

untuk meningkatkan inklusi keuangan di wilayah berkembang dengan potensi pertumbuhan yang belum tergalai," kata Andre.

Sudah menguasai jaringan pemasaran produk dan jasa, transaksi online, juga jalur distribusi logistiknya, apalagi kalau bukan ekspansi? Warungnya ada, yang mengantar barang dan jasa tersedia, fasilitas transaksi juga.

Selamat datang Go To. Kita akan lihat-lihat dulu tentu. •



LEBIH TEGAS MENEKAN ANGKA PENULARAN COVID-19

PPKM Mikro berlanjut pada 1-14 Juni 2021. Kali ini di seluruh provinsi tanpa kecuali. Jalur-jalur penyeberangan seperti di Bakauheni wajib pemeriksaan dengan uji usap. Jelas upaya pengetatan ini untuk menekan laju penularan Covid-19 meskipun pasca lebaran kali ini tak segawat pada tahun sebelumnya.

Upaya menekan laju penularan Covid-19 semakin gencar. Usai Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin, 24 Mei 2021, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengumumkan Pemerintah menerapkan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di 34 provinsi mulai dari 1 hingga 14 Juni 2021.

Terdapat penambahan empat provinsi dari periode sebelumnya yaitu Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, yang mengalami peningkatan kasus aktif, serta Sulawesi Barat. "Untuk PPKM Mikro tahap selanjutnya, [tanggal] 1-14 Juni mendatang, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara diikutsertakan, ditambah

Provinsi Sulawesi Barat," ujar Menko Airlangga.

Selain Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, tujuh daerah lain yang mengalami peningkatan kasus aktif adalah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Lebih jauh Airlangga memaparkan, sebesar 56,4 persen dari kasus aktif nasional berada di Pulau Jawa dan 21,3 persen di Sumatera. Lima provinsi



yang berkontribusi terhadap 65 persen kasus aktif tersebut adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua, Jawa Tengah, dan Riau. "Kasus aktif di Jawa Barat mencapai 31,4 persen, sehingga ini menjadi perhatian," ujarnya.

Dalam keterangannya, Ketua KP-CPEN juga memaparkan tentang perkembangan kasus COVID-19 secara nasional. Per 23 Mei 2021 tingkat kasus aktif mencapai 5,2 persen, kesembuhan 92,0 persen, dan kematian 2,8 persen. Sedangkan terkait ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) ruang isolasi dan ICU, secara nasional masih berada di angka yang aman yaitu 31 persen. Namun, sejumlah daerah memiliki tingkat keterisian di atas rata-rata BOR nasional.

"Tidak ada (BOR) yang di atas 60 persen. Beberapa yang lebih tinggi dari nasional atau di atas 40 persen adalah Sumatera Utara 58 persen, Riau 55 persen, Sumatera Barat 54 persen, Aceh 47 persen, Bangka Belitung 47

persen, Sumatera Selatan 47 persen, Riau 47 persen, Jambi 43 persen, Lampung 41 persen," paparnya.

Selanjutnya, Airlangga memaparkan mengenai tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker yang dapat berasosiasi dengan peningkatan kasus COVID-19. Provinsi Bali memiliki tingkat kepatuhan 88,89 persen, Jawa Timur 87 persen, DKI Jakarta 65 persen, Jawa Barat 73 persen, Jawa Tengah 75 persen, Riau 67 persen, Kepulauan Riau 70 persen, dan Sumatera Utara 62,76 persen.

"Memang yang terlihat, yang (tingkat kepatuhannya) di bawah 70 persen itu tingkat (kasus) aktifnya tinggi. Jadi ini yang harus diingatkan Pak Kepala Satgas COVID-19," ujarnya.

Sedangkan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengemukakan, kenaikan kasus aktif Covid-19 di Indonesia setelah libur panjang Lebaran diketahui tidak sebesar kenaikan kasus pada periode yang

sama pada tahun sebelumnya. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada dan terus menegakkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

"Walau secara menyeluruh tren kenaikan ini relatif kecil dibanding tahun lalu, kami dari Satgas di bawah arahan Bapak Menko dan petunjuk Bapak Presiden, menegaskan kita tidak boleh lengah, tetap waspada, selalu menaati protokol kesehatan. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan jangan kendur, tidak boleh longgar," ujarnya.

Doni merinci, kasus aktif per tanggal 23 Mei 2021 berada pada angka 5,23 persen di mana terjadi kenaikan 0,22 persen dari kasus aktif tanggal 19 Mei 2021. Hal itu diikuti dengan penurunan angka kesembuhan menjadi 91,99 persen pada 23 Mei 2021 dari sebelumnya 92,22 persen pada 18 Mei 2021.

Sementara untuk tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed oc-

cupancy ratio (BOR) juga mengalami peningkatan. Per tanggal 23 Mei 2021 kemarin, BOR nasional meningkat menjadi 30,66 persen dari sebelumnya 29,40 persen pada tanggal 18 Mei 2021.

"BOR Wisma Atlet pada tanggal 18 Mei yaitu 15,02 persen, pada tanggal 24 Mei hari ini telah meningkat menjadi 21,77 persen. Ada peningkatan 6,75 persen," imbuhnya.

Untuk menekan laju penularan, pihaknya menggalakkan kewajiban pemeriksaan (mandatory check) di sejumlah pelabuhan. Salah satunya ialah dilakukan di Pelabuhan Bakauheni yang menjadi pintu masuk bagi arus balik masyarakat menuju Jakarta.

ujung tombak dalam PPKM berskala mikro ini diharapkan dapat benar-benar berjalan optimal dan mampu menjabarkan program-program yang berkaitan dengan upaya pencegahan semakin meluasnya penyebaran pandemi Covid-19. "Kita bekerja keras bersama untuk menekan kasus aktif harian dan mudah-mudahan kekhawatiran kita akan adanya peningkatan kasus setelah libur panjang tidak sampai begitu besar. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi modal utama kita," tandasnya.

Doni Monardo juga menilai kerja sama berbagai pihak di tingkat daerah dalam upaya untuk menekan laju pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan ini perlu terus dioptimalkan. Posko COVID-19 yang berada hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat menjabarkan dan menjalankan ketentuan PPKM Mikro.

"Posko diharapkan betul-betul bisa menjabarkan program-program yang telah disampaikan oleh pemerintah, baik itu yang berhubungan dengan karantina mandiri bagi mereka yang baru saja kembali dari bepergian, termasuk juga apabila ada lima rumah yang terdapat positif COVID-19, maka inisiatif untuk melakukan micro lock-down skala RT betul-betul dilaksanakan," sambungnya.

Dalam upaya pengendalian mobilitas pascamudik, Doni menilai salah satu upaya yang dilakukan yaitu mandatory check COVID-19 bagi pelaku perjalanan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung berjalan cukup memuaskan. "Satgas Khusus untuk mandatory check di bawah pimpinan Kapolda Lampung dan Komandan Korem Garuda Hitam yang telah bekerja sama dengan semua komponen yang ada, sehingga kita lihat hasilnya cukup memuaskan. Dinas Kesehatan, Dinas DLLAJR, Dinas Perhubungan, ASDP Pelabuhan, semuanya telah bekerja keras, dan juga kepatuhan masyarakat untuk mau mengikuti program pemeriksaan, mulai dari antigen swab sampai dengan pelaksanaan PCR swab," ujarnya.

Dari hasil PCR test, ungkap Doni, ditemukan sebanyak 532 orang pelaku perjalanan yang positif COVID-19. Mereka kemudian dirawat di sejumlah tempat di Lampung, baik di rumah sakit maupun tempat-tempat yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

"Sebagian besar dari pelaku perjalanan ini adalah yang akan kembali ke Jabodetabek. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya Gubernur Lampung, Kapolda, Danrem, dan seluruh instansi, baik instansi pemerintah pusat serta daerah di wilayah Lampung, kurang begitu maksimal dalam pemeriksaan akan banyak sekali yang lolos ke wilayah Jabodetabek, sehingga dapat menularkan keluarganya dan para kerabat, serta para rekan-rekan di tempat kerja," tuturnya.



"Telah ditemukan sebanyak 532 orang yang positif Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan swab PCR (di Bakauheni). Mereka sekarang dalam perawatan di sejumlah tempat di Lampung baik di rumah sakit maupun tempat-tempat yang telah disiapkan pemerintah Provinsi Lampung," kata Doni.

Selain itu, Doni Monardo juga kembali mengingatkan pentingnya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Para pelaku perjalanan yang baru saja kembali dari bepergian diminta untuk melakukan karantina mandiri agar tidak membahayakan keselamatan warga sekitar dan rekan-rekan kerja lainnya.

Posko pengawasan yang menjadi

PPKM Mikro telah berjalan dengan baik. Jadi, perlu terus dipertahankan.

"Kami sudah melihat kerja sama di tingkat daerah, di kota, dan juga di kabupaten sudah sangat baik. Kerja sama ini perlu terus digalang, perlu selalu dikumandangkan. Gotong royong memberikan bantuan kepada warga yang terpapar COVID-19 adalah strategi kita yang paling murah dibandingkan kalau sudah tidak terkontrol, semakin parah, dan fasenya masuk kepada fase yang lebih berbahaya, yaitu fase berat dan kritis, bisa jadi tidak terselamatkan," ujarnya.

Ia mengungkapkan, di dalam pertemuan Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya pelaksanaan PPKM Mikro untuk menekan laju pandemi.

Menko Airlangga mengakui, mandatory check di Pelabuhan Bakauheni yang diperpanjang sampai dengan 31 Mei 2021 bertujuan mengendalikan mobilitas masyarakat sekaligus menekan laju penularan COVID-19 pada masa arus balik pasca libur Lebaran 2021. "Tadi dibahas dan diusulkan perpanjangan mandatory check dari Pelabuhan Bakauheni atau Sumatera, diperpanjang sampai dengan 31 Mei. Karena yang kembali ke Jakarta baru 59.967, sedangkan yang kemarin keluar dari Jawa masuk Sumatera lebih dari 400 ribu," ujarnya.

Ketua KPCPEN mengungkapkan, dari hasil mandatory check yang diberlakukan di Pelabuhan Bakauheni ditemukan sebanyak 532 orang pelaku perjalanan yang hendak menyeberang

“
Diperiksa melalui RT-Antigen di titik penyekatan [sebanyak] 156.162 orang, yang kena COVID-19 0,6 persen atau 1.064 orang.

dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa terkonfirmasi positif COVID-19 atau 0,89 persen dari total 59.967 orang yang diperiksa.

Sementara, random test COVID-19 dengan RT-Antigen yang dilakukan kepada para pelaku perjalanan dari sejumlah provinsi di Pulau Jawa menuju ke Jakarta di sejumlah titik penyekatan menunjukkan sebanyak 1.064 orang reaktif atau 0,6 persen dari total 156.162 orang. "Diperiksa melalui RT-Antigen di titik penyekatan [sebanyak] 156.162 orang, yang kena COVID-19 0,6 persen atau 1.064 orang. Kemudian dengan GeNose, diperiksa 340.047, yang terkena positif 2 persen atau 6.925," ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, dalam kurun waktu 4-5 minggu ke

depan pemerintah akan terus memantau potensi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Berdasarkan data perkembangan kasus secara nasional per tanggal 23 Mei, terjadi sedikit peningkatan kasus aktif menjadi 5,2 persen, tingkat kesembuhan menurun menjadi 92 persen, sementara tingkat kematian berada di angka 2,8 persen.

Meskipun relatif kecil, jumlah kasus harian nasional juga mengalami tren peningkatan yaitu di kisaran 5.000 kasus per hari, setelah sebelumnya berada di kisaran 3.800 – 4.000. "Kita mesti memonitor 4-5 minggu ke depan. Walaupun dalam satu minggu ini kita juga melihat beberapa kasus ada kenaikan namun masih dalam taraf yang

Menhub mengimbau agar masyarakat bisa melakukan tes secara mandiri dari kota asal agar tidak perlu mengantre melakukan tes di sejumlah titik pemeriksaan dan menghindari penumpukan penumpang di Pelabuhan Bakauheni. Untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pasca Lebaran dari Sumatera ke Jawa dan adanya peningkatan kasus positif di Sumatera yang berpotensi memicu penularan COVID-19, pemerintah telah membentuk Satgas Khusus Provinsi Lampung yang dikomandoi oleh Kapolda Lampung untuk memastikan masyarakat yang akan menyeberang sudah melakukan rapid test antigen.

Tercatat, ada tujuh titik pengecekan



jauh lebih kecil dibandingkan sesudah Lebaran tahun kemarin," ujarnya.

Berkaitan dengan test wajib di Bakauheni, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengingatkan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa menggunakan angkutan penyeberangan disiplin menerapkan wajib tes cepat atau rapid test antigen. "Kami mohon kepada jajaran Pemprov Lampung dan Satgas Khusus COVID-19 Lampung yang diketuai Kapolda untuk terus melakukan pengawasan agar tidak ada yang lolos pemeriksaan," ujarnya saat meninjau sejumlah lokasi pelaksanaan rapid test antigen di Lampung dan di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu, 22 Mei 2021.

rapid test antigen di Lampung dan Bakauheni yaitu di Pos Rest Area KM 172 B, Pos Rest Area KM 87 B, Pos Rest Area KM 20 B, Pos Pelabuhan Bandar Bakau, Pos Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Pos Simpang Hatta, dan Bega-dang IV. "Saya sangat berterima kasih kepada Satgas Khusus dan Pemda karena sudah melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan, karena ini wajib dilakukan di penyeberangan," ujar Menhub.

Ia mengungkapkan, dari kalkulasi 400 ribu orang yang sudah menyeberang ke Sumatera baru sekitar 33 persen yang kembali. "Untuk itu memang harus ada upaya yang lebih dari kita untuk memastikan mereka melakukan rapid test antigen," ujarnya. •



GANGSIR DIGITAL YANG BIKIN SEBAL

Jelas bikin sebal. Yang kena gangsir itu data pribadi dan dapat disalahgunakan. Sisi keamanan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia memang sangat rawan.

Penggangsiran data terjadi lagi. Kali ini data 279 juta penduduk Indonesia yang bocor. Info itu viral antara lain melalui akun Twitter @nuicemedia yang menginformasikannya pada Kamis, 20 Mei 2021 pukul 11.19 WIB. Terduga peretas menyebutkan ada satu juta data sampel gratis untuk diuji dan 20 juta data terdapat foto pribadi.

Selanjutnya, data milik 279 juta penduduk di Indonesia bocor dan dijual di forum online Raid Forums. Akun @Br_AM berkicau memperlihatkan

tangkapan layar diskusi jual-beli data. Disebutkan bahwa harga yang ditawarkan sebesar 0.15 bitcoin. "Source BPJS Kesehatan and they sell it for 0.15 BTC, around 6K USD," tulis akun tersebut.

Penjual merupakan anggota forum online Raid Forums dengan nama akun "Kotz". Dalam narasinya penjual mengungkapkan data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji. Data tersebut termasuk data penduduk yang telah meninggal dunia.

Dari data 279 juta orang tersebut,

20 juta antaranya disebut memuat foto pribadi. Adapun data tersebut dijual dengan harga 0,15 bitcoin yang jika dikonversi ke rupiah sekitar Rp 81,6 juta. Untuk meyakinkan calon pembeli, penjual turut menyertakan tiga tautan berisi sampel data yang bisa diunduh secara gratis.

Kasus ini dengan cepat menyebar di media sosial Twitter. Salah seorang pengguna Twitter dengan handle @Br_AM pun mencoba menanyai penjual dari mana dataset itu didapatkan. Dalam sebuah tangkapan layar per-



Jubir Kominfo Dedy Permadi

cakapannya dengan penjual, disebutkan bahwa ratusan juta data itu diambil dari situs resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di alamat bpjs-kesehatan.go.id.

Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala Humas BPJS, M.Iqbal Ma'ruf mengatakan bahwa sampai Mei 2021, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 222,4 juta jiwa. Angka yang lebih sedikit dibanding data yang diklaim oleh penjual data.

Pihak BPJS pun melakukan penelusuran dan memastikan apakah benar data yang bocor berasal dari BPJS Kesehatan. "Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," kata Iqbal.

Toh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turun tangan dalam kasus kebocoran data ini. Menteri Kominfo, Johnny G Plate, mengatakan bahwa setelah pihaknya mendalami data tersebut, ditemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data milik BPJS Kesehatan.

"Hal tersebut didasarkan pada struk-

tur data yang terdiri dari Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/ Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Johnny, Jumat, 21 Mei 2021.

Sebelumnya, pada awal Mei 2020 lalu Tokopedia dia, platform e-



commerce terbesar Indonesia, mengatakan sedang menyelidiki upaya peretasan dan klaim bahwa jutaan data penggunaannya telah bocor. "Kami menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia," kata VP of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak.

Namun, sambungnya, Tokopedia memastikan bahwa informasi penting pengguna, seperti password, tetap terlindungi di balik enkripsi. "Sekarang ini, kami terus menyelidiki masalah ini dan tidak ada informasi tambahan yang dapat kami sampaikan," tambah pernyataan itu.

Perusahaan pengawas pelanggaran data Under the Breach mengunggah sebuah pesan Twitter, Sabtu, 2 Mei 2020, memperlihatkan tangkapan layar dari seorang individu yang mengklaim dia memiliki data pribadi 15 juta pengguna

**konsultan keamanan siber
Teguh Aprianto**

Tokopedia ketika meretas situs itu pada Maret 2020.

Menurut tangkapan layar, yang memperlihatkan nama, alamat email, dan tanggal lahir, peretasnya mengklaim dia memiliki database yang jauh lebih besar dan meminta bantuan untuk "membongkar" password pengguna.

Pada Minggu, 3 Mei 2020, Under the Breach, yang mengawasi kejahatan si-

pedia dan Gojek, platform transportasi dan pengiriman online yang meluas ke sektor transaksi finansial online dengan kehadiran GoTo pada Senin, 17 Mei 2021.

Sepanjang 2020 saja, tercatat ada enam klaim penggangsi data enam lembaga swasta dan satu lembaga pemerintah. Selain Tokopedia, lima lembaga swasta yang datanya ditawarkan di forum-forum peretas adalah

harga 2.000 dollar AS atau sekitar Rp 28,2 juta rupiah pada November 2020 lalu. Toh pihak RedDoorz mengatakan bahwa data personal dan informasi finansial pengguna, seperti informasi kartu kredit atau password yang disamakan tidak termasuk dalam data yang dibobol.

Sedangkan data dari lembaga pemerintah yang kena gangsi pada 2020 adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Temuan dugaan kebocoran data pemilih tetap KPU ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @underthebreach pada 21 Mei 2020 lalu. Data tersebut dibagikan di forum komunitas hacker dalam bentuk file berformat PDF. Sang peretas mengklaim telah mengantongi 2,3 juta data kependudukan. Data yang dihimpun mencakup sejumlah informasi sensitif, seperti nama lengkap, nomor kartu keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, serta beberapa data pribadi lainnya.

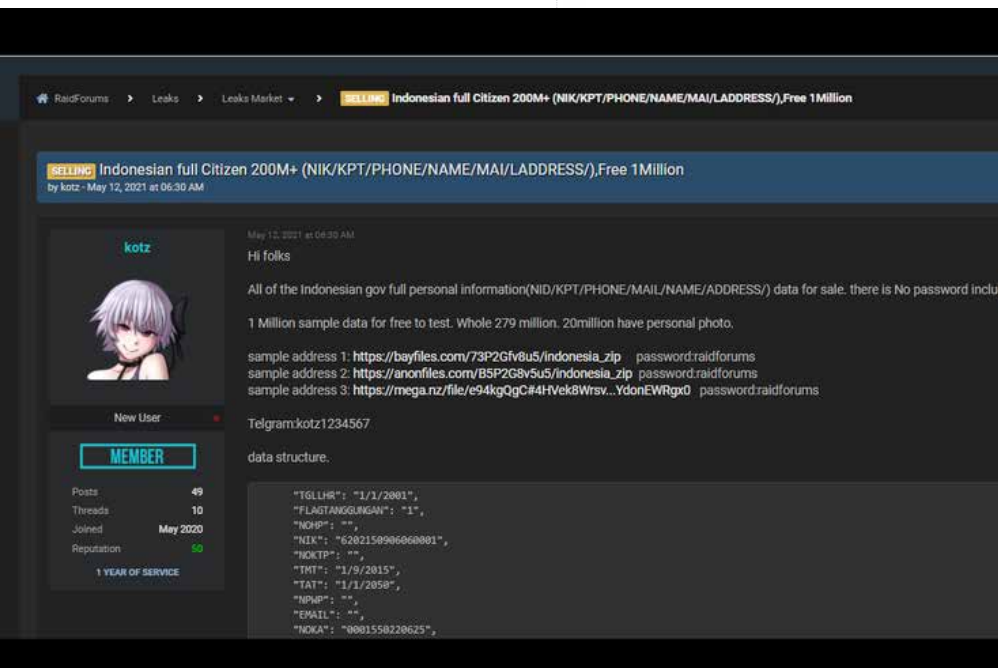
Nah, data BPJS Kesehatan juga merupakan kelolaan negara. Satriyo Wibowo, pakar keamanan siber dan Sekretaris Forum Keamanan Siber Indonesia, mengatakan kebocoran itu bisa menimbulkan banyak kekhawatiran publik.

"Ini adalah data pribadi yang dapat memiliki implikasi sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan pemilik," katanya, menambahkan bahwa data tersebut dapat digunakan untuk aplikasi pinjaman online palsu. "Dengan pelanggaran yang sebagian besar tidak terdeteksi ini, keseriusan perlindungan data kini dipertanyakan," katanya

Sedangkan Kominfo mengonfirmasi bahwa data peserta BPJS Kesehatan benar-benar bocor dan dimiliki Kotz. "Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller)," kata Jubir Kominfo Dedy Permadi.

Namun ia menyebutkan, data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual. Yang benar hanya 100.002 data. Hal tersebut didasarkan pada data noka (nomor kartu), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan.

Setelah temuan itu, Kominfo me-



PERIKSA KEBOCORAN DATA BPJS

Apakah kejadian kebocoran data BPJS KESEHATAN turut mengorbankan data milik kamu? Periksa sekarang untuk melihat hasilnya.

Nomor Anggota BPJS

PERIKSA SEKARANG

Kami tidak akan menyimpan data yang kamu masukkan.

ber, mengatakan, bahwa peretasnya telah memperbarui unggahannya untuk menjual data 91 juta pengguna itu seharga "\$5.000 di Darknet." Perusahaan itu mengunggah tangkapan layar dari penawaran peretas yang diunggah online.

Sekitar setahun sesudahnya, muncul pengumuman merger antara Toko-

situs jual beli produk TIK bhinneka.com, perusahaan fintech KreditPlus, perusahaan jual-beli online Shopback, RedDoorz, dan Cermati.

Data pengguna RedDoorz yang bocor mencakup nama, e-mail, password bcrypt, foto profil, gender, hingga nomor ponsel. Lebih dari 5,8 juta data pengguna RedDoorz yang dijual se-

manggil Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Dasar pemanggilan antara lain Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Dalam aturan tersebut, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi, wajib untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain. PSE juga wajib untuk menyampaikan pember-

sehatan juga diimbau untuk melakukan langkah-langkah pengamanan, guna memitigasi risiko kebocoran data pribadi yang lebih luas.

"Investigasi yang dilakukan oleh tim internal BPJS akan selalu dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo dan BSSN," ungkap Menkominfo Johnny.

Mengenai investigasi ini, pegiat dan konsultan keamanan siber Teguh Aprianto berpendapat meski disebutkan bahwa data tersebut bersumber dari BPJS Kesehatan, pelakunya mungkin saja masih orang Indonesia. Indika-

ujar pegiat cum konsultan yang juga aktif di media sosial twitter ini.

Sedangkan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha, mengatakan tidak ada sistem yang 100 persen aman dari ancaman peretasan maupun bentuk serangan siber lain. Namun tetap saja peristiwa semacam ini seharusnya tidak terjadi pada data yang dihimpun oleh instansi pelat merah seperti BPJS Kesehatan.

Maka perlu dibuat sistem yang terbaik dan dijalankan oleh yang berkom-

“
Ini adalah data pribadi yang dapat memiliki implikasi sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan pemilik

itahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, apabila diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.

Selain memanggil Direksi BPJS Kesehatan, Kominfo juga mengambil langkah antisipatif lain dengan mengajukan pemblokiran tiga tautan sampel data yang dicantumkan penjual di situs Raid Forums. Adapun tiga tautan tersebut adalah bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com.

Situs Raid Forums memang memungkinkan diakses siapa saja dengan mudah karena bukan merupakan situs gelap atau rahasia (deep web). Dengan pemutusan akses ke tautan tersebut, peluang penyebaran data yang lebih luas bisa diminimalisir.

Setelah bertemu dengan Direksi BPJS Kesehatan, Menkominfo meminta agar mereka bisa segera memeriksa dan menguji ulang ratusan juta data yang diduga bocor. Pihak BPJS Ke-



Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha

sinya, kata dia, pelaku tak bisa membedakan antara premi dan gaji, juga menggunakan frasa-frasa khas lokal seperti 'KTP' dibandingkan dengan ID card yang bersifat global.

Ia menambahkan, jika proses investigasi menemukan penetrasi, misalnya mengunduh data dari eksternal, semestinya sistem merekam aktivitas tersebut. Selanjutnya pelacakan pelaku akan lebih terbuka kemungkinannya. "Tapi jika dicek data itu tidak ada, berarti ada indikasi dilakukan oleh internal," kata Teguh, Jumat, 21 Mei 2021.

Sayangnya, kata dia, hasil investigasi ini pun jarang diumumkan. "Padahal data pribadi itu milik warga negara,"

peten agar selalu bisa mengamankan dengan standar tinggi. Ia lantas merekomendasikan agar seluruh instansi pemerintah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit digital forensik dan mengetahui apakah ada sistem yang 'berlubang'.

Tujuannya untuk menghindari pengangsaan data di masa depan. "Pemerintah juga wajib melakukan pengujian sistem atau penetration test secara berkala kepada seluruh sistem lembaga pemerintahan. Ini sebagai langkah preventif, sehingga dari awal dapat ditemukan kelemahan yang harus segera diperbaiki," tandas Pratama. •



PON XX DI PAPUA KALI INI SOAL KENDALA

Mudah-mudahan hanya masalah yang mudah teratasi. Sejumlah kendala terungkap saat PON XX Papua semakin mendekat.

Entah ada kerikil dalam sepatu, batu sandungan, atau malah aral melintang jauh lebih besar dari itu kendalanya. Salah satunya, Kota Jayapura, Papua menolak menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. "Kita tolak jadi tuan rumah PON," kata Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menegaskan, Senin, 24 Mei 2021.

Pemerintah pusat sejauh ini telah memastikan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang semula terjadwal pada

akhir 2020 akan berlangsung pada Oktober 2021. Papua tetap akan menjadi tuan rumah, apalagi sarana dan prasarana fisiknya memang sudah berjalan dan siap 90 persen pada akhir 2020 lalu. Beriringan dengan PON XX 2021, menurut rencana, akan berlangsung Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI, yang melibatkan para atlet penyandang disabilitas pada 17-28 November 2021.

Nah, kepastian penyelenggaraan PON XX itu semakin jelas dalam rapat

terbatas persiapan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI pada Senin, 15 Maret 2021, di Istana Merdeka, Jakarta. "Pak Gubernur Lukas Enembe menyampaikan bahwa prinsipnya semua sudah siap, maka pelaksanaan PON XX itu pada tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021," ungkap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden selepas rapat terbatas.

Belakangan, kesiapan Papua men-



jadi tuan rumah PON XX kembali muncul dari Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal yang bertemu dengan Amali pada Selasa, 11 Mei 2021. Belakangan Klemen Tinal meninggal dunia di Jakarta pada Jumat, 21 Mei 2021.

Apakah penolakan Jayapura menjadi tuan rumah PON XX terkait dengan duka cita kehilangan Wagub Klemen Tinal? Ternyata bukan.

Jauh hari, setidaknya pada awal April 2021, Mano sudah mewanti-wanti PB PON XX soal penyelenggaraan PON di Kota Jayapura. O ya, Kota Jayapura disetting akan menjadi tuan rumah PON XX, yang akan mempertandingkan 37 cabang olahraga, bersama dengan tetangga sebelahnya Kabupaten Jayapura di pesisir utara Papua, juga Kabupaten Merauke di pesisir selatan, dan Kabupaten Mimika di kawasan pegunungan.

Nah, pada Rabu, 7 April 2021 lalu, Mano menyebutkan hingga kini tak ada komunikasi baik, antara pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini PB P O N dengan pemerintah Kota Jayapura.

"Saya mau kasih ingat saja, PB PON jangan bikin malu orang Papua. Karena harga diri orang

Papua itu mahal. Selama ini tidak ada komunikasi, tidak ada satu persen yang dikasih ke cluster di Kota Jayapura," ujarnya, saat sambutan di hadapan rombongan peserta Chief de Mission Meeting II PON XX.

Ia merinci, terdapat 16 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di Kota Jayapura dan sampai saat ini masih ada sejumlah venue yang dipalang. "Venue belum rampung, di antaranya selam laut, renang perairan terbuka, layar. Kemudian dayung masih 50 persen, bulu tangkis, sepatu roda dan paralayang," ungkapnya.

Ketua KONI, Marciano Norman menyampaikan apresiasinya kepada Wali Kota Jayapura yang dengan berani menyampaikan keluh kesah yang dialami oleh pemerintah Kota Jayapura dalam kesiapan penyelenggaraan PON. Marciano lantas berjanji akan berusaha membantu menyelesaikan komunikasi yang tersumbat, antara



Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano

kota dan provinsi agar bisa terbuka.

Harapannya, pelaksanaan PON sukses atas kerja keras bersama. "Jadi sukses PON itu bukan atas kerja keras sekelompok pihak. Beri kita waktu agar bisa menyelesaikan masalah ini," ungkapnya.

Marciano juga mengimbau kepada peserta agar mendukung komitmen Provinsi Papua dan masyarakatnya untuk sukses PON di tanah Papua. "Jangan ada kekhawatiran sedikitpun karena harga diri Papua dipertaruhkan. Papua siap menjadi tuan rumah yang baik di PON 2021. Mari kita sambut baik komitmen dan kesungguhan pemer-

dengan momen ini bisa membangun komunikasi dan hal-hal yang prinsip yang harus diselesaikan PB PON," kata Yunus.

Ia membenarkan yang menyelenggarakan PON adalah Sub PON yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Timika dan Merauke. Sehingga PB PON mempunyai tugas mendorong. "Saya sangat bangga Pak Walikota bisa jujur dan menceritakan apa adanya permasalahan yang terjadi dalam menyukseskan PON, sehingga dapat dicari jalan keluar bersama," katanya

Sedangkan mengenai venue-venue yang dibangun di Kota Jayapura

ga kini baru dua nama saja yang disahkan yakni stadion dan bandara. Kita pahami dulu prosesnya," jelasnya.

Sebelumnya, Yunus Wonda, mengemukakan, persiapan penyelenggaraan event olahraga terbesar nasional lima tahunan itu sudah hampir rampung. "Sudah 90 persen," kata Yunus Wonda yang dikutip laman resmi PON XX, Minggu, 28 Desember 2020.

Hingga akhir 2020, Pemerintah Provinsi Papua telah membelanjakan dana APBD lebih dari Rp3,8 triliun untuk pembangunan dan renovasi venue yang bakal digunakan untuk PON 2021. Jumlah tersebut merupakan



Ketua KONI, Marciano Norman

intah dan masyarakat Papua menjadi tuan rumah yang baik," ujarnya.

Sedangkan Ketua Harian PB PON, Yunus Wonda menyambut baik koreksi yang disampaikan oleh Wali Kota Jayapura, sehingga menjadi suatu catatan bagi PB PON. Terkait dengan pengembangan venue-venue sebenarnya adalah tanggung jawab dari Disorda, baik di provinsi berkoordinasi dengan kabupaten/kota.

"Kami mengakui selama ini ada komunikasi putus dan hari ini dengan beliau menerima kami merupakan suatu hal yang luar biasa. Kami harap

yang masih di palang, Yunus mengaku hal ini sebenarnya dibangun menggunakan APBD Provinsi Papua dan masih milik pemerintah provinsi.

"Nantinya ketika PON berakhir, pemerintah akan menyerahkan hibah kepada pemerintah kota. Ketika diserahkan kepada pemerintah kota, maka otomatis pemerintah mempunyai hak untuk menentukan dan memberi nama bagi venue tersebut," jelasnya.

Yunus memastikan semua venue masih milik Pemprov Papua dan nama yang diberikan kepada gubernur belum disahkan oleh DPR Papua. "Hing-

akumulasi dari lima tahun anggaran, yakni 2016 sebesar Rp228,6 miliar, 2017 sebesar Rp447,2 miliar, Rp879,3 miliar pada 2018, Rp2,2 triliun pada 2019, dan Rp2 triliun dalam APBD 2020.

Selain dari dana APBD, pemerintah juga telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp2,3 triliun untuk mendukung proses pembangunan venue PON Papua. PB PON, lanjut Yunus, masih terus melakukan pengadaan peralatan yang diprediksikan proses lelangnya tuntas, sehingga peralatan sudah bisa tiba di Jayapura awal 2021.

"Kalau dilihat dari sisi administrasi kita sudah ada pada posisi 75 persen untuk kesiapan penyelenggaraan PON, saya yakin dan optimis tahun 2021 Papua sudah sangat siap. Walaupun saat ini masih ada wabah virus corona, Papua pasti siap mensukseskan PON di Bumi Cenderawasih," ujarnya.

Sedangkan Mano memastikan pemerintah Kota Jayapura pada dasarnya mendukung pelaksanaan PON yang dijadwalkan berlangsung pada 2-15 Oktober 2021. "Selaku kepala daerah, saya ingin menyambut baik tamu yang datang di rumah saya. Maka kami datang lengkap dari sisi keamanan, adat, agama. Kami membuka diri untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para tamu," kata dia.

Namun, ketika waktu pelaksanaan semakin dekat, Mano malah menyebutkan Kota Jayapura menolak menjadi tuan rumah PON XX. Apa alasan penolakan?

"Kita tolak jadi tuan rumah PON. Tidak ada transparansi, kita mau bikin apa, uangnya dari mana?" ungkap Mano, Senin 24 Mei 2021.

Mano yang juga Ketua Sub PB PON Kota Jayapura agaknya kecewa dengan perkembangan terakhir dalam komunikasi dengan PB PON XX selama empat hari pertemuan pada 17-20 Mei 2021. Menurut dia, PB PON sama sekali tidak mau membuka Rencana Kerja Anggaran (RKA).

"Bagaimana empat hari kita bahas RKA itu mereka simpan mati (jumlah anggaran). Tidak ada yang sebut angka," ujarnya. Padahal, ujarnya, akan ada pelimpahan wewenang dari PB PON ke Sub PB PON.

Transparansi, kata dia, sangat penting dalam penyelenggaraan pesta olahraga sebesar PON. Alasannya, ia tak mau penyelenggaraan PON tidak maksimal karena pola komunikasi yang sangat buruk.

"Kalau buka RKA kita tahu mana yang sudah ditangani oleh PB PON dan mana yang mau digeser ke kota, itu yang kita kerjakan. Kan harusnya begitu supaya terbuka?" kata Mano.

Di Kota Jayapura ada 15 venue PON yang diban-

gun oleh PUPR dan Pemprov Papua dengan 16 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dengan jumlah sebanyak itu, Mano menegaskan, ia tidak akan mengalokasikan APBD Kota Jayapura untuk pelaksanaan PON. "Sudah tiga tahun Dana Otsus kita untuk PON, tiap tahun Rp65 miliar, jadi sudah Rp 195 miliar," kata dia.

Nah, yang menanggapi Mano kali ini adalah Wakil Sekretaris IV Bidang Humas PB PON XX, Kadkis A Matdoan. Ia menjelaskan, saat ini PB PON belum selesai menyusun RKA. "Sekarang lagi penyusunan RKA tingkat sub," kata dia.

Menurut dia, PB PON telah menyampaikan hal tersebut kepada seluruh Sub PB PON. Kadkis memastikan seluruh Sub PB PON akan diberikan anggaran penyelenggaraan.

"Beberapa hari lalu, ketua harian sudah sampaikan dalam rapat nanti sebagian anggaran diserahkan ke sub untuk menyelenggarakan. Jadi dana itu setelah tim anggaran membahas dan kalau sudah oke nanti dananya diserahkan," ujarnya.

Sedangkan untuk para peserta dari luar Papua, Ketua KONI Marciano Norman menegaskan, PB PON Papua akan menanggung semua biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi selama di Papua sejak H-3 hingga H+2 pertandingan cabor terkait. "Akomodasi, transportasi, konsumsi selama di Papua itu 100 persen tanggung jawab PB PON," ujar Marciano pada Maret 2021 lalu.

Namun, yang juga menjadi masalah adalah anggaran dari masing-masing kontin-

gen provinsi untuk pembiayaan tiket pesawat dan persiapan PON yang belum sepenuhnya cair. Marciano Norman berharap Gubernur setempat memberikan dukungan untuk kontingen provinsinya.

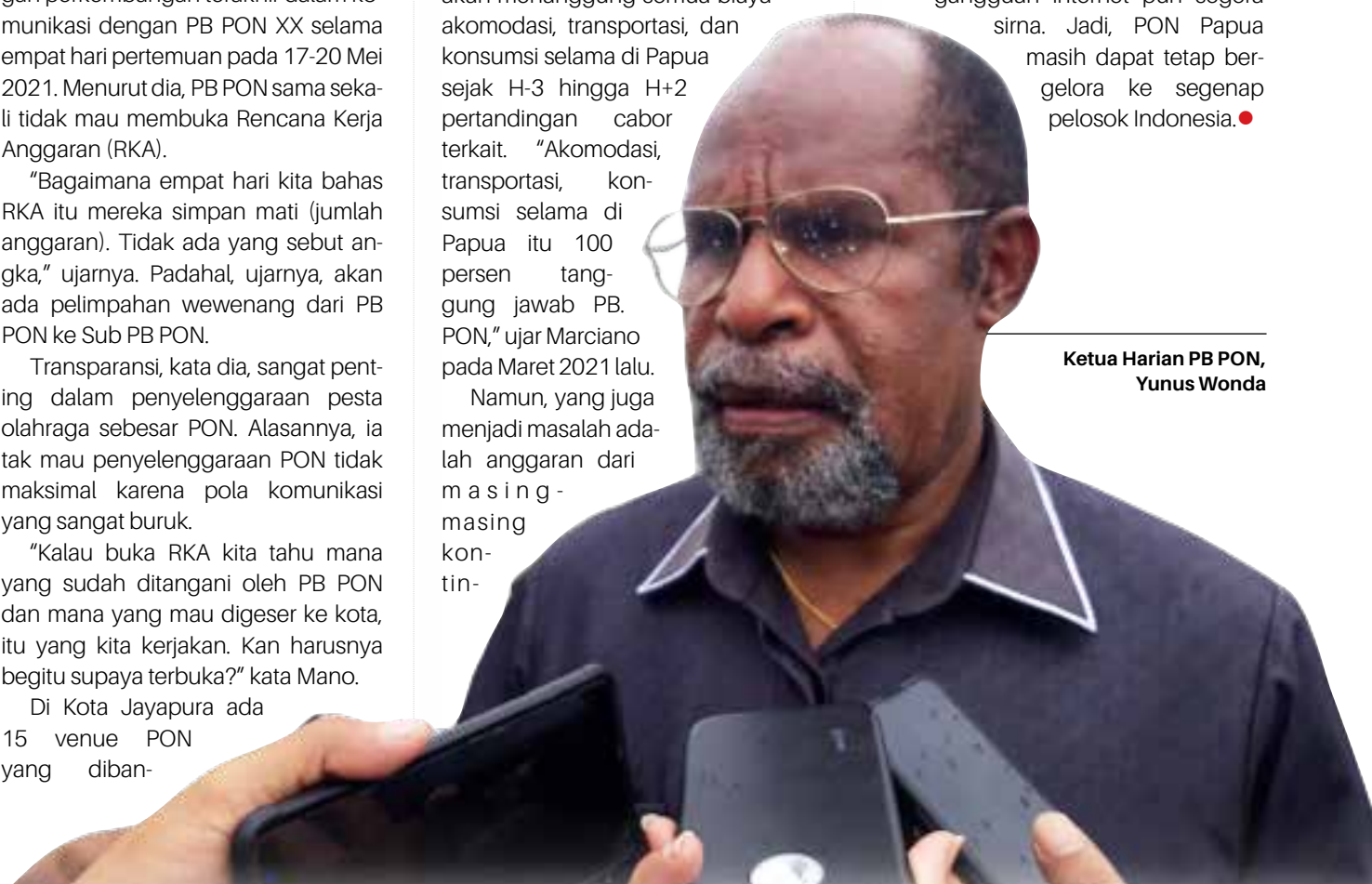
Tak sedikit KONI Provinsi yang mengakui mengalami kendala anggaran yang belum cair menjelang PON XX di Papua tahun ini. Hal ini dikeluhkan, di antaranya oleh KONI Maluku Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, NTB, Banten, dan Kalimantan Utara.

KONI Maluku Utara, sebagai contoh, pernah mengeluhkan anggaran yang hanya cukup sampai dengan pelatda dan belum cukup untuk menerbangkan kontingen ke Papua. Padahal, Maluku Utara relatif sangat dekat dengan Papua dibandingkan dengan Aceh atau Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung misalnya.

Semoga saja segala kendala yang terungkap sejauh ini akan teratasi segera. Meski PON XX Papua kemungkinan membatasi jumlah penonton, masih ada peluang menonton lewat tayangan televisi atau internet.

Tapi, kabarnya jaringan internet di Papua sedang terganggu. Semoga gangguan internet pun segera sirna. Jadi, PON Papua masih dapat tetap bergelora ke segenap pelosok Indonesia. •

**Ketua Harian PB PON,
Yunus Wonda**





BERPISAH DAN BERJUMPA LAGI DI KOTA TUA

Berpisah karena agenda politik masih bisa berjumpa di ranah bisnis. Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bekerja sama mengembangkan pariwisata kota tua dengan menggandeng Menteri BUMN Erick Thohir.

Sempat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno berpisah dengan Gubernur Anies Rasyid Baswedan. Namun, ketika Sandi menjadi Menparekraf, keduanya bekerja sama lagi di bidang pengembangan pariwisata dengan target wisatawan nusantara.

Malah Menteri BUMN Erick Thohir juga bergabung dengan keterlibatan salah satu BUMN Pariwisata dalam rencana pengembangan wisatawan lokal. Gubernur Anies juga mengajak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset

dan Teknologi Nadiem Makarim untuk ke depannya.

Begitulah. pada akhir April 2021 lalu, berlangsung penandatanganan Head of Agreement (HoA) atau kesepakatan awal di Halaman Museum Fatahillah, Taman Sari, Jakarta Barat. HoA kali ini melibatkan Jakarta Experience Board, nama bisnis Badan Usaha Milik DKI yakni PT Jakarta Tourisindo (JXB). Selain itu terlibat pula beberapa BUMN antara lain Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) yang merupakan

patungan BUMN dan BUMD.

Tujuan kesepakatan adalah pembentukan perusahaan patungan joint venture baru dalam rangka percepatan perkembangan kawasan Kota Tua-Sunda Kelapa. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan Kota Tua-Sunda Kelapa.

Gubernur Anies mengemukakan, ingin mentransformasi kawasan Kota Tua-Sunda Kelapa menjadi destinasi wisata yang ramah pejalan kaki di utara Jakarta. "Kami mengharapkan dukungan dari berbagai kementerian

seperti Kementerian BUMN untuk mendorong revitalisasi aset, akses pendanaan baik government maupun non-government, serta mengoptimalkan peran ITDC untuk mengembangkan Kota Tua-Sunda Kelapa,” ujar Anies

Anies juga mengajak Menteri Pendidikan, Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim untuk terlibat dalam pengembangan kawasan Kota Tua-Sunda Kelapa. Ia berharap Nadiem mengangkat narasi tentang Kota Tua dalam khazanah sejarah dan budaya di Ibu Kota.

Selanjutnya Anies juga mengharapkan dukungan penuh dari Bank Indonesia (BI) agar berbagai program UKM BI, serta berbagai program digitalisasi keuangan bisa diterapkan di kawasan tersebut. “Kami juga minta support dari dunia usaha, dan para pemilik properti di kawasan (Kota Tua), untuk terus berinvestasi dan mengembangkan ekonomi kawasan selaras dengan narasi besar Kota Tua-Sunda Kelapa,” ucap Anies sambil menoleh kepada Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang menyempatkan hadir di acara itu.

“Tanpa peran swasta, pemerintah tidak bisa apa-apa. Ibarat naik perahu, you do the rowing, the government do the steering. Pemda DKI akan memfasilitasi dengan berbagai regulasi, anggaran, pemikiran, pelibatan institusi Pemda dan pemanfaatan aset BUMD/pemda untuk menjamin sukses transformasi Kota Tua-Sunda Kelapa,” kata Anies.

Dari kalangan perusahaan yang terlibat dalam HoA, tampak Dirut PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo, Dirut PT MRT Jakarta (Persero) William Sabandar, Dirut PT MITJ Tuhayat, Direktur Utama JXB, Novita Dewi, dan Direktur Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer. Jadi, memang urusan serius tampaknya.

Keseriusan itu tampak pula dari sambutan Menparekraf Sandi Uno. Menurut dia, konteks HoA mempertimbangkan kontribusi turis lokal terhadap perekonomian di Indonesia lebih bernilai dari kontribusi wisatawan mancanegara. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, Sandi bilang kontribusi turis lokal terhadap pereko-

nomian negara mencapai hampir lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

“Kontribusi wisatawan nusantara (turis lokal) terhadap ekonomi itu Rp 1.400 sampai Rp 1.500 triliun, hampir lima persen PDB kita. Sementara itu, kontribusi wisatawan mancanegara hanya Rp275 triliun sampai Rp300 triliun,” kata Sandi.

Oleh sebab itu, Sandi menilai

Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu mengatakan pembangunan fasilitas pelayanan bagi turis domestik di Indonesia saat ini belum maksimal.

Padahal, 78 persen okupansi atau jumlah kunjungan di kawasan wisata berasal dari turis lokal. “Ada 78 persen turis domestik (lokal) yang selama ini kita belum melayaninya. Kita masih setengah hati melayani turis lokal itu,”



nomian Menteri BUMN Erick Thohir sudah betul terkait pentingnya menarik minat turis lokal dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas terhadap pemulihan ekonomi nasional usai Covid-19. Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan

kata Erick.

Karena itu, Erick menegaskan pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, tidak akan segan-segan lagi dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi turis domestik di berbagai wilayah, seperti di Lampung dan Ibu

• INFO WISATA

Kota Jakarta kali ini. “Karena pelayanan turis domestik tidak kalah pentingnya dengan pelayanan turis Internasional,” kata dia.

Dalam mendorong fasilitas turis lokal di Ibu Kota, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun kawasan Kota Tua hingga Pelabuhan Sunda Kelapa. Kerja sama tersebut ditandai dengan dibentuknya perusahaan patungan elibatkan tiga Badan Usaha, antara lain BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan Badan

di antaranya Stasiun Juanda, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Sudirman.

“Tadinya stasiun itu kumuh dan membingungkan, Pak Anies memimpin langsung supaya stasiun itu sangat ramah (friendly) dan sangat memudahkan masyarakat Jakarta,” kata Erick.

Dia mengatakan sasaran berikutnya adalah peningkatan fasilitas publik di Kota Tua hingga Pelabuhan Sunda Kelapa yang diimpikan bisa seperti Bali dan Labuan Bajo. “Ya kebetulan, kami sendiri sedang memperbaiki fasilitas

kolaboratif, masif dan terstruktur.

“Kolaboratif melibatkan banyak pihak, pusat, daerah, swasta, UKM, dan pakar. Masif sendiri ialah yang dikelola bukan sejumlah bangunan saja, tetapi kawasan seluas 240 hektar dari Sunda Kelapa, hingga Kota Tua. Sementara terstruktur adalah melalui pembentukan Joint Venture yang diberi banyak fleksibilitas dan otoritas untuk mengelola,” sambungnya.

Menurut dia, Kota Tua ke depan tidak akan menjadi destinasi wisata semata, tetapi juga sebagai ekosistem ekonomi yang dinamis yang menarik orang



Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yaitu PT Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board/JXB) dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Erick mengatakan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta tersebut bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, Kementerian BUMN juga bekerja sama dengan Pemprov DKI terkait peningkatan fasilitas empat stasiun terpadu, yang menurut Erick, telah beres ditata supaya tidak lagi kumuh,

Pelindo I-IV yang tidak lain salah satunya di Sunda Kelapa,” kata Erick.

Senada dengan Erick, Anies mengakui kerja sama DKI dengan BUMN memang bukan barang baru dalam pengembangan wisata Kota Tua. “Yang kita lakukan ini bukanlah hal baru karena sejak bang Ali Sadikin, upaya mentransform Kota Tua sudah dilakukan. Bedanya, kali ini dengan cara baru, sehingga kita lebih optimis meraih sukses,” ucap Anies

Menurut dia, cara baru itu adalah

untuk berkarya. “Mentransform Kota Tua dan Sunda Kelapa bukanlah lari sprint, tetapi lari maraton. Perlu waktu panjang dan energi luar biasa sehingga kerjasama dari para stakeholder mutlak diperlukan. Tanpa kolaborasi, kita akan kehabisan tenaga di tengah jalan,” tandasnya.

Jadi, HoA kali ini layak start maraton. Masih panjang track yang akan menjadi laluan. Semoga sampai finish dan tujuan. Yang sempat berpisah, bertemu jua di Kota Tua. ●

JAKARTA EXPERIENCE BOARD YANG NAIK DAUN

Dalam penandatanganan HoA pengembangan Kota Tua, Jakarta Utara, ada nama yang tampaknya akan menarik perhatian di masa-masa mendatang: Jakarta Experience Board. Singkatnya JXB, pilihan branding untuk Badan Usaha Milik DKI yakni PT Jakarta Tourisindo. Dengan bisnis inti perhotelan dan pariwisata BUMD DKI Jakarta yang berdiri pada 1996 ini memiliki unit bisnis perhotelan sebanyak tujuh hotel yang tersebar di DKI Jakarta dan Bogor.

Saat ini, Jakarta Experience Board (JXB) memiliki unit bisnis baru di bidang pariwisata yang akan meluncurkan program-program inovatif pariwisata sebagai bagian dari upaya pembenahan wajah baru Jakarta Experience Board. Yang tak kalah istimewa, CEO JXB adalah perempuan bernama Novita Dewi.

Perkembangan terakhir, kinerja JXB sedang mendapat banyak perhatian lantaran tetap positif di tengah penurunan jumlah turis di Indonesia yang merembet pada merosotnya tingkat pertumbuhan ekonomi di sektor perhotelan dan pariwisata. Dalam situasi yang terdampak pandemi Covid-19 yang memasuki tahun kedua ini, BUMD ini justru menunjukkan kinerja finansial yang baik melalui transformasi dan kolaborasi yang menjadi strategi penting dalam upaya mewujudkan pencapaian tersebut.

Direktur Utama Jakarta Experience Board Novita Dewi menjelaskan BUMD ini akhirnya berhasil membukukan laba pada 2020 senilai Rp 2,7 miliar rupiah (hasil audit KAP) setelah rugi selama empat tahun berturut. Novita menjelaskan, sejumlah langkah strategis dilakukan untuk membawa perubahan agar revenue perusahaan meningkat dengan menerapkan good corporate governance (GCG).

"Kami melakukan transformasi dan rebranding. Pembenahan dilakukan

dari sisi bisnis, tata kelola hingga sumber daya manusia. Alhamdulillah, meski di saat pandemi Covid-19 kami justru berhasil meraih keuntungan," ujarnya, Jumat, 30 April 2021.

Menurut Novita, JXB juga berhasil melakukan efisiensi-efisiensi. Sehingga, neraca keuangan perusahaan terus membaik. "Saat awal saya menjabat ada 540 karyawan dengan 60 persen antaranya mendekati usia pensiun. Kami memberikan opsi pensiun dini terhadap 118 orang hingga terjadi efisiensi mencapai sekitar Rp

untuk merevitalisasi dan mengembangkan kawasan wisata Kota Tua-Sunda Kelapa menjadi kawasan wisata berkelas dunia," ujarnya.

Ia menuturkan, JXB mendapat kepercayaan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menyiapkan akomodasi bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 di Jakarta. Setahun ini, JXB telah mengakomodasi 2.132 nakes yang menginap di enam unit hotel.

"Program pelayanan Nakes meru-



700 juta per bulan," ungkapnya.

JXB, lanjutnya, juga terus berekspansi bisnis di luar usaha pengelolaan tujuh unit hotel. Antara lain menjadi perintis dalam new normal business dengan membuat Drive-in Concert dan Drive-in Cinema menjadi konser dan pemutaran film pertama dengan konsep drive-in di Jakarta.

"Tidak hanya hotel, JXB juga merambah sektor pariwisata lainnya. Terbaru, kami baru saja melakukan Head of Agreement dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)

pakan kolaborasi yang terjalin antara JXB, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, PT Transjakarta serta didukung oleh perusahaan swasta maupun masyarakat melalui berbagai donasi," ungkapnya.

Sedangkan Direktur Administrasi dan Keuangan JXB, Zulfarshah menambahkan, pada tahun 2019 kinerja keuangan perusahaan defisit atau merugi hingga mencapai Rp21 miliar. "Alhamdulillah, per 2020 kita sudah mencatatkan keuntungan meski baru Rp 2,7 miliar. Pada semester pertama 2021 juga tumbuh positif. Kita akan terus mengembangkan bisnis agar sustainable," ucapnya. •

SUPER AIR JET DATANG SEMOGA SANGGUP BERTAHAN

Di masa pandemi Covid-19, maskapai baru Super Air Jet mengumumkan kehadirannya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap maskapai ini mendorong pertumbuhan investasi di sektor pariwisata.

Maskapai penerbangan dan industri pariwisata memang bukan setali tiga uang. Namun, keduanya jalin berkelindan.

Begitulah, saat mendengar kehadiran maskapai Super Air Jet, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno melihatnya akan mendorong pertumbuhan investasi di sektor pariwisata. Maskapai dengan target utama pasar turis domestik ini diharapkan bakal meningkatkan pergerakan wisatawan dalam negeri.

"Munculnya maskapai baru Super Air Jet ini akan menambah potensi investasi di sektor wisata," kata Sandiaga dalam media briefing, Senin, 10 Mei 2021. Ia juga mengapresiasi maskapai baru yang memulai bisnis di masa pandemi Covid-19 di tengah lesunya

sektor pariwisata, transportasi, dan turunannya.

Sandi mengatakan perusahaan penerbangan itu akan membuka lapangan kerja dan menambah optimisme pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor wisata. Menteri Sandi menyebut pula kehadiran maskapai Super Air Jet ini akan menguntungkan masyarakat dengan lebih banyak pilihan plus harga tiket yang akan lebih kompetitif.

"Sangat diuntungkan pasti untuk masyarakat. Karena keterbatasan dari kapasitas sekarang, banyak penerbangan yang mengurangi layanannya dan juga tentunya harganya juga meningkat," kata Sandi.

Dia pun menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Super Air Jet. Kehadiran pemain baru di industri pen-

erbangan, apalagi di masa pandemi, seperti jadi bukti bahwa mulai pulihnya ekonomi dan sektor pariwisata di Indonesia.

"Kebetulan saya juga dari industri penerbangan. Walaupun tidak berhasil pada saat menjadi pengusaha, tapi saya salut, di tengah-tengah ketidakpastian seperti ini, saya apresiasi ada perusahaan yang berani meluncurkan maskapai baru, yaitu Super Air Jet," ujarnya.

Namun, ia juga mewanti-wanti soal sulitnya mengelola bisnis maskapai penerbangan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengenang sulitnya berbisnis di industri penerbangan di tengah krisis. Lewat perusahaannya, Saratoga, dan Tiger Airways, Sandiaga sempat mengelola pesawat Mandala, namun bisnis itu akhirnya tumbang.



Sebelumnya, Direktur Utama (Chief Executive Officer) Super Air Jet, Ari Azhari, buka suara mengenai sejarah berdirinya maskapai Super Air Jet yang diperkenalkan di tengah situasi pandemi Covid-19. Ari menjelaskan, Super Air Jet berdiri pada Maret 2021.

"Super Air Jet merupakan maskapai penerbangan swasta baru kategori layanan pengangkutan penumpang berjadwal harian yang berasal dari Indonesia dan sepenuhnya dimiliki atas penyertaan modal orang lokal (dalam negeri)," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin, 3 Mei 2021.

Kini Super Air Jet telah memiliki kode penerbangan "IU" dari IATA (Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional) dan "SJV" dari ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional). Sedangkan di balik operasional Super Air Jet, banyak figur berpengalaman di bisnis penerbangan Indonesia.

Ari tercatat pernah memegang jabatan penting di maskapai Lion Air sebagai General Manager Service Lion Group. Sebagai pemain lama, Ari pasti mengetahui peta pasar penerbangan Indonesia dengan 270 juta penduduk, dan setengahnya berusia kurang dari 30 tahun.

"Juga sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga angkutan udara dalam upaya mobilitas orang dan barang sangat dibutuhkan, sejalan konektivitas antarwilayah agar saling terhubung dan tercipta dengan baik," ujar Ari.

Sedangkan di mata politisi Alvin Lie yang juga berpengalaman di bidang penerbangan, Super Air Jet menunjukkan kelihaihan membaca peluang. "Saya melihat kehadiran Super Air Jet menunjukkan kejelian pengusaha untuk membeli pesawat dengan harga yang murah. Kita ketahui, selama pandemi ini banyak Airline yang mengembalikan pesawat dan tidak mampu melanjutkan kontrak atau bahkan tidak mampu bayar sewanya," katanya, Selasa, 4 Mei 2021.

Selain itu, bahan bakar Airbus 320-200 terkenal cukup efisien dan irit. Hal itu membuat maskapai memiliki pasar di segmen low cost carrier (LCC). Apalagi sejak diterpa pandemi Covid-19,

harga menjadi pertimbangan utama pengguna jasa penerbangan.

"Ini terkenal irit dan efisien bahan bakarnya sehingga cocok untuk LCC. Potensi pasar LCC di tengah pandemi kebutuhan untuk bepergian itu akan selalu ada dan selama pandemi daya beli itu menurun, sehingga konsumen akan lebih sensitif terhadap harga,"

merupakan generasi terbaru. Pesawat ini diproduksi oleh produsen pesawat asal Perancis, Airbus.

Pada 2016 lalu, kata Alvin, Airbus secara resmi menyerahkan A320neo kepada operator pertamanya, maskapai asal Jerman, Lufthansa. "Jadi, pesawat Airbus 320-200 sebetulnya juga cukup tua. Sekarang kita sudah



Direktur Utama (Chief Executive Officer) Super Air Jet, Ari Azhari.



Alvin Lie

tutur dia.

Namun Alvin Lie mengemukakan Airbus 320-200 adalah pesawat lama. Menurut dia, dalam bisnis penerbangan internasional, pesawat jenis A320neo atau new engine option

bicara RB 320neo," ungkap Alvin.

Terkait dengan pariwisata, tentu saja keamanan dan kenyamanan tetap harus menjadi perhatian utama. Kita tunggu Super Air Jet terbang perdana hingga bisnisnya tahan sekian lama. •



Masih Pandemi

PARA PESOHOR INI SIBUK BISNIS KULINER



Pandemi Covid setahun terakhir jelas berdampak pada banyak sektor ekonomi, termasuk pariwisata dan hiburan. Maka banyak pesohor yang berkurang malah sepi undangan tampil. Alhasil, mereka beralih usaha. Sejumlah pesohor memilih berbisnis kuliner. Dengan penunjang teknologi informasi produk kuliner para pesohor ini boleh jadi laris melalui jalur order online juga berpromosi di media sosial.

VANESSA ANGEL

Saat sedang hamil dan sempat terjerat perkara narkoba, bisnis suami Vanessa, Bibi Ardiansyah, juga harus tutup karena pandemi Covid-19. Pemasukan pun mendadak berkurang. Namun, kegemarannya pada kebab menginspirasi untuk membuat usaha Kebab Ngidam.

Vanessa, dengan bantuan suami dan adik-adik iparnya, membuka pesanan kebab handmade dan membuatnya setiap hari. Tak disangka, yang memesan banyak sekali. Pernah dalam satu hari ia menerima order

lebih dari 500 kebab. Selain kebab, ibu dari Gala Sky Ardiansyah ini juga menjual nasi biryani bernama Tante Biryani.

Kini usahanya semakin berkembang. Dari yang hanya menerima pesanan dari rumah, kini Vanessa sudah membuka dua outlet dan website untuk bisnis kebab dan nasi bryaninya. Bahkan ia sudah berani membuka kemitraan (franchise) untuk brand-nya itu.

Toh ada pula kisah dukanya. Seleb yang kerap tampil seksi itu pernah panik karena akun pribadi Instagram miliknya sempat hilang karena laporan netizen. Ia mengaku sangat rugi karena kehilangan pelanggan dan pesanan, serta tidak bisa promosi barang endorse yang sudah terlanjur disepakatinya. Sekarang akunya sudah kembali, dan terpaksa di-private demi keamanan.

AYU TING TING

Ayu Ting Ting masih bisa tampil di layar kaca. Tapi penghasilan harian masih terasa kurang. Apalagi bayaran di TV itu kadang bisa tertunda selama

beberapa bulan.

Jadi, ibu dari Bilqis Khumairah Razak itu turun ke dunia bisnis dengan membuka usaha aneka camilan. Membawa branding Camilan Tingting Collection, Ayu menjual aneka snack seperti macaroni, keripik balado, kacang pedas, keripik ikan, dan masih banyak lagi.

Ia juga juga berjualan bakpao, Bakpao Viral. Bakpau jualannya sering dikatai haters-nya dan beberapa foodblogger tidak enak. Tapi entah mengapa ia selalu kebanjiran order.

Masih tetap sebagai ibu tunggal (single mom) hingga triwulan I 2021 ini, Ayu tampak pantang menyerah. Ia juga mencoba peruntungannya dengan berbisnis sambal buatan sang ayah, Abdul Rozak, serta tumpeng mini untuk berbagai acara. Wah. Banyak juga jualan kulinernya nih Ayu.

DELON THAMRIN

Sepinya tawaran bernyanyi dan manggung selama pandemi sangat berdampak pada penyanyi jebolan Indonesian Idol, Delon Thamrin. Maka,

untuk mengisi kesibukannya di masa pandemi ini sang istri meng-



sulkan agar ia berjualan makanan beku siap saji dengan citarasa Indonesia dan western.

Misalnya saja ayam panggang barbeque, rendang, telur balado, lasagna, jengkol balado, hingga beef stew. Dan buat yang mau menu nonhalal, ada juga kok, seperti BBQ Babyback Ribs, siomay, dan pastel tutup.

Delon dan istri memberi nama bisnis kulinernya Kodel Foods, yang artinya Koko Delon. Ia sangat bersyukur masih bisa melakukan bisnis kecil-kecilan di rumah dan membantu sang istri mendapatkan penghasilan.

Selain berjualan, Delon juga 'menjual' bakatnya yang lain, yakni mengajar vokal. Tadinya tak ban-

yak yang belajar vokal dengannya. Namun selama pandemi jumlah muridnya semakin banyak. "Sebelum pandemi aku juga ngajar, tapi dikit. Setelah

pandemi ini berlangsung makin banyak, orang makin jenuh di rumah, mereka ingin belajar vokal secara online dan private," ujarnya.

ARI LASSO

Tak kurang Ari Lasso terjun pula ke bisnis kuliner. Dampak pandemi berupa berkurangnya order manggung juga merembet kepada staf dan krunya yang selalu dibawa saat tampil.

Dengan segala perhitungan itu, Ari Lasso memutuskan berjualan siomay. Resep siomaynya ia dapatkan dari seorang teman yang memang sudah jadi langganan Ari Lasso karena san-



gat menyukai siomay buatan temannya tersebut.

Dalam sebuah vlognya bersama Maia Estianty, Ari Lasso mengaku membuka bisnis ini agar bisa tetap menggaji para anggota bandnya yang sepi job gara-gara pandemi. Dengan merek dagang Lassomay, siomay Ari Lasso ini bisa dipesan di Instagram lewat akun @lassomay. arilasso dan bahkan sudah memiliki delapan cabang lassomay di sekitar Jakarta.

Para pesohor yang berbisnis kuliner ini masih berpijak pada kenyataan. Terkenal di dunia hiburan namun terdampak oleh berkurangnya kegiatan yang banyak melibatkan penonton. Toh karena sudah tersohor, mereka dapat mempromosikan produk kulinernya di media sosial dan berjualan online.

Warga biasa namun memiliki keahlian lain bisa juga berpromosi di media sosial. Selain makanan dan minuman, masih banyak produk lain yang menjadi keperluan. Silakan memilih yang paling pas untuk masing-masing. ●





LAKNAT PERIODE KEDUA

Laknat atau kutukan periode kedua, *second term curse*, jelas berasal dari tradisi politik Amerika Serikat. Namun, tradisi ini terbawa juga ke Indonesia dengan munculnya wacana serupa.

Dalam tradisi politik AS, anggapan tentang laknat itu terkait dengan banyaknya Presiden AS yang terpilih untuk dua masa jabatan ternyata kurang berhasil di periode terakhirnya. Umumnya yang menyebabkan periode kedua kurang mengesankan adalah gangguan berupa skandal besar, kebijakan yang lamban, malah bencana alam, dan hal-hal lain yang membuat kinerja pemerintah menjadi lebih buruk dibandingkan dengan periode pertama kepresidenan.

Istilah yang biasa bersanding dengan laknat periode kedua adalah bebek lumpuh (*lame duck*), sebuah kiasan tentang pemimpin politik yang serba salah lantaran periode jabatannya segera berakhir dan publik akan lebih mewacanakan siapa penggantinya di periode mendatang. Seba-

liknya, dengan masa jabatan yang akan segera habis itu, bebek lumpuh sering tergelincir dengan membuat keputusan-keputusan politik yang kontroversial. Malah karena tak mungkin melanjutkan kepemimpinannya di periode mendatang, sesuai dengan aturan konstitusional, kredibilitas dan pengaruhnya merosot. Selanjutnya, proyek-proyek yang diprogramkan malah terancam gagal atau mangkrak.

Namun, di mata Rick LaRue yang mendalami sistem pemilihan politik di AS, periode kedua kepresidenan bukanlah kutukan melainkan desakan persiapan masa pemilihan presiden berikutnya yang membuatnya demikian. Demikian pula pemimpin bebek lumpuh pada periode keduanya. "Faktor lain yang menurunkan kinerja presiden pada tahun 5-8 (di

AS setiap periode kepresidenan berlangsung empat tahun) termasuk perubahan sosial dan teknologi, perilaku pemungutan suara dan siklus berita. Kita sekarang memperkirakan dan menerima lebih sedikit dari presiden dalam periode kedua mereka," ujarnya dalam laman web pribadinya.

Toh laporan majalah *The Economist* pada 2013 menyebutkan bahwa adanya laknat periode kedua memang berbasis dukungan data. Laporan tersebut menyatakan bahwa masing-masing dari sebelas periode kedua yang sejak awal pemerintahan Theodore Roosevelt hingga akhir pemerintahan George W. Bush kurang sejahtera secara ekonomi daripada masa jabatan pertama masing-masing presiden, kecuali untuk masa jabatan kedua Truman, Ronald Reagan, dan Bill Clinton. Daftar itu se-

makin panjang dengan periode kedua Presiden Barack Obama.

Sedangkan LaRue mengungkapkan, setelah lebih dari dua abad, masa jabatan empat tahun presiden mungkin sudah saatnya berakhir. Pemilihan kembali setelah empat tahun untuk masa jabatan kedua dan terakhir, La Rue mengakui, memang menghasilkan terlalu banyak masalah pemerintahan dan tidak masuk akal lagi.

"Empat tahun tampaknya tidak lagi memenuhi kebutuhan rakyat. untuk memenuhi tanggung jawab sipil mereka untuk menilai kesesuaian incumbent untuk melanjutkan jabatannya," kata LaRue.

Alasannya, pertama, masa jabatan pertama presiden diperas di kedua ujungnya; Sembilan bulan pertamanya diatur oleh anggaran pendahulunya, dan dua tahun terakhir didedikasikan untuk kampanye untuk pemilihan kembali — dirinya dan wakil partainya. Bahkan 40 tahun yang lalu, ketika kampanye permanen muncul, William Simon menyimpulkan bahwa masa jabatan pertama presiden sebenarnya bukan empat tahun tetapi "satu setengah tahun."

Kedua, ada keuntungan umum yang luas dari jabatan periode pertama, membuat lebih sulit menolak presiden yang sedang duduk daripada memilih penantang. Selain memiliki visibilitas publik yang sudah terlihat, pemegang jabatan dapat menunjukkan kemampuan mereka untuk melayani di kantor hanya dengan menempatnya. Pemilihan kembali dipandang sebagai kontes yang menjadi milik mereka. Ketiga, tampaknya ada kecenderungan di kalangan rakyat Amerika untuk mendukung petahana. Keempat, keunggulan petahana telah diperkuat lebih jauh oleh kampanye permanen — pemilihan tanpa henti serta pertimbangan elektoral menjadi yang terpenting dalam keputusan tentang pemerintahan.

Namun, pada periode kedua, banyak Presiden AS yang kinerjanya tidak lebih baik dari yang pertamanya. Masa jabatan kedua George W Bush mencakup dua perang yang memecah belah yang dimulai pada masa jabatan pertamanya, defisit yang meningkat, tanggapan pemerintah yang

gagal terhadap Badai Katrina, dan keruntuhan ekonomi terburuk sejak Depresi Besar 1930.

Sedangkan masa jabatan kedua Barack Obama sebenarnya ditandai dengan sedikit peningkatan popularitasnya, kemungkinan didorong oleh perbandingan yang menguntungkan dengan dua calon penggantinya, Donald Trump dan Hillary Clinton. Namun, pencapaian jangka kedua seperti kesepakatan nuklir Iran dan pembukaan Kuba masih kontroversial, dan dua inisiatif utama — perjanjian perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik dan, khususnya, pencalonan Merrick Garland ke Mahkamah Agung — diblokir karena lawan-lawannya menunda tindakan sampai setelah pemili-

kinerja yang berkurang daripada prestasi.

"Saya berpendapat bahwa nilai periode kedua secara konsisten memang berkurang dari yang pertama dan karenanya, periode kedua tidak boleh memiliki panjang yang sama dengan periode pertama," ungkap LaRue. Lebih lanjut, LaRue mengusulkan agar Presiden AS yang terpilih pada periode kedua memiliki masa pemerintahan lebih panjang, enam tahun misalnya.

"Usul ini memang tidak akan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi politik AS saat mendekati seperempat milenium (25 tahun Abad XXI).... Pada akhirnya, bagaimanapun, mengoreksi ketidakcukupan pemili-



han, gerakan klasik melawan presiden yang lemah.

Ringkasan singkat ini, kata dia, bukan bermaksud menunjukkan bahwa presiden tidak berprestasi apa-apa dalam periode kedua mereka atau bahwa fungsi mereka sebagai manajer birokrasi atau kepala administrasi negara, khususnya dalam urusan luar negeri, tidak terlayani dengan baik atau cakap dalam lima hingga delapan tahun. Sebaliknya, kata LaRue, ini hanya mengingatkan bagaimana periode kedua lebih dikenal karena

han kembali presiden setelah empat tahun akan membutuhkan perhatian dan tindakan," tandasnya.

Tradisi politik AS mengakui bahwa periode kedua kepresidenan kerap menunjukkan penurunan kinerja pemerintahan dibandingkan dengan yang pertama. Apakah tradisi ini juga terbawa ke Indonesia? Meskipun pasca Reformasi 1998, baru dua Presiden Republik Indonesia yang memerintah hingga periode kedua: Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. •

WACANA LAKNAT PERIODE KEDUA DI INDONESIA

Sejak Reformasi 1998, baru dua Presiden Indonesia yang memerintah hingga dua periode. Namun, laknat periode kedua sudah menjadi wacana.

Pelantikan Presiden Joko Widodo berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2020. Namun, belum juga acara pelantikan berlangsung, Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah memprediksi Presiden Joko Widodo akan mengalami permasalahan di bidang hukum dan politik yang lebih besar di periode kedua.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menyampaikan hal serupa pernah terjadi di periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Acap kali presiden yang memimpin di periode kedua itu gagal atau paling tidak menghadapi turbulensi yang besar, the curse of second period, itu dialami SBY," kata Donal dalam diskusi 'Habis Gelap Terbitlah Kelam' di Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 14 Oktober 2020.

Implikasi pernyataan Donal, baik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo sama-sama menghadapi kemungkinan laknat periode kedua. Untuk masa pemerintahan SBY, Donal menyatakan periodenya disibukkan dengan proses hukum dan politik yang tak beres di periode sebelumnya. Sejumlah kasus menyibukkan SBY, seperti korupsi Hambalang, korupsi Bank Century, dan penerbitan UU Pilkada yang mengatur pemilihan presiden oleh MPR.

Apa yang dikemukakan aktivis ICW tentang pemerintahan SBY, sudah banyak menjadi pemberitaan di media. Di periode kedua SBY antara 2009-2014, sejumlah kasus besar bermunculan dan menyeret citra presiden. Antara lain kasus dana talangan Bank Century. Begitu pula korupsi proyek kompleks olahraga Hambalang. Di periode kedua, tercatat ada 15 kader Partai Demokrat yang mencoreng nama

SBY karena terjerat kasus korupsi.

Dalam kasus Jokowi, kata Donal, masalah akan muncul dari persoalan antikorupsi. Ketidakseriusan Jokowi dalam memperkuat KPK bakal berlanjut di periode selanjutnya. Menurut dia, tak ada ketegasan yang dibuat Jokowi dalam memerangi korupsi. Padahal ICW mencatat selama lima tahun ada 23 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR RI, dua kasus melibatkan menteri, dan 85 kepala daerah.

"Ke depan kami memproyeksi bahwa isu korupsi penegakan dan reformasi lembaga hukum akan jadi isu anak tiri di pemerintahan periode kedua. Preseden yang sama kita alami selama lima tahun, Jokowi hanya bicara investasi dan perizinan," ujarnya.

Selanjutnya, dalam acara 'Diskusi Akhir Tahun: Catatan Kritis di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, dan Hukum Tahun 2019' di kantor PP Muham-



madiyah, Kota Yogyakarta, Senin, 30 Desember 2019, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar juga memperingatkan bahwa Presiden Joko Widodo berpotensi menghadapi laknat periode kedua dengan melemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia juga pemberantasan korupsi makin buruk.

Menurut Zainal, kutukan periode kedua dikenal dalam sistem presiden-sial di Amerika Serikat. "Sangat jarang presiden yang memimpin dua periode berhasil di periode kedua," ujarnya.

Ia menjelaskan, 18 dari 20 Presiden AS atau lebih dari 90 persen dianggap gagal di periode keduanya. Penjelasan kondisi ini dapat dilihat dari sejumlah sebab, mulai dari aspek politik hingga sisi magis seperti nasib Abraham Lincoln yang tewas tertembak di termin keduanya.

Zainal menguraikan lagi soal laknat periode kedua ini di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One yang kini sudah tak lagi tayang. Dalam ILC edisi Selasa, 20 Oktober 2020 lalu, Guru Besar Fakultas Hukum UGM ini mengungkapkan indikasi laknat periode kedua terlihat pada gejala meningkatnya penghakiman publik terhadap Presiden Jokowi.

Antara lain gelombang penolakan terhadap Undang-undang (UU) kontroversial, seperti revisi UU KPK dan UU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) terlihat jelas sebagai puncak kekecewaan publik terhadap mantan Wali Kota Solo itu. Ia menambahkan, kepemimpinan Jokowi bisa mengalami kutukan di periode kedua jika disorientasi ini terseret pada fragmentasi perebutan kekuasaan menuju pemilihan presiden di 2024.

"Segeralah nikahi publik untuk sisa empat tahun ke depan ini karena orientasi presiden adalah kepentingan publik, bukan partai politik. Kalau berkaca kepada Amerika, kutukan di periode kedua ini bisa terjadi karena kepemimpinan mengalami disorientasi pada kepentingan politik langsung," ujarnya

Zainal juga mengingatkan, pergeseran orientasi pada kepentingan partai politik juga akan menjadi senjata pamungkas bagi pihak lain yang berambisi meraih kekuasaan di Pilpres 2024. "Perlu diingatkan bahwa seben-

tar lagi semua akan sibuk menyalahkan presiden, karena siapa pun akan merebut kekuasaan menuju 2024. Mau yang sekarang mesra mesra dengan presiden atau menjadi oposisi nanti akan menyalahkan, dan itu akan menjadi sebuah kegagalan di periode kedua," tandasnya.

Kemudian ada yang mengaitkan kecenderungan disorientasi tadi dengan pandangan Francis Fukuyama. Dalam tulisannya *Democracy and the Quality*

pemerintahan di Indonesia terjadi karena tingginya tingkat klientelisme dan korupsi, serta tidak efektifnya pemberian layanan terhadap sebagian besar penduduk. Fukuyama juga berpendangan pendelegasian otoritas yang lebih besar kepada pemerintah daerah sejak turunnya rezim Soeharto justru telah meningkatkan kesempatan korupsi di seluruh tingkatan eselon.

Pertanyaannya, apakah kecenderungan sentralisasi pemerintahan akan



Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar.



Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz.

of the State, Fukuyama juga menyinggung Indonesia dengan menyebutnya sebagai contoh negara demokrasi baru yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu tetapi gagal memben-tuk pemerintahan yang berkualitas.

Menurut dia, lemahnya legitimasi

berarti penurunan tingkat korupsi? Untuk soal ini, sebenarnya pencegahan dan penindakan korupsi sudah jelas perlu menjadi prioritas. Prioritas itu sekaligus menghalau disorientasi meninggalkan kepentingan publik: se-genap rakyat Indonesia. •

23 TAHUN REFORMASI SELALU ADA HARAPAN

Oleh Zulkifli Hasan



Bangsa yang besar selalu tumbuh dengan harapan. Masyarakatnya tumbuh dengan gagasan tentang masa depan yang lebih baik, adil, makmur, dan sejahtera. Harapan itu harus diwujudkan melalui sejumlah aksi. Dalam iklim demokrasi, interaksi antar ikhtiar yang dilakukan semua elemennya menghasilkan dinamika dan perubahan-perubahan. Di sana terdapat tarik-menarik, kompromi, negosiasi. Tetapi pada akhirnya kita sepakat membangun bangsa dengan sebuah konsensus, kesepakatan bersama.

Kali ini kita memperingati 23 tahun reformasi. 20 Mei 1998, rezim Orde Baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun runtuh. Rezim itu dianggap gagal mengelola harapan publik karena perilaku para penyelenggaranya yang menyuburkan praktik KKN alias korupsi, kolusi dan nepotisme. Akumulasi kekecewaan dan kemarahan publik yang dipicu krisis ekonomi, ditambah distrust di kalangan elit terhadap Pak Harto, menciptakan gelombang demonstrasi dan kerusuhan di mana-mana.

Desakan kelompok mahasiswa yang meminta Presiden Soeharto turun pada saatnya mendapatkan dukungan sejumlah elit. Kelompok masyarakat sipil pun terkonsolidasi untuk menyuarakan hal yang sama. Puncaknya, 21 Mei itu,

Presiden Soeharto menyatakan pengunduran diri, menyerahkan mandat kepada wakil presiden Habibie. Mahasiswa pun bersorak gembira, rakyat terlibat euforia, ada harapan baru pasca peristiwa itu. Harapan itu kita sebut reformasi.

Reformasi mengandaikan perbaikan cepat dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan kita. Sejumlah lembaga baru pun terbentuk, dwifungsi ABRI dihapus, UUD diamandemen, politisi-politisi baru dari kalangan aktivis dan pejuang reformasi naik ke panggung utama politik. Harapan tentang Indonesia yang lebih baik pun melambung tinggi. Harapan itulah yang membuat kita terus melakukan konsolidasi demokrasi hingga saat ini.

Harus diakui, dalam 23 tahun reformasi ada banyak hal baik yang dirasakan negeri ini. Sistem politik yang lebih terbuka memungkinkan semua orang untuk ikut ambil bagian dalam pemerintahan, mengisi pos-pos eksekutif, legislatif atau yudikatif. Kekuatan politik pun tidak terpusat di elit saja, masyarakat bisa ikut terlibat. Hari ini kita sudah mulai merasakan buahnya. Banyak orang bisa menjadi anggota legislatif, menjadi kepala daerah, bahkan menjadi gubernur dan presiden. Situasi ini sulit kita bayangkan sebelum reformasi.

Namun, perlu diakui reformasi juga masih memiliki sejumlah kekurangan, untuk tidak kita sebut kegagalan. Sistem pemilihan langsung yang kita anut pada saatnya menciptakan kultur politik yang transaksional dan berbiaya tinggi. Hal ini sulit diabaikan seiring masyarakat yang belum sejahtera dan belum terdidik secara merata, membuat mereka hanya berpikir jangka pendek. Politisi-politisi yang hanya mengejar kekuasaan pun menghalalkan segala cara. Politik kita menjadi keruh dan dangkal, jauh dari nilai yang diharapkan oleh sistem demokrasi sesungguhnya.

Konsekuensi dari praktik politik semacam itu adalah suburnya perilaku memburu rente (rent seeking). Saat terpilih, para politisi ini tidak berpikir menyejahterakan rakyat, tetapi memperkaya dirinya sendiri untuk agenda politik berikutnya yang mensyaratkan logistik yang tidak sedikit. Maka kepentingan bangsa dan negara pun dikorbankan.

Tak mengherankan jika sistem ekonomi kita saat ini sangat liberal, bahkan mengancam ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi kita jadi berorientasi elit, bukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Apa buktinya? Ketergantungan kita pada impor pangan adalah fakta yang sangat memilukan. Pasca reformasi, bisa dikatakan kita tidak pernah melewati tahun tanpa impor beras, gula, garam, bawang, hingga daging. Untuk beberapa komoditas angkanya bahkan jutaan ton. Sungguh ironis mengingat sebenarnya bangsa ini pernah mengecap swasembada pangan, bahkan menjadi eksportir pangan. Untuk negeri dengan sumber daya alam yang kaya, tanah yang subur, laut yang luas, kegagalan kita memenuhi pasokan pangan kita sendiri adalah sebuah ironi yang harus kita sesali.

Dalam sektor perdagangan pun sama. Kita seolah tak punya cukup proteksi untuk mencegah masuknya produk-produk barang dan jasa impor. Dengan dalih globalisasi, kita menyebut kualitas produk asing lebih baik, seraya melupakan upaya untuk menggenjot kualitas produk dalam negeri. Bukan hanya barang dan jasa, bahkan sektor kita pun boleh jadi dikuasai asing. Singkatnya, bangsa ini kehilangan daya saing, dari kopi hingga mesin cuci, dari e-commerce hingga fintech.

Tetapi, kita tak boleh berputus asa. Selalu ada harapan untuk bisa memperbaiki hal-hal yang belum dicapai selama ini. Tugas kita saat ini adalah terus mencari akar permasalahannya dan menemukan formula terbaik untuk menyelesaikannya. Semua cara harus dicoba, semua pihak harus terlibat. Kelompok masyarakat sipil harus terus menyuarakan aspirasinya, perjuangan politisi dan partai politik di parlemen harus dilanjutkan, pemerintahan di berbagai sektornya harus terus mawas diri dan ingat bahwa semua yang

kita kerjakan adalah untuk rakyat.

Kita tak boleh menyerah kepada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kekecewaan rakyat terhadap reformasi dengan mengganti ideologi negara, apapun itu. Bangsa ini harus berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, tak bisa ditawar lagi. Reformasi adalah ikhtiar untuk mencari tafsir terbaik pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 itu. Cara ini yang harus terus kita perbaiki.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini saya pimpin merupakan salah satu ikhtiar itu. Partai ini lahir langsung dari rahim reformasi. Melalui partai ini para pendirinya bercita-cita mewujudkan Indonesia yang lebih baik, melalui jalur parlementer, lewat perjuangan politik. Harus diakui upaya-upaya itu belum maksimal, masih banyak yang perlu diperbaiki, tetapi selama harapan masih ada dan cita-cita mengabdikan pada negeri belum pupus, semua ikhtiar terbaik harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Kepada seluruh kader, pengurus di daerah hingga pusat, anggota legislatif, hingga pemimpin eksekutif dari PAN, tak pernah lelah saya selalu mengingatkan untuk tidak melupakan cita-cita reformasi. Semua harus bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin, untuk mewujudkan harapan rakyat. Berpolitiklah sebaik mungkin, dengan visi dan gagasan, berjuang dengan harapan, karena itulah yang akan membuat bangsa ini terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.

Akhirnya, momen 23 tahun reformasi ini harus kita kenang sebagai monumen harapan. Bahwa 23 tahun lalu, bangsa ini pernah melambungkan harapan untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Dengan harapan itulah kita terus bergerak maju. Meski tak selalu ideal, jangan pernah menyerah. Selalu ada harapan. ●

Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Amanat Nasional





MENGHINDARI LAKNAT PERIODE KEDUA

Upaya menghindari laknat periode kedua memang bukan persoalan mudah. Kendalanya, ruang dan waktu yang terbatas.

Memulai periode keduanya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan fokusnya untuk membenahi kualitas sumber daya manusia. "Lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan, pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita," kata Jokowi dalam pidatonya usai pelantikan, Minggu, 20 Oktober 2021.

Sebulan setelah pelantikannya, arah pembangunan SDM itu tampak terlihat dalam pengangkatan tujuh

staf khusus milenial. Presiden Jokowi sendiri yang memperkenalkan tujuh anak muda itu pada Kamis, 21 November 2019.

Jokowi mengatakan ketujuh staf khusus baru ini merupakan jembatan dirinya untuk berkomunikasi ke anak-anak muda. "Sekaligus menjadi jembatan saya bagi anak muda, santri muda, diaspora yang tersebar di berbagai tempat," kata Jokowi usai mengumumkan staf khusus di Istana Merdeka Jakarta.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu

meyakini mereka memiliki gagasan segar dan kreatif yang nantinya bisa diterapkan dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Jokowi juga berharap tujuh staf khusus milenial ini dapat memberikan terobosan dan inovasi baru untuk mengelola Indonesia.

"Golnya ke sana. Misalnya, sebagai contoh, kita memiliki puskesmas yang tersebar di seluruh Tanah Air. Bagaimana pendekatan aplikasi sistem yang paling gampang agar bisa terhubung dengan mereka," jelasnya.

"(Indonesia) Ada 300 ribu sekolah.

Bagaimana bisa terhubung dengan aplikasi sistem yang akan kita bangun. Ada 314 kabupaten/kota, bagaimana kita bisa handle komplain sehingga ada percepatan,” sambung Jokowi.

Pilihan prioritas untuk kalangan milenial yang lahir pada 1980-1990an ini memang sangat masuk akal. Terbukti, dari hasil Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z (lahir pada 1997 – 2012) dan Generasi Milenial (lahir pada 1981 – 1996). Proporsi Generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 25,87 persen. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) terhadap total populasi pada tahun 2020 sebesar 70,72 persen. Sedangkan persentase penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 29,28 persen di 2020. Persentase penduduk usia produktif sebesar itu menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada era bonus demografi.

Bonus demografi terjadi ketika penduduk usia kerja meledak, komposisi penduduk orangtua dan anak-anak mengecil. Mereka yang bekerja menanggung beban ekonomi lebih sedikit dibanding orang zaman dahulu.

“Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi,” kata Jokowi.

Ekonom demografi Universitas Indonesia Sri Moertiningsih Adioetomo menegaskan kesempatan emas ini hanya terjadi sekali dalam sejarah bangsa Indonesia. Bonus demografi mundur menjadi terbukanya sampai tahun 2040. Waktu saya cetuskan tahun 2005, tingkat kelahiran menurun drastis, tetapi sejak tahun 2003-2012 stagnan, enggak turun lagi. Ini dampak jangka panjang krisis moneter 1998,” ujarnya.

Di era Presiden Jokowi, diharapkan momentum ini dipersiapkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ekonomi bisa tumbuh positif jika pendapatan

per kapita meningkat. Pendapatan per kapita bisa naik jika tenaga kerjanya mempunyai pekerjaan yang layak dan produktif.

“Andai kata kualitas pekerja ini bagus, produktif, dan berdaya saing, maka bonus demografi membantu memicu pertumbuhan ekonomi,” kata Prof Moertiningsih.

Jadi, arah pembenahan sumber daya manusia generasi Z dan milenial memang sudah tepat dalam pilihan fokusnya. Tantangannya, jelas pendidikan yang disebutkan oleh Presiden Jokowi ketika memperkenalkan tujuh staf khusus milenial itu.

Data BPS pada 2018, anak-anak

Covid-19 menjangkau Indonesia dan menjadi kendala tambahan. Pemerintah lantas mengambil langkah sebagaimana enam arahan Presiden Jokowi. Pertama, untuk mencegah meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK), program stimulus ekonomi agar segera diimplementasikan, segera dilaksanakan, dan betul-betul berjalan sehingga manfaatnya dirasakan oleh para pelaku usaha.

Kedua, untuk pekerja di sektor formal yang jumlah pekerjaannya ada 56 juta, Presiden meminta agar dipastikan skema program yang meringankan beban para pekerja. Ketiga, untuk pekerja di sektor informal, Presiden



Indonesia rata-rata bersekolah 8,17 tahun lamanya atau setara dengan kelas 2 SMP/ sederajat. Angka ini belum memenuhi target pemerintah sebesar 8,7 tahun. Sekalipun target itu sudah tercapai, apa yang dapat diharapkan dengan kualitas penduduk dengan tingkat pendidikan SMP?

Yang terjadi kemudian adalah munculnya program kartu Prakerja sebagai terobosan untuk membuka jalan bagi lebih dari separuh penduduk Indonesia. Dengan jumlah sekitar 53,87 persen dari total penduduk, yang lahir antara 1981-1997 mencapai lebih dari 145 juta jiwa.

Namun, sementara fokus pembenahan SDM ini belum menemukan bentuk yang paling pas, pandemi

meminta dimasukkan ini dalam program jaring pengaman sosial.

Keempat, bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, Presiden meminta diberikan prioritas untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Kelima, Presiden meminta di Kementerian Desa, Kementerian PU, Kementerian BUMN, dan kementerian lain agar memperbanyak program padat karya tunai sehingga memperbanyak penyerapan tenaga kerja. Keenam, berikan perlindungan kepada para pekerja migran, baik yang sudah kembali ke tanah air maupun yang masih berada di luar negeri sehingga mereka betul-betul pada posisi tetap terlindungi.

Peran kartu Prakerja menjadi lebih meningkat. Program kartu Prakerja

• INFO KHUSUS

yang merupakan janji kampanye Presiden Jokowi sejak 2019, menjadi salah satu resep untuk mengatasi masalah angkatan kerja di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Program kartu Prakerja yang semula bertujuan mengembangkan kompetensi kerja masyarakat usia produktif, kini menjadi prioritas bagi masyarakat terdampak Covid-19. Setidaknya ada

maupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Akibat situasi pandemi, alokasi anggaran program kartu Prakerja ditambah menjadi dua kali lipat dari yang semula Rp10 triliun. Anggaran Rp20 triliun disalurkan untuk 5,6 juta penerima manfaat. Hal ini menciptakan polemik.

Namun, manfaat program ini ada-

pelatihan yang harus digunakan.

Nah, Indonesia Corruption Watch dalam "Catatan Kritis Kartu Prakerja" menganggap bahwa kartu Prakerja tidak lebih dari program pemborosan anggaran dan tidak selayaknya dipercepat serta dinaikkan anggarannya terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini. Program ini dinilai tidak efektif dan efisien untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi pencari kerja. Di tengah pandemi seperti ini ICW menyerukan kenaikan anggaran lebih baik dialokasikan untuk penanganan Covid-19 yang lebih mendesak.

Peluncuran kartu Prakerja dianggap kurang tepat sebagai salah satu bagian dari jaring pengaman sosial yang disediakan oleh pemerintah di tengah pandemi Covid-19, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah bantuan yang cepat dan konkret. Kartu Prakerja ini bisa dibilang merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga pemerintah hanya memberikan kail beserta umpannya (kartu) untuk mencari ikan (pekerjaan) di danau yang sedikit ikannya (lapangan pekerjaan) dan bersaing dengan pemancing lainnya (angkatan kerja).

Pendapat ini sebenarnya menggarisbawahi pentingnya tindak lanjut kartu Prakerja jika pelaksanaan pelatihan selesai dilakukan. Program kartu Prakerja merupakan konsep yang baik dalam upaya meningkatkan kompetensi tetapi tidak mampu menjawab soal ketenagakerjaan. Selama permintaan terhadap tenaga kerja tidak ditingkatkan, lapangan kerja tidak diciptakan, persoalan pengangguran akan terus menghantui perekonomian, apalagi ini terjadi di tengah pandemi Covid-19.

Faktanya, lembaga kajian Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) mengungkapkan, tingkat pengangguran muda Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mempresentasikan pengangguran berusia muda di Indonesia hampir menyentuh angka 20 persen pada 2020. Sementara negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam,



dua kelompok masyarakat yang tergolong paling rentan akibat pandemi Covid-19 yaitu para pekerja yang dirumahkan (PHK) pada masa pandemi, dan pekerja dari sektor informal yang terdampak oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

lah setiap peserta akan mendapatkan uang senilai Rp3.550.000. Rinciannya, setiap penerima manfaat akan mendapatkan insentif sebanyak Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, insentif survei Rp50 ribu per survei (ada tiga kali survei), dan Rp1 juta untuk biaya

Singapura, dan Malaysia masih berada di bawah 15 persen.

Di antara mereka yang berusia muda, kata Faisal, ternyata Indonesia paling tinggi sendiri dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN. Dalam diskusi bertajuk 'Teknologi Digital dan Solusi Ketenagakerjaan', Senin, 3 Mei 2021 itu, Faisal menyebutkan, tingginya pengangguran berusia muda itu menunjukkan masih banyak masalah dalam penciptaan tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya, terkait ketidaksesuaian atau mismatch antara penciptaan lapangan kerja dengan kualifikasi lulusan baru yang terjadi sebelum pan-

mudah orang mencari pekerjaan.

Dalam kondisi seperti itu plus desakan digitalisasi yang menuntut efisiensi dan daya saing di dunia kerja, maka diperlukan keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan, dan pasar kerja. Dalam hal penawaran, Faisal mengatakan perlu adanya ketersediaan lapangan kerja yang memadai secara kuantitas dan kualitas, sedangkan di sisi demand perlu ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pasar kerja diharapkan juga mampu mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja secara efektif

lower-middle hingga upper middle. Bank Dunia telah menaikkan status Indonesia dari lower middle income country (negara dengan pendapatan menengah bawah) menjadi upper middle income country (negara dengan pendapatan menengah atas) per 1 Juli 2020 lalu. Negara dengan pendapatan per kapita antara USD1.025 - USD3.995 tergolong penghasilan menengah ke bawah, sedangkan yang menengah atas pendapatan per kapitanya ada di angka USD3.996 - USD12.375.

Tantangan terbesar adalah bergerak dari pertumbuhan yang didorong oleh sumber daya yang bergantung



demi Covid-19.

Menurut dia, sebenarnya para penganggur yang berusia antara 20-29 atau di 20an tahun sudah mengalami peningkatan jumlahnya sebelum pandemi. Sementara, yang usianya lebih tua dari itu relatif lebih flat (datar). Dengan kata lain, Indonesia menghadapi masalah lapangan kerja anak-anak muda terdidik (educated youth employment) sebagaimana tercermin dari data tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang menunjukkan bahwa persentase penganggur muda didominasi oleh mereka yang berpendidikan menengah ke atas. Ini berkebalikan dengan asumsi lama bahwa semakin tinggi pendidikannya, maka akan kian

dan efisien.

Itu masalah dari sisi lapangan kerja saja. Secara keseluruhan, Indonesia kini menghadapi ancaman perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Perangkap pendapatan menengah adalah situasi pembangunan ekonomi saat negara yang memperoleh pendapatan tertentu terjebak pada tingkat itu. Istilah ini diperkenalkan oleh Bank Dunia pada 2006.

Menurut rumusan Bank Dunia, negara-negara dengan kisaran pendapatan menengah adalah yang memiliki produk nasional bruto per kapita antara 1.000-12.000 dolar Amerika Serikat. Kelompok negara berpendapatan menengah itu terbagi lagi mulai dari yang

pada tenaga kerja murah dan modal ke pertumbuhan berdasarkan produktivitas dan inovasi yang tinggi. Hal ini membutuhkan investasi dalam infrastruktur dan pendidikan — membangun sistem pendidikan berkualitas tinggi yang mendorong kreativitas dan mendukung terobosan dalam sains dan teknologi yang dapat diterapkan kembali ke dalam perekonomian. Diversifikasi ekspor juga dianggap penting untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah.

Apakah ruang dan waktu memberi kesempatan untuk Jokowi menghindari laknat periode kedua? Waktunya habis pada 2024. Atau ada periode ketiga? •

TOP 10

Gunawan Effendi

Tolong simak baik-baik. Pada triwulan I (Januari-Maret) 2021, terdapat 10 provinsi yang sanggup tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020. Paling tidak, kegiatan ekonomi di 10 provinsi itu pada Januari-Maret 2021, lebih aktif dan produktif dibandingkan awal 2020 menjelang wabah menjangkau Indonesia.

Memang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memiliki 34 provinsi, secara nasional masih minus 0,74 persen. Namun, 10 provinsi itu dapat memicu harapan ekonomi di daerah lain menyusul tumbuh positif pula.

Badan Pusat Statistik pada awal Mei 2021 mengemukakan, 10 provinsi yang tumbuh positif itu beserta angka pertumbuhannya: Papua 14,28 persen, Maluku Utara 13,45 persen, Sulawesi Tengah 6,26 persen, DI Yogyakarta 6,14 persen, Sulawesi Utara 1,87 persen, Papua Barat 1,47 persen, Kep. Bangka Belitung 0,97 persen, Riau 0,41 persen, Nusa Tenggara Timur 0,12 persen, dan Sulawesi Tenggara 0,06 persen.

Dari lima provinsi pertama yang tertinggi angka pertumbuhannya kita dapat mengira mengapa tampak mengesankan. Tiga yang pertama mengandalkan industri ekstraktif yang menghela kegiatan ekonomi tetap berjalan di tengah pandemi. Meskipun jumlah penduduknya relatif sedikit dibandingkan dengan populasi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Sedangkan Sulawesi Utara, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima, kita mencatat beberapa lapangan usaha yang mendorong pertumbuhan ini antaranya industri pengolahan (13,29 persen), pengadaan listrik, gas, dan produksi es (9,93 persen), dan konstruksi (8,66 persen). Maka industri perikanan beserta perkebunan rakyat hingga hilirnya sangat mungkin menjadi penghela utama kegiatan ekonomi di sana.

Toh Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan keistimewaannya yang lain kali ini. Tumbuh 6,14 persen pada triwulan I 2021 dibandingkan dengan periode

yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi DIY relatif lebih baik dibandingkan dengan Jawa secara keseluruhan yang masih minus 0,83 persen.

Yang lebih mengesankan sebenarnya adalah pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kinerja lapangan usaha informasi dan komunikasi yang mencapai 31,91 persen. Dengan begitu, kawasan kesultanan ini menunjukkan aktivitas online melalui internet yang meningkat pesat selama setahun terakhir. Selanjutnya, pertumbuhan sektor pengadaan air mencapai 18,24 persen, konstruksi 11,40 persen, dan jasa kesehatan 10,93 persen.

Sebaliknya, lapangan usaha transportasi mengalami kontraksi paling dalam, yaitu 12,01 persen. Patut diduga sektor transportasi yang surut adalah imbas lebih banyak kegiatan bersifat online.

Dari pengamatan terhadap lima provinsi dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan I 2021 ini, banyak hal dapat menjadi pelajaran penting bagi kita semua bagaimana perubahan dan penyesuaian berlangsung di masa wabah Covid-19. Setidaknya, ada dua pola menghela pertumbuhan yang perbedaannya mencolok: Pertama, mengandalkan enclaves

(kantong-kantong) pertumbuhan industri ekstraktif semisal pertambangan seperti di tiga provinsi dengan pertumbuhan tertinggi: Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.

Kedua, menghela pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melibatkan sebanyak mungkin warga. Sulawesi Utara dan Yogya dapat menjadi contohnya. Pada dua contoh terakhir ini, terdapat pola yang mengikuti revolusi industri 4.0 mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi. Selebihnya, kita semua memerlukan pangan dan air, serta sudah pasti energi.

Sekali lagi, pangan (bukan hanya makanan pokok, melainkan juga perikanan, ternak, buah-buahan), air, energi, dan pemanfaatan TIK. Jangan lupa semua itu tiada artinya tanpa pemulihan sektor kesehatan khususnya kinerja penanganan Covid-19. Jadi, tolong simak baik-baik. ●





www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

info indonesia

Network

**INFO
PASANG
IKLAN**
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562



Lautan
informasi
di dunia maya
melalui jaringan
internet
memberikan
banyak
referensi
iNFO
kepada
masyarakat

JALAN MPR III NO. 5B
KELURAHAN CILANDAK
BARAT, KECAMATAN
CILANDAK, JAKARTA
SELATAN (12430)
TELP 021-27812397



info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI

<https://infoindonesia.id>

EDISI #03 MEI 2021

JAGA SATWA
LANGKA,
KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN

DITJEN PAS DAN
PENTINGNYA
BERSINERGI DENGAN
MEDIA MASSA

LEBIH TEGAS
MENEKAN ANGKA
PENULARAN
COVID-19

BERPISAH DAN
BERJUMPA LAGI
DI KOTA TUA

SUPER AIR JET
DATANG SEMOGA
SANGGUP BERTAHAN

GARUDA ADA DI DADA CHAIRUL TANJUNG

DINAMIKA
CT CORPORA